



# **PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEJURUAN**

## **PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 4 TAHUN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2017

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

**Pengelolaan Pendidikan Kejuruan: Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 4 Tahun**

Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang,

Kemendikbud, 2017

V, 96h

ISBN: 978-602-8613-83-5

1. Pendidikan Kejuruan
2. Kompetensi Lulusan
3. SMK
4. Paket Keahlian
5. Spektrum
6. DUDI

**I. JUDUL**

**II. PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
BALITBANG, KEMDIKBUD**

**III. SERI PENELITIAN KEBIJAKAN**

Tim Penyusun : Darmawan Sumantri, S.Si.

Dr. Subijanto, M.Ed.

Ir. Siswantari, M.Sc.

Sudiyono, S.Pd., M.Pd.

Ir. Warsana

Tim Penyunting : Dr. Subijanto, M.Ed.

Dr. Yaya Jakaria, S.Si., MM

**PERNYATAAN HAK CIPTA**

© Puslitjakdikbud/Copyright@2017

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Diperbolehkan mengutip dengan menyebut

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan  
Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud

Gedung E, Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-5736365; Faks. 021-5741664

Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>

e-mail: [puslitjakbud@kemdikbud.go.id](mailto:puslitjakbud@kemdikbud.go.id)

## KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Tahun 2017 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang merupakan hasil kegiatan Tahun 2016. Penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini dimaksudkan antara lain untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai wujud akuntabilitas publik Puslitjakdikbud, Balitbang, Kemendikbud, sesuai dengan Renstra Puslitjak Tahun 2016.

Buku Laporan Hasil Penelitian yang diterbitkan tahun ini terkait prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Masyarakat; dan Bidang Kebudayaan.

Kami menyambut gembira atas terbitnya Buku Laporan Hasil Penelitian ini dan mengharapkan informasi hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini.

Jakarta, Desember 2017

plt. Kepala Pusat,

Dr. Ir. Bastari, M.A.

NIP. 196607301990011001

## **KATA PENGANTAR**

Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan kejuruan, khususnya SMK, sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pemerintahan saat ini komitmen tersebut secara eksplisit dituangkan dalam kebijakan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK, yang antara lain mengamanatkan prioritas pengembangan SMK pada 3 bidang keahlian yaitu bidang keahlian Kemaritiman, Agrobisnis/Agroteknologi, dan Pariwisata. Sebagai tindak lanjut kebijakan itu, salah satu program yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Pengembangan SMK adalah Pengembangan SMK 4 tahun. Program ini terutama didasari oleh adanya kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), yang menilai kompetensi lulusan SMK yang ada saat ini (dari paket-paket keahlian yang akan dikembangkan masa studinya menjadi 4 tahun) masih rendah hingga tidak siap memasuki dunia kerja. Hal ini ditenggarai menjadi “kontributor” utama terhadap tingginya angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dari lulusan SMK.

Komitmen itu makin dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, yang memerintahkan 12 Menteri, seluruh Gubernur, dan Kepala BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas fungsi serta kewenangan masing-masing, dan agar bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Dalam hal ini, Kemendikbud tentu saja menjadi sektor utama dalam upaya menindaklanjuti Inpres No. 9/2016 ini.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh Puslitjakdikbud Balitbang ini telah menghasilkan informasi mendalam, menganalisisnya, dan dari hasil analisis tersebut merumuskan opsi-opsi kebijakan tentang (i) kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, dan masa studi (waktu pembelajaran) yang untuk mencapai/menguasai kompetensi-kompetensi tersebut, (ii) penghargaan yang lebih tinggi terhadap lulusan SMK 4 tahun (dibandingkan dengan lulusan SMK 3 tahun), dan (iii) pengelolaan sekolah untuk SMK 4 tahun. Semoga opsi-opsi kebijakan tersebut dapat mendukung terlaksananya program pengembangan SMK 4 tahun dengan seoptimal mungkin.

Atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak sehingga terselesaikannya penelitian ini, diucapkan banyak terimakasih.

Jakarta, Desember 2017

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	3
C. Langkah Antisipatif .....	5
D. Tujuan.....	11
E. Lingkup Penelitian.....	12
F. Penerima Manfaat.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) .....	13
B. Prakerin (Praktik Kerja Industri) .....	27
C. Sertifikasi.....	31
D. KKNI ( Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) .....	33
E. Tantangan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).....	35
F. Tinjauan Historis dan Yuridis Penyelenggaraan SMK 4 Tahun.....	38
G. Berbagai Nilai Unggul SMK 4 tahun .....	40
H. Lingkup Paket Keahlian yang Dikaji.....	42
I. Kerangka Pikir .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Pendekatan.....	45
B. Sampel .....	45
C. Lokasi dan Subyek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Analisis Data.....	47
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Kompetensi dan Waktu Pembelajaran yang Dibutuhkan .....	48
B. Penghargaan Terhadap Lulusan SMK 4 Tahun .....	64
C. Pengelolaan.....	68
A. Simpulan .....	87
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)	15
Tabel 2.	Perubahan Nomenklatur STM Pembangunan	32
Tabel 3.	Paket, Program, dan Bidang Keahlian yang Dikaji	35
Tabel 4.	Daerah, Sekolah, Paket Keahlian Sampel dan Fokus Penelitian	37
Tabel 5.	Responden Penelitian	38
Tabel 6.	Jumlah dan Rasio Guru : Siswa per Kelompok Mata Pelajaran Berdasarkan Jumlah Jam Mengajar Guru dan Jumlah Program Keahlian (PK)	59

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.	Persentase Penduduk Usia $\geq$ 15 Tahun yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan	<b>4</b>
Gambar 2.	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia $\geq$ 15 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan	<b>4</b>
Gambar 3.	Proporsi SMK dan Siswa SMK Berdasarkan Bidang Keahlian (%)	<b>8</b>
Gambar 4.	Bagan Kerangka Pikir Penelitian	<b>36</b>
Gambar 5.	Persentase Guru Produktif Terhadap Guru Normatif pada SMK	<b>60</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk menyiapkan peserta didiknya memiliki keterampilan/ Keahlian di bidang tertentu sehingga siap memasuki dunia kerja baik sebagai tenaga kerja yang produktif maupun mengembangkan dirinya untuk menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kepemilikan SDM berupa tenaga kerja yang ahli, terampil dan produktif menjadi sebuah tuntutan bagi negara yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia, agar segala nilai tambah (*added values*) dari sumber-sumber daya alam sebagai bahan baku berbagai industri tersebut dapat dinikmati semaksimal mungkin oleh rakyat Indonesia sendiri. Terlebih dengan telah ditetapkannya KEU (kegiatan-kegiatan ekonomi utama) pada masing-masing koridor MP3EI sejak tahun 2011 lalu sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah masing-masing, diharapkan SDM di daerah-daerah tersebut pulalah yang akan menjadi pelaku-pelakunya sekaligus yang mendapatkan manfaat paling besar. Mengingat hal tersebut, menjadi suatu tuntutan untuk menjadikan SDM di daerah-daerah itu sebagai tenaga terampil dan produktif sesuai bidang-bidang keahlian yang dibutuhkan masing-masing daerahnya. Beberapa alasan diperlukannya tenaga kerja yang terampil dan produktif menurut Djojonegoro (1998 dalam Johan, 2015) ialah: (1) tenaga terampil adalah orang yang terlibat langsung dalam proses produksi barang maupun jasa; (2) tenaga terampil sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industri di suatu negara; (3) kemajuan teknologi adalah faktor penting dalam meningkatkan keunggulan, faktor keunggulan ini tergantung pada tenaga terampil yang menguasai dan mengaplikasikannya; (4) orang yang memiliki keterampilan memiliki peluang tinggi untuk bekerja dan produktif, semakin banyak suatu negara mempunyai tenaga terampil dan produktif maka semakin kuat pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan. dan (5)

persaingan global berkembang semakin ketat dan tajam, tenaga terampil adalah faktor keunggulan menghadapi persaingan global.

Dalam era global saat ini Indonesia tidak dapat menghindar dari arus globalisasi, terutama dalam bentuk persaingan bebas yang semakin meluas dalam perputaran lalu lintas arus produksi dan perdagangan barang dan jasa, tenaga kerja, serta modal. Persaingan tersebut setidaknya dalam lingkup regional ASEAN, seiring dengan dideklarasikannya *Asean Economic Community* atau MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) akhir tahun 2015 yang lalu. Meskipun MEA dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan semua negara anggota ASEAN dalam menghadapi persaingan global, namun tak bisa dipungkiri pembentukan komunitas perekonomian tersebut secara internal menimbulkan pula persaingan diantara negara negara sesama anggota Asean sendiri. Bagi sebagian besar negara anggota Asean termasuk Indonesia, MEA bisa menjadi peluang tetapi sekaligus juga menjadi tantangan, kalau tidak mau disebut “ancaman”. Data BPS (2007) menunjukan 70 persen penduduk Indonesia merupakan usia produktif, dengan angka ketenaga kerjaan mencapai 110 juta orang. Ditambah dengan kepemilikan sumber daya alam yang begitu besar, potensi Indonesia untuk menjadi kekuatan baru dalam perekonomian global sangatlah besar. Namun demikian jika berbicara masalah kualitas atau tingkat keterampilan tenaga kerja tersebut cukup memprihatinkan. Betapa tidak, data BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 2014 menyatakan bahwa 72 persen tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan rendah (SMP ke bawah), dan dari 28 persen sisanya itu hanya 8 persen saja yang diklasifikasikan memiliki daya saing, dimana hanya 3 persen diantaranya tergolong profesional dengan tingkat pendidikan minimal S1, sementara 5 persen lainnya merupakan *semi-skilled worker* dengan tingkat pendidikan diploma dan kejuruan.

Berbicara mengenai pendidikan kejuruan, khususnya pendidikan menengah kejuruan (SMK) di Indonesia, diindikasikan terdapat gejala yang konsisten bahwa program pendidikan di SMK terisolasi dengan kebutuhan riil dunia usaha dan

industri. Program pendidikan bersifat “*supply driven*” karena jenis program studi, materi pendidikan, cara mengajar, media belajar, evaluasi dan sertifikasi lebih ditentukan oleh *provider* utama, yaitu Pemerintah. Program pendidikan kejuruan di sekolah kaku dan tidak lentur terhadap perubahan kebutuhan lapangan kerja. Program pendidikan belum berorientasi terhadap kebutuhan pasar kerja yang berubah, sehingga terjebak ke dalam pemeo “membidik sasaran yang bergerak” (*aimed at the moving target*). Jumlah rumpun dan program studi “relatif tetap” tidak selaras dengan kebutuhan lapangan kerja yang berubah-ubah (Suryadi, 2010).

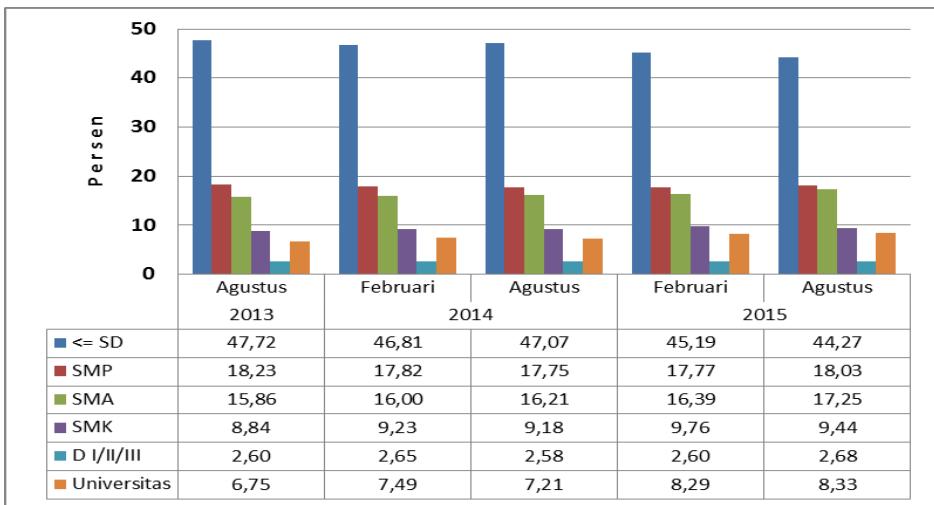
## B. Permasalahan

Beberapa permasalahan “klasik” dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan khususnya SMK, belum juga terselesaikan dengan baik, diantaranya ialah:

1. Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas dikarenakan terbatasnya kemampuan masyarakat dengan latar belakang ekonomi lemah, keterbatasan jumlah SMK, dan keterbatasan kapasitas SMK
2. Masih rendahnya kualitas pembelajaran di SMK disebabkan masih lemahnya pelaksanaan kurikulum, sistem penilaian, sarana praktikum dan penjaminan mutu.
3. Sulitnya mendapatkan mitra dari DU/Di ketika tiba waktunya para siswa melaksanakan prakerin (praktik kerja industri). Kalaupun berhasil mendapatkan mitra, tidak jarang memunculkan masalah lain seperti: (i) terjadi ketidaksesuaian (*missmatch*) antara program keahlian yang dipelajari siswa dengan substansi pekerjaan yang dilakukan dalam prakerin, dan (ii) durasi prakerin yang tidak memadai karena umumnya tidak sampai 1 semester, bahkan tidak sedikit yang hanya dilaksanakan dalam waktu 3 bulan saja.

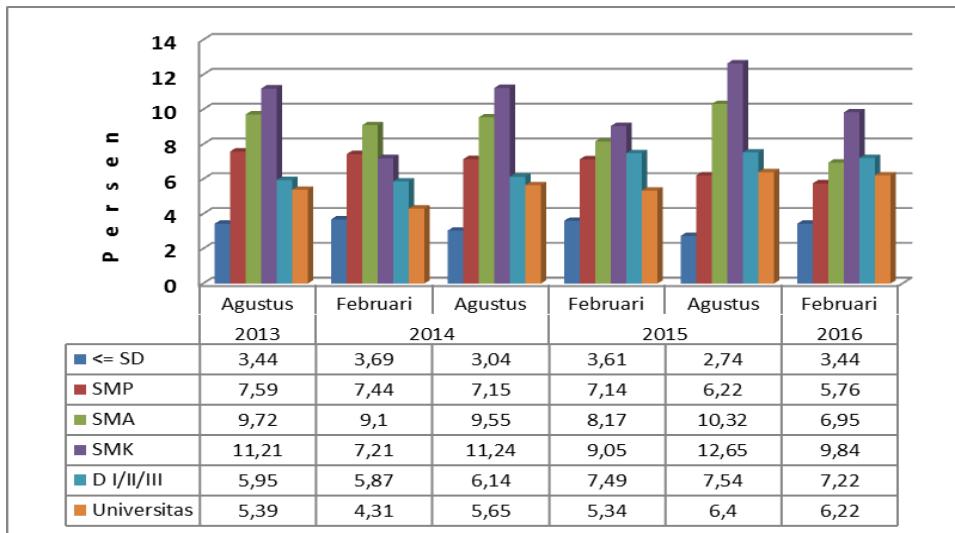
4. Masih lamanya masa tunggu lulusan SMK masuk ke lapangan kerja.
5. Kekurangan tenaga Guru SMK yang berkualitas
6. Belum optimalnya tata kelola dalam penyelenggaraan SMK

Mencermati berbagai masalah tersebut, mudah untuk menyimpulkan bahwa pendidikan menengah kejuruan masih jauh dari ideal, bahkan cenderung semakin jauh dari harapan pihak-pihak yang sebenarnya banyak mempunyai kepentingan dengan keberadaan SMK. Dampak dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah rendahnya keterserapan ke dunia kerja dan tingginya TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) lulusan SMK dibandingkan dengan satuan-satuan pendidikan lainnya. Menurut statistik pengangguran (Sakernas 2005 s/d 2009) SMK merupakan satuan pendidikan yang melahirkan angka pengangguran tertinggi (Suryadi, 2010). Hasil survei Brodjonegoro (2016) pada tahun 2015 terhadap 460 perusahaan yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan beragam bidang usaha dan beragam ukuran, menunjukkan separuh populasi lulusan SMK tidak memperoleh pekerjaan formal. Artinya terjadi ketidaksesuaian antara keahlian yang dipelajari di SMK dengan kebutuhan perusahaan (DU/DI). Hal lain yang juga mengemuka dari hasil survei tersebut adalah perusahaan ternyata lebih memilih lulusan SMA ketimbang lulusan SMK. Hal itu dikarenakan perusahaan lebih memilih mereka yang siap latih terkait dinamika pekerjaan yang demikian cepat di era persaingan global, sehingga dibutuhkan calon pekerja yang adaptif mampu mengikuti perkembangan. Hingga 4 tahun terakhir ini (2013-2016), data dari BPS masih menunjukan kondisi yang serupa sebagaimana tampak pada Gambar 1 dan Gambar 2 berikut.



Sumber: BPS November 2013, Mei dan November 2014 dan 2015

Gambar 1. Persentase Penduduk Usia  $\geq 15$  Tahun yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: BPS November 2013, Mei dan November 2014 dan 2015, dan Mei 2016

Gambar 2. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia  $\geq 15$  Tahun Menurut Tingkat Pendidikan

### C. Langkah Antisipatif

Sebagai langkah antisipatif terhadap rendahnya kualitas atau tingkat keterampilan tenaga kerja sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan kejuruan, khususnya SMK, sebagai salah satu

upaya meningkatkan daya saing SDM. Dalam pemerintahan saat ini komitmen tersebut secara eksplisit dituangkan dalam kebijakan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK, yang antara lain mengamanatkan prioritas pengembangan SMK pada 3 bidang keahlian yaitu bidang keahlian Kemaritiman, Agrobisnis/Agroteknologi, dan Pariwisata. Komitmen tersebut mulai diwujudkan pada tahun 2016 ini dengan dibangunnya 341 SMK yang sebagian besar menyelenggarakan bidang-bidang keahlian prioritas tersebut. Pembangunan sejumlah SMK tersebut dirasa akan dapat mengatasi kesenjangan pendidikan dan dunia kerja. Bersamaan dengan itu, akan dilakukan pula penataan program keahlian yang disesuaikan dengan potensi daerah serta diselaraskan dengan kebutuhan DU/DI dengan mengikuti perkembangan teknologi dan standar-standar yang digunakan. Secara lebih implementatif, dalam RPJM 2015-2019 telah pula ditetapkan salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun ialah meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri. Untuk mencapai hal tersebut kebijakan dan strategi yang ditempuh diarahkan untuk:

1. Perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas, untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik guna memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama pemanfaatan bonus demografi dan menyiapkan perdagangan bebas di ASEAN.
2. Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, dan terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap, serta ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif;
3. Penguatan kecakapan akademik siswa SMK seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar;

4. Pemberian insentif baik finansial maupun non-finansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang;
5. Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri;
6. Penyelarasan program Keahlian dan pengembangan kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja.

Selanjutnya secara lebih teknis dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan pula bahwa Pemerintah, dalam hal ini untuk pendidikan menengah kejuruan, secara kontinyu akan terus meningkatkan layanan pendidikan menengah seperti peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum dan adaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Niat Pemerintah melakukan pengembangan pendidikan menengah kejuruan seolah mencapai “puncaknya” dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 19 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia. Melalui Inpres tersebut, Presiden memerintahkan 12 Menteri, seluruh Gubernur, dan Kepala BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas fungsi serta kewenangan masing-masing, dan agar bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.

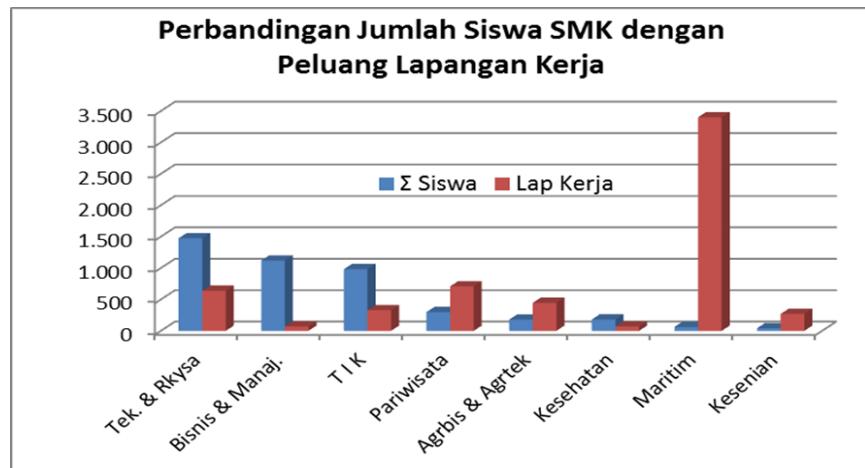
Secara lebih rinci, dalam Inpres No. 19 tahun 2016 tersebut Presiden menginstruksikan kepada:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), untuk membuat peta jalan SMK; menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*); meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri; meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK,
- 11 Menteri Kabinet Kerja (selain Mendikbud), yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Kesehatan, supaya menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK,
- Kepala BNSP, untuk mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, pendidik dan tenaga pendidik SMK, serta mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama, dan
- Semua Gubernur agar memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing; menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas; melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; serta mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing (Kemendikbud, 16 September 2016).

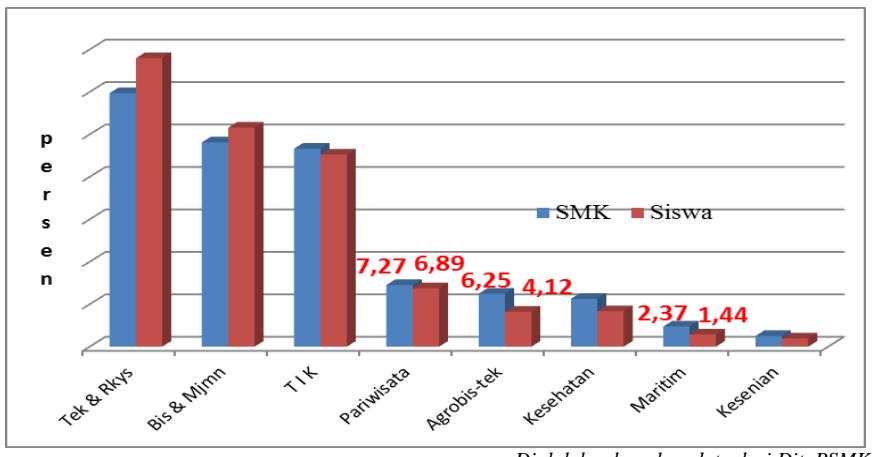
Menindaklanjuti Inpres tersebut, khususnya instruksi kepada Mendikbud, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Pembinaan SMK, melaksanakan program penguatan dan pengembangan pendidikan kejuruan dan keterampilan, dengan kegiatan antara lain sebagai berikut:

### 1. Pengembangan SMK Bidang Keahlian Prioritas Nawacita

Sebagaimana dinyatakan di atas, bidang keahlian yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah dalam mengembangkan pendidikan menengah kejuruan ialah bidang keahlian Kemaritiman, Agrobisnis/Agroteknologi, dan Pariwisata. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara utuh, ketiga bidang keahlian ini dijadikan bidang-bidang keahlian prioritas pengembangan pendidikan kejuruan dalam “nawa cita” program pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini didasari kenyataan sangat besarnya potensi ekonomi pada ketiga bidang tersebut, sementara pada sisi ketersediaan (*supply*) calon tenaga kerja di ketiga bidang keahlian itu masih sangat kecil sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 berikut.



Diolah berdasarkan data dari Dit. PSMK 2016



Diolah berdasarkan data dari Dit. PSMK 2016

Gambar 3. Proporsi SMK dan Siswa SMK Berdasarkan Bidang Keahlian (%)

## 2. Pengembangan SMK 4 Tahun

Direktorat Pembinaan SMK saat ini tengah menyiapkan pendidikan menengah kejuruan (SMK) dengan masa studi 4 tahun pada berbagai bidang dan program keahlian. Program ini merupakan bagian dari upaya penyelarasan pendidikan menengah kejuruan dengan dunia kerja sesuai perkembangan teknologi, pelayanan, dan standar yang berkembang dalam DU/DI. Hasil monev yang dilakukan Direktorat PSMK baru-baru ini juga mengungkapkan beberapa DU/DI dan asosiasi profesi menyampaikan perlunya masa studi SMK untuk berbagai bidang, program, dan paket keahlian diselenggarakan selama 4 tahun guna memenuhi perkembangan kebutuhan DU/DI saat ini. Alasan utama dari perlunya penambahan masa studi dari 3 tahun menjadi 4 tahun itu adalah agar lulusan SMK benar-benar siap kerja ketika memasuki lapangan kerja baik dari sisi keterampilan maupun mental. Dalam sejarah perjalanan pendidikan Indonesia, penyelenggaraan SMK 4 tahun sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 1970an dengan didirikannya delapan (8) STM (Sekolah Teknologi Menengah) Pembangunan untuk berbagai paket keahlian. Namun dalam perjalanan perkembangannya, dari 12.809 SMK

yang ada hingga saat ini hanya terdapat 13 SMK saja yang menyelenggarakan program pendidikan dengan masa studi 4 tahun.

### 3. Penguatan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan

Program/kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden RI dan Kanselir Republik Federasi Jerman pada tanggal 18 April 2016 di Jerman, dalam rangka kerjasama pendidikan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman. Pertemuan tersebut antara lain telah menyetujui perlunya penguatan dan pengembangan pendidikan kejuruan dan keterampilan (*Vocational Education and Training/VET*) di Indonesia. Sebagai langkah awal, pemerintah Jerman akan membantu Indonesia mengidentifikasi bagaimana memperkuat sistem pendidikan kejuruan dan keterampilan di Indonesia, guna memberikan landasan yang kuat untuk mengimplementasikan sistem pendidikan kejuruan dan keterampilan yang dijalankan di Jerman saat ini (*Duales System*). Mengingat Jerman dalam hal ini adalah negara yang sangat terkemuka dalam pengembangan teknologi seperti mesin dan otomotif, maka bidang keahlian yang akan dikerjasamakan dalam penguatan dan pengembangan ini adalah bidang teknologi dan rekayasa.

## D. Tujuan

Secara umum penelitian ini bertujuan mengkaji upaya penyelarasan SMK dengan dunia kerja (DU/DI) pada beberapa paket keahlian dari bidang keahlian yang menjadi prioritas pengembangan kebijakan Nawacita. Secara khusus, terkait dengan Inpres No. 19/2016, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji:

1. Penyempurnaan dan penyelarasan kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan DU/DI,
2. Upaya peningkatan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, DU/DI

## **E. Lingkup Penelitian**

Penelitian ini akan mengkaji aspek-aspek pembelajaran dan pengelolaan SMK yang menyelenggarakan paket-paket keahlian Nautika Kapal Niaga (NKN), Nautika Kapal Penangkapan Ikan (NKPI), Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan (PMHPP), Kesehatan Hewan (KH), dan Tata Busana (TB), baik yang menyelenggarakannya dengan masa studi 3 tahun maupun 4 tahun.

## **F. Penerima Manfaat**

Hasil kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan kebijakan bagi instansi/Unit berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
3. Dinas Pendidikan Provinsi
4. DU/DI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)
5. Sekolah Menengah Kejuruan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**

##### **1. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan SMK**

Pendidikan memiliki peranan yang esensial untuk menjamin kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa. Pendidikan kejuruan pada hakikatnya merupakan subsistem dari sistem pendidikan. Pendidikan kejuruan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 18 dijelaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu (Depdiknas, 2003). Oleh karena itu, tujuan penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan (SMK) dimaksudkan untuk menyiapkan siswa 1) memasuki lapangan pekerjaan tertentu serta mengembangkan sikap profesional; 2) memiliki bekal dan kemampuan memilih karir, mampu berkompetisi, dan mampu mengembangkan diri; 3) menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang mandiri dan/ atau mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang.

Dengan demikian, keberadaan SMK dimaksudkan untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai program keahlian masing-masing. SMK dikatakan berhasil manakala para lulusan sekolah tersebut dapat diserap oleh dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) sesuai program keahliannya dan kompetensi keahlian yang tercermin dalam ‘sertifikasi’ masing-masing.

SMK dituntut untuk senantiasa berorientasi pada kebutuhan DU/DI sebagai penyedia lapangan kerja dengan memformulasikan silabus atau kurikulum yang berorientasi pada kompetensi dan tuntutan dunia kerja sesuai kebutuhan di daerah masing-masing pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap SMK harus senantiasa merevisi kurikulum yang senantiasa *update* dengan perkembangan iptek dan Kebutuhan DU/DI. Namun demikian, tidak berarti bahwa

SMK hanya sekadar untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai, namun lebih dari itu, SMK berperan sebagai lembaga pendidikan formal yang bertugas mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkarakter, mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi serta menjadi manusia yang produktif.

Penyelenggaraan pendidikan di SMK dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun dan/atau 4 (empat) tahun sesuai dengan kebutuhan tingkat penguasaan kompetensi pada bidang keahlian tertentu (jika diperlukan). Penyelenggaraan SMK dilaksanakan secara terintegrasi antara teori dan praktik di sekolah dan/atau di dunia usaha dan dunia kerja (DU/DI).

Terkait dengan karakteristik pendidikan kejuruan, Wardiman (dalam Sudira, 2006) dinyatakan bahwa penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan (SMK) memiliki 9 (sembilan) karakteristik, yaitu:

- Mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja;
- Berorientasi pada kebutuhan lapangan kerja (*demand driven*);
- Penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja;
- Kesuksesan peserta didik pada “*hands-on*” atau performa dunia kerja;
- Memiliki hubungan erat dengan dunia kerja sebagai kunci sukses pendidikan kejuruan;
- Responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi;
- *Learning by doing* dan *hands on experience*;
- Membutuhkan fasilitas mutakhir untuk praktik; dan
- Memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar.

Berdasarkan karakteristik tersebut, diharapkan para lulusan SMK berkarakter sebagai calon tenaga kerja tingkat menengah yang berkepribadian secara utuh sebagai warga negara dan sebagai warga pekerja yang berbekal keterampilan/kompetensi untuk bekerja di bidang tertentu sesuai dengan tuntutan

DU/DI. Oleh karena itu, agar para lulusan SMK memiliki wawasan kerja secara nyata maka penyelenggaraan pendidikan di SMK dilaksanakan dengan sistem ganda (*dual system*) melalui praktik kerja (prakerin) sebagai realisasi program pendidikan sistem ganda di sekolah dan di DU/DI.

Pelaksanaan pendidikan SMK akan mencapai sasaran manakala dapat menerapkan prinsip-prinsip bahwa pendidikan kejuruan efisien jika ditunjang lingkungan yang kondusif, di mana peserta didik dilatih/ dipersiapkan dan dikenalkan sebagaimana suasana bekerja di DU/DI. Pendidikan SMK akan efektif manakala tugas-tugas pendidikan (di sekolah) dan tugas latihan kerja (di DU/DI) dapat dilaksanakan secara terpadu, terkait dan sepadan serta ditunjang oleh fasilitas peralatan yang kurang lebih sama (media simulasi) seperti yang diperlakukan di DU/DI.

Pendidikan SMK akan efektif jika melatih kebiasaan peserta didik berpikir dan bekerja seperti di DU/DI, setiap individu mengembangkan minat, meningkatkan pengetahuan, dan kompetensinya secara optimal untuk bekal kerja. Pendidikan SMK juga akan efektif jika pendidikan dan pelatihan mampu membentuk kebiasaan bekerja dengan tekun, teliti, cermat, cerdas dan *smart* serta tanggungjawab melalui pembiasaan berfikir sistemik.

## **2. Peran, Fungsi, Dan Manfaat SMK**

SMK sebagai subsistem dalam Sistem Pendidikan Nasional memiliki peran yang esensial dalam mencerdaskan bangsa. Hal ini diperkuat sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 bahwa pada hakikatnya keberadaan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai salah satu contoh bahwa peran pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa mengutip pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat George Bush bahwa “*As a nation, we now invest more in education than in defense*” (dalam Suyanto, 2000). Hal ini mengindikasikan bahwa betapa pentingnya investasi pendidikan

dalam mengantarkan keberadaban suatu bangsa. Selanjutnya, Unesco (2009) menyatakan bahwa *“Education is critical for achieving environmental and ethical awareness, values and attitudes and behavior consistent with sustainable development and for effective public participation in decision-making. Both formal and non-formal education are indispensable to sustainable development”*. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan merupakan wahana untuk membangun lingkungan dan kesa daran etika, nilai, sikap dan perilaku yang konsisten untuk pemba ngunan berkelanjutan, dan merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan. Baik pendidikan formal maupun nonformal dapat berperan dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan kejuruan, Jandhyala (2002) dalam buku yang berjudul *Vocational Education And Training In Asia*, menyatakan bahwa *Modern technology requires fewer highly qualified middle and lower level skilled personnel. Vocational education can produce exactly this kind of manpower*. Teknologi yang modern membutuhkan tenaga kerja tingkat bawah dan menengah yang berkualitas dan terampil. Pendidikan kejuruan merupakan institusi pendidikan yang dapat memproduksi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Lebih lanjut, *Vocational and technical secondary education can establish a closer relationship between school and work*. Pendidikan kejuruan dan teknik dapat menghubungkan/menjembatani antara sekolah dan dunia kerja (DU/DI). Sebagai konsekuensi logis, maka bagi masyarakat yang akan bekerja harus mengikuti pembelajaran pada pendidikan kejuruan, dan dunia kerja yang membutuhkan tenaga kerja dapat saling *sharing* dengan pendidikan kejuruan (SMK). Demikian juga pernyataan *Vocational education is considered helpful in developing what can be termed as „skill-culture“ and attitude towards manual work*. Bahwa pendidikan kejuruan membantu pembentukan budaya terampil dan membentuk sikap kerja dalam pekerjaan yang sifatnya manual.

Peran dan fungsi SMK secara proporsional bahwa sebagai institusi pendidikan formal, SMK berperan sebagai institusi yang berperan dalam menghasilkan calon tenaga kerja tingkat menengah yang berkompeten dan siap latih untuk memasuki lapangan pekerjaan tertentu.

Dalam hal fungsi SMK sebagaimana pendapat Wardiman Djojonegoro (dalam Sudira, 2009) bahwa pendidikan kejuruan memiliki multi-fungsi yang jika dilaksanakan dengan profesional akan berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut meliputi (1) sosialisasi, yaitu, transmisi dan konkritisasi nilai-nilai ekonomi, solidaritas, religi, seni, dan jasa; (2) kontrol sosial yaitu, kontrol perilaku dengan norma-norma kerjasama, keteraturan, kebersihan, kedisiplinan, kejujuran, keterbukaan; (3) seleksi dan alokasi yaitu, mempersiapkan, memilih, dan menempatkan calon tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja; (4) asimilasi dan konservasi budaya yaitu, absorpsi antar budaya masyarakat serta pemeliharaan budaya lokal; dan (5) mempromosikan perubahan demi perbaikan.

Pendidikan kejuruan tidak sekedar mendidik dan melatih keterampilan yang ada, tetapi juga harus berfungsi sebagai pendorong perubahan. Pendidikan kejuruan berfungsi sebagai proses akulturasi atau penyesuaian diri dengan perubahan dan enkulturasikan atau pembawa perubahan bagi masyarakat. Karenanya pendidikan kejuruan tidak hanya adaptif tetapi juga harus antisipatif.

Selain didasarkan pada fungsinya, urgensi pendidikan kejuruan dapat dikaji dari manfaatnya. Menurut Sudira (2009), pendidikan kejuruan memiliki tiga manfaat utama yaitu: (1) bagi peserta didik sebagai peningkatan kualitas diri, peningkatan peluang mendapatkan pekerjaan, peningkatan peluang berwirausaha, peningkatan penghasilan, penyiapan bekal pendidikan lebih lanjut, penyiapan diri bermasyarakat, berbangsa, bernegara, penyesuaian diri terhadap perubahan dan lingkungan; (2) bagi dunia kerja dapat memperoleh tenaga kerja berkualitas tinggi, meringankan biaya usaha, membantu memajukan dan mengembangkan usaha; (3) bagi masyarakat dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan produktivitas nasional, meningkatkan penghasilan negara, dan mengurangi pengangguran. Pendidikan kejuruan telah terbukti mempunyai peran yang besar dalam pembangunan Industri, seperti di Jerman. Gatot Hari Priowiriyanto, (dalam Kompas, 20 April 2002) menyatakan “Jerman menjadi negara industri yang tangguh karena didukung tenaga terampil lulusan sekolah kejuruan. Sekitar 80 persen sekolah menengah di Jerman adalah sekolah kejuruan, 20 persen sisanya adalah sekolah umum”

### **3. Penjurusan (Spektrum Keahlian) pada SMK**

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan Keahlian di SMK dikelompokkan dalam 6 bidang studi keahlian, yaitu (1) Teknologi dan rekayasa, (2) Teknologi informasi dan komunikasi, (3) Kesehatan, (4) Seni, kerajinan dan pariwisata, (5) Agribisnis dan agroteknologi, dan (6) Bisnis dan manajemen. Namun dalam perkembangan terkini (September 2016), Direktorat Pembinaan SMK sudah menyiapkan draft akhir Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) yang mengelompokkan keahlian ke dalam 9 Bidang Keahlian, 48 Program Keahlian, dan 142 Paket Keahlian. Dari 142 Paket Keahlian tersebut, sebanyak 34 Paket Keahlian akan dikembangkan masa studinya selama 4 tahun, dan yang lainnya tetap 3 tahun (Tabel 1).

Secara terminologi, dalam spektrum keahlian pendidikan kejuruan menggunakan istilah bidang keahlian, program keahlian dan paket keahlian. Bidang keahlian adalah kelompok atau rumpun keahlian di SMK, program keahlian adalah jurusan dalam suatu bidang keahlian, dan paket keahlian adalah spesialisasi dalam suatu program keahlian. Secara lengkap rincian spektrum keahlian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Paket Keahlian	Tahun	
				3	4
1.	Teknologi dan Rekayasa	Teknologi Konstruksi dan Properti	1.1.1 Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan		✓
			1.1.2 Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan		✓
			1.1.3 Bisnis Konstruksi dan Properti	✓	
			1.1.4 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	✓	
		Teknik Geomatika dan Geospasial	1.2.1. Teknik Geomatika	✓	
			1.2.2. Informasi Geospasial		✓
		Teknik Ketenagalistrikan	1.3.1. Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	✓	
			1.3.2. Teknik Jaringan Tenaga Listrik	✓	
			1.3.3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik	✓	
			1.3.4. Teknik Otomasi Industri		✓
			1.3.5. Teknik Pendingin dan Tata Udara	✓	
			1.3.6. Teknik Tenaga Listrik		✓
		Teknik Mesin	1.4.1. Teknik Permesinan	✓	
			1.4.2. Teknik Pengelasan	✓	
			1.4.3. Teknik Pengecoran Logam	✓	
			1.4.4. Teknik Mekanik Industri	✓	
			1.4.5. Teknik Perancangan dan Gambar Mesin	✓	
			1.4.6. Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur		✓
		Teknologi Pesawat Udara	1.5.1. <i>Airframe Power Plant</i>	✓	
			1.5.2. <i>Aircraft Machining</i>	✓	
			1.5.3. <i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>	✓	

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Paket Keahlian	Tahun	
				3	4
			1.5.4. Airframe Mechanic	√	
			1.5.5. Aircraft Electricity	√	
			1.5.6. Aviation Electronics	√	
			1.5.7. Electrical Avionics	√	
	Teknik Grafika		1.6.1. Desain Grafika	√	
			1.6.2. Produksi Grafika	√	
	Teknik Instrumentasi Industri		1.7.1. Teknik Instrumentasi Logam	√	
			1.7.2. Instrumentasi dan Otomatisasi Proses		√
	Teknik Industri		1.8.1. Teknik Pengendalian Produksi	√	
			1.8.2. Teknik Tata Kelola Pergudangan	√	
	Teknologi Tekstil		1.9.1. Teknik Pemintalan Serat Buatan	√	
			1.9.2. Teknik Pembuatan Benang		√
			1.9.3. Teknik Pembuatan Kain		√
			1.9.4. Teknik Penyempurnaan Tekstil		√
	Teknik Kimia		1.10.1. Analisis Pengujian Laboratorium	√	
			1.10.2. Kimia Industri	√	
			1.10.3. Kimia Analisis		√
			1.10.4. Kimia Tekstil	√	
	Teknik Otomotif		1.11.1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	√	
			1.11.2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	√	
			1.11.3. Teknik Alat Berat	√	
			1.11.4. Teknik Bodi Otomotif	√	

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Paket Keahlian	Tahun	
				3	4
			1.11.5. Teknik Ototronik	√	
			1.11.6. Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif		√
			1.11.7. Otomotif Daya dan Konversi		√
			Teknik Perkapalan	1.12.1. Konstruksi Kapal Baja	√
				1.12.2. Konstruksi Kapal kayu dan Fiberglass	√
				1.12.3. Teknik Instalasi Permesinan Kapal	√
				1.12.4. Teknik Pengelasan Kapal	√
			1.12.5. Teknik Kelistrikan Kapal	√	
			1.12.6. Disain dan Rancang Bangun Kapal	√	
			1.12.7. Interior Kapal	√	
			Teknik Elektronika	1.13.1. Teknik Audio Video	√
				1.13.2. Teknik Elektronika Industri	√
			1.13.3. Teknik Mekatronika		√
			1.13.4. Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi		√
			1.13.5. Instrumentasi Medik		√
			Teknik Perminyakan	2.1.1 Teknik Produksi Minyak dan Gas	√
				2.1.2 Teknik Pemboran Minyak dan Gas	√
			2.1.3 Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia	√	
			Geologi Pertambangan	2.2.1 Goelogi Pertambangan	√
			Teknik Energi Terbarukan	2.3.1 Teknik Energi Hidro, Surya dan Angin (ESHA)	√
				2.3.2 Teknik Energi Biomassa	√
			3.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	√	
			3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan	√	
			3.1.3 Multimedia	√	

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Paket Keahlian	Tahun	
				3	4
4.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Telekomunikasi	3.1.4 Sistem Informasi, Jaringan dan Aplikasi		✓
			3.2.1 Teknik Transmisi Telekomunikasi	✓	
			3.2.2 Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	✓	
5.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	Keperawatan	4.1.1. Asisten Keperawatan	✓	
		Kesehatan Gigi	4.2.1 Dental Asisten	✓	
		Teknologi Laboratorium Medik	4.3.1 Teknologi Laboratorium Medik	✓	
		Farmasi	4.4.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	✓	
			4.4.2 Farmasi Industri	✓	
		Pekerjaan Sosial	4.5.1. <i>Social Care</i> (Keperawatan Sosial)	✓	
			4.5.2. <i>Caregiver</i>		✓
5.	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman	5.1.1. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	✓	
			5.1.2. Agribisnis Tanaman Perkebunan	✓	
			5.1.3. Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman		✓
			5.1.4. Lanskap dan Pertamanan	✓	
			5.1.5. Produksi dan Pengelolaan Perkebunan		✓
			5.1.6. Agribisnis Organik Ekologi		✓
		Agribisnis Ternak	5.2.1. Agribisnis Ternak Ruminansia	✓	
			5.2.2. Agribisnis Ternak Unggas	✓	
			5.2.3. Industri Peternakan		✓
		Kesehatan Hewan	5.3.1. Keperawatan Hewan	✓	
			5.3.2. Kesehatan dan Reproduksi Hewan		✓
			5.4.1. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	✓	

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Paket Keahlian	Tahun	
				3	4
6.	Kemaritiman	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	5.4.2. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	√	
			5.4.3. Agroindustri		√
		Teknik Pertanian	5.5.1. Alat Mesin Pertanian	√	
			5.5.2. Otomatisasi Pertanian		√
		Kehutanan	5.6.1. Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	√	
			5.6.2. Konservasi Sumberdaya Hutan	√	
			5.6.3. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	√	
			5.6.4. Teknologi Produksi Hasil Hutan	√	
			6.1.1. Nautika Kapal Penangkap Ikan	√	
		Pelayaran Kapal Niaga	6.1.2. Teknika Kapal Penangkap Ikan	√	
			6.2.1 Nautika Kapal Niaga	√	
			6.2.2 Teknika Kapal Niaga	√	
		Perikanan	6.3.1. Agribisnis Perikanan Air Tawar	√	
			6.3.2. Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	√	
			6.3.3. Agribisnis Ikan Hias	√	
			6.3.4. Agribisnis Rumput Laut	√	
			6.3.5. Industri Perikanan Laut		√
		Pengolahan Hasil Perikanan	6.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	√	
7.	Bisnis dan Manajemen	Bisnis dan Pemasaran	7.1.1. Bisnis Daring dan Pemasaran	√	
		Manajemen Perkantoran	7.2.1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	√	
			7.3.1. Akuntansi dan Keuangan Lembaga	√	

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Paket Keahlian	Tahun	
				3	4
		Akuntansi dan Keuangan	7.3.2. Perbankan dan Keuangan Mikro 7.3.3. Perbankan Syariah	√ √	
8.	Pariwisata	Perhotelan dan Jasa Pariwisata	8.1.1. Usaha Perjalanan Wisata 8.1.2. Perhotelan 8.1.3. Wisata Bahari dan Ekowisata	√ √ √	
			8.2.1. Jasa Boga	√	
		Tata Kecantikan	8.3.1. Tata Kecantikan Rambut dan Kulit 8.3.2. <i>Spa dan Beauty Theraphy</i>	√ √	
			8.4.1. Tata Busana 8.4.2. Desain Feysen	√ √	
		Seni Rupa	9.1.1. Seni Lukis 9.1.2. Seni Patung 9.1.3. Desain Komunikasi Visual 9.1.4. Desain Interior dan Teknik Furnitur 9.1.5. Animasi	√ √ √ √ √	
			9.2.1. Kriya Kreatif Batik dan Tekstil 9.2.2. Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi 9.2.3. Kriya Kreatif Keramik 9.2.4. Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan 9.2.5. Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	√ √ √ √ √	
			9.3.1. Seni Musik Klasik 9.3.2. Seni Musik Populer	√ √	

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Paket Keahlian	Tahun	
				3	4
		Seni Tari	9.4.1. Seni Tari	√	
			9.4.2. Penataan Tari		√
		Seni Karawitan	9.5.1. Seni Karawitan	√	
			9.5.2. Penataan Karawitan		√
		Seni Pedalangan	9.6.1. Seni Pedalangan	√	
		Seni Teater	9.7.1. Pemeran	√	
			9.7.2. Tata Artistik Teater	√	
		Seni Broadcasting dan Film	9.8.1. Produksi dan Siaran Program Radio	√	
			9.8.2. Produksi dan Siaran Program Televisi	√	
			9.8.3. Produksi Film dan Program Televisi		√

Sumber: Dit. PSMK (November, 2016)

#### 4. Tantangan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan

Tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan, khususnya SMK menghadapi pesatnya perkembangan dunia usaha dan perindustrian saat ini antara lain:

- Pengangguran lulusan pendidikan menengah kejuruan masing-masing lebih tinggi dibanding dengan pendidikan menengah umum dan pendidikan tinggi umum. Hal ini terjadi baik di perdesaan maupun di perkotaan dan baik perempuan maupun laki-laki. Pengangguran lulusan SMK jauh lebih tinggi dibanding SMA (SMK 12,65 persen, SMA 10,32 persen) (Statistik Ketenagakerjaan BPS, Agustus 2015)
- Satu-satunya perlindungan kesempatan kerja bagi lulusan SMK adalah kepemilikan sertifikasi profesi untuk masing-masing butir keterampilan yang berlaku secara internasional. Pemberian sertifikat profesi diberikan

oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Biasanya untuk memiliki sertifikasi profesi untuk masing-masing butir keterampilan dari LSP sangat mahal, mencapai Rp 600.000 per jenis keterampilan (bukan per jurusan). Untuk mengatasi tingginya biaya itu beberapa SMK telah ditunjuk sebagai LSI, namun kemampuan LSI-SMK ini masih terbatas.

- c. Masih lemahnya implementasi kurikulum, Penjurusan pada Spektrum SMK menjadi 128 bidang keahlian. Pembagian spektrum keahlian tersebut mempunyai 2 kelemahan yang akan menghasilkan lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kelemahan pertama, pembagian bidang-bidang keahlian menjadi 128 buah ini dianggap terlalu rinci. Kelemahan ke dua, penjurusan menjadi 128 buah tersebut berlaku sama untuk seluruh Indonesia. Kelemahan tersebut terungkap dari dua kegiatan yang ditemukan pada jarak waktu 16 tahun. (i) Studi klasik Puslit (Studi Penjurusan, 1995 s.d. 1998) mengindikasikan penyeragaman jurusan SMK di seluruh Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja lokal. Kebutuhan dunia kerja Indonesia beragam, berbeda antara dunia kerja di kabupaten dan dunia kerja di kota besar. Dunia kerja di kota besar cenderung memerlukan tenaga kerja terlatih yang memiliki jenis keterampilan yang sempit (lebih spesifik) namun mendalam. Dunia kerja di kabupaten cenderung memerlukan tenaga kerja terlatih yang memiliki jenis keterampilan yang lebih luas. (ii) Secara empirik beberapa daerah saat ini mengeluhkan bahwa penjurusan SMK terlalu rinci (kecil-kecil), padahal dunia kerja di kabupaten memerlukan lulusan SMK dengan sejumlah keterampilan yang diperoleh dari satu bidang keahlian. (Hasil diskusi dengan guru-guru senior SMK di beberapa kabupaten/kota, 2015)
- d. Keterbatasan sarana praktik di sekolah (khususnya Bidang Teknologi dan Rekayasa sebagian besar peralatan mesin sudah using)
- e. Keterbatasan biaya operasional, SMK memerlukan biaya besar, terutama untuk praktik. Biaya yang ada cenderung mengandalkan pada dana

pemerintah pusat (BOS-SMK) dan iuran orang tua. Kontribusi pemda kabupaten/kota rendah, apalagi kontribusi pemda provinsi (Studi Efektifitas BOS Dikmen Puslitjakdikbud 2014 dan 2015 dan Kajian Isu Aktual Puslitjakdikbud 2015).

- f. Kekurangan guru mata pelajaran produktif. Guru mata pelajaran produktif adalah guru mata pelajaran yang sekaligus mampu membimbing siswa melaksanakan praktik di sekolah. Saat ini guru mata pelajaran produktif yang ada jumlahnya tidak memadai dan guru-guru tersebut akan segera memasuki masa pensiun. Adapun Pengangkatan guru SMK baru kuotanya sangat kurang dibanding dengan kebutuhan aktual di sekolah. Beberapa guru mata pelajaran produktif senior dan manajemen sekolah menilai bahwa pola terbaik adalah merekrut lulusan politeknik yang kemudian dimagangkan untuk mengajar dalam bimbingan guru mapel produktif senior. Pola ini menghasilkan guru mata pelajaran produktif yang lebih berkompeten dibanding dengan merekrut lulusan LPTK yang dimagangkan untuk mengajar dalam bimbingan guru mata pelajaran produktif senior.

## **B. Prakerin (Praktik Kerja Industri)**

### **1. Pengertian**

Praktik kerja industri (prakerin) mempunyai penyebutan atau istilah yang berbeda pada kurikulum sesuai dengan zamannya, walaupun esensinya tetap sama. Pada kurikulum 2013 kegiatan magang di industri disebut praktik kerja industri atau Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pada kurikulum 2006 dikenal dengan Pendidikan Sistem Ganda (PSG).

Praktik kerja industri sejatinya merupakan program pembelajaran dengan melibatkan siswa yang dilaksanakan secara khusus dengan mengambil waktu tertentu dan bekerjasama dengan pihak industri/pemerintah diluar sistem sekolah dalam rangka, meningkatkan kompetensi siswa. Tempat pelaksanaan prakerin bisa jadi Dunia Industri atau Dunia Usaha dalam bentuk Perusahaan Swasta atau

Instansi Pemerintah. PKL pada kurikulum 2013 disusun bersama antara sekolah dan masyarakat (Institusi Pasangan/Industri) dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik yang handal, sekaligus merupakan wahana berkontribusi bagi dunia kerja (DU/DI) terhadap upaya pengembangan pendidikan di SMK.

Praktik kerja industri juga merupakan kegiatan kurikuler yang harus dilakukan oleh siswa SMK sebagai bentuk pendidikan dan pelatihan untuk menerapkan teori yang diperoleh dalam pembelajaran di sekolah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan agar memperoleh pengalaman dan keterampilan lapangan dalam industri dengan tujuan pendidikan. Adanya praktik kerja industri merupakan hal yang ideal, karena siswa akan lebih mengenal masalah praktis berkenaan dengan bidang keahliannya. Karenanya industri/jasa tempat praktik dipilih sesuai dengan bidang keahliannya.

Pemberlakuan prakerin pada SMK merupakan upaya Departemen Pendidikan Nasional dalam meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia industri. Prakerin ini diberlakukan mulai tahun 2006/2007, sebagai penerapan kebijakan Depdiknas mengenai program *link and match* (Devy Ika Puspitasari). Sebelum adanya sistem prakerin diberlakukan di SMK, sebenarnya sudah ada Praktik Kerja Nyata (PKN) yang kemudian diubah dengan istilah Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang kemudian diubah lagi dengan istilah Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang kemudian diubah lagi dengan istilah Praktik Industri (PI), dengan demikian, maka sistem Praktik kerja Industri (PRAKERIN) diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal, karena lebih mempunyai konsep yang jelas seperti tersebut diatas.

Maksud dari pelaksanaan prakerin sesuai dengan konsep prakerin SMK di Indonesia, yaitu suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan dari sekolah dengan program penguasaan keahlian yang langsung diperoleh dari bekerja di dunia industri, dimaksudkan untuk mencapai tingkat keahlian profesional.

Manfaat lainnya yaitu untuk membekali siswa dengan pengalaman kerja yang nyata sesuai dengan sesuai dengan program keahlian yang dipilihnya. Dalam pelaksanaan pendidikan yang berlaku di Indonesia harus mempertimbangkan nilai kemanfaatan bagi lingkungan pendidikan khususnya bagi peserta didik. Untuk menunjang tujuan dari pendidikan itu sendiri maka harus ada landasan hukum yang menjadi acuan atau patokan dalam pelaksanaan pendidikan.

## **2. Tujuan Prakerin**

Tujuan prakerin untuk menambah pengetahuan baru tentang seluk beluk kegiatan industri sebagai wahana untuk meningkatkan keterampilan siswa berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya di sekolah serta membentuk kesiapan mental dalam menghadapi pasar kerja. Tujuan prakerin juga untuk: memperkokoh *link and match* antara sekolah dengan dunia industri/ dunia usaha; menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional (dengan tingkat pengetahuan, ketrampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan); meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas; memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai sebagian dari proses pendidikan (Puspitasari, 2010).

## **3. Landasan Hukum Prakerin**

Prakerin SMK yang dilaksanakan di berbagai industri dan instansi pemerintah telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan kompetensi siswa. Dasar pelaksanaan prakerin ditetapkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 323/U/1997 tentang penyelenggaraan Prakerin SMK, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993 tentang kurikulum SMK.

#### **4. Model Pelaksanaan Prakerin**

Pelaksanaan prakerin di SMK merupakan perwujudan dari kebijakan “*link and match*”, yaitu proses pembelajaran yang dilaksanakan di dua tempat, yakni di sekolah dan di dunia usaha/industri. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu tamatan SMK untuk mencapai tujuan relevansi pendidikan sebagai tuntutan kebutuhan tenaga kerja.

Harapan utama dari kegiatan penyelenggaraan prakerin ini disamping keahlian profesional siswa meningkat sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha/industri, juga siswa akan memiliki etos kerja hasil pekerjaan yang berkualitas, disiplin waktu dan kerajinan dalam bekerja serta memiliki wawasan di dunia industri yang luas.

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain sebagai berikut memberikan pengalaman kerja langsung (*real*) kepada peserta didik dalam rangka menanamkan (*internalize*) iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Memberikan bekal etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi tuntutan pasar kerja global.

Model pelaksanaan prakerin umumnya bervariasi sesuai dengan aturan sekolah masing-masing. Sebelum pelaksanaan prakerin sekolah menyusun panduan prakerin yang diberikan kepada para siswa sebagai pedoman pelaksanaan prakerin. Penyusunan pedoman pelaksanaan prakerin ini mengacu pada Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa PKL dapat dilaksanakan ; (i) menggunakan **sistem blok** , selama *setengah semester* (*sekitar 3 bulan*); (ii) menggunakan sistem **semi blok** dengan cara masuk *3 hari dalam seminggu, setiap hari 8 jam selama 1 semester*. Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran kelompok A dan B dapat dilakukan di satuan pendidikan dan/atau industri (terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan Portofolio sebagai instrumen utama penilaian.

PKL dengan sistem semi blok, peserta didik melaksanakan PKL selama 3 hari perminggu di Institusi Pasangan/Industri dan melaksanakan pembelajaran di sekolah selama 3 hari. Untuk memenuhi pemerataan jumlah jam di Institusi Pasangan/Industri yang memiliki jam kerja kurang dari 6 hari per minggu maka sekolah perlu mengatur sirkulasi/perputaran kelompok peserta PKL. Jika pembelajaran mata pelajaran kelompok A dan B tidak terintegrasi dalam kegiatan PKL maka pembelajaran mata pelajaran kelompok A dan B tersebut dilakukan di satuan pendidikan (setelah peserta didik kembali dari kegiatan PKL di Institusi pasangan/industri) dengan jumlah jam setara dengan jumlah jam satu semester.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014, waktu pelaksanaan pembelajaran di Institusi Pasangan/Industri dapat dilakukan pada kelas XI atau kelas XII. Untuk menjamin keterlaksanaan program PKL maka dapat dilakukan alternatif pengaturan sebagai berikut:

- a. Jika program PKL akan dilaksanakan pada semester 4 kelas XI, sekolah harus menata ulang topik-topik pembelajaran pada semester 4 dan semester 5, agar pelaksanaan PKL tidak mengurangi waktu untuk pembelajaran materi pada semester 4 sehingga sebagian materi pada semester 4 tersebut dapat ditarik ke semester 5.
- b. Demikian juga sebagaimana pada butir a di atas, jika program PKL akan dilaksanakan pada semester 5 kelas XII, sekolah harus melakukan pengaturan yang sama untuk materi pembelajaran pada kedua semester tersebut.

Kebijakan UN yang tidak lagi menjadi salah satu faktor penentu kelulusan, maka program PKL dapat dilaksanakan sebelum UN pada semester 7 secara blok penuh selama 3 bulan (12 minggu) bagi SMK Program 4 Tahun.

## C. Sertifikasi

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Pendidikan Nasional 2003 tentang Sistem Nasional

Pendidikan Pasal 61 ayat (3) dinyatakan bahwa ‘sertifikasi kompetensi’ diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2016, beberapa SMK telah dipersiapkan untuk mendapatkan sertifikasi taraf ASEAN seperti di wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2005 telah mensosialisasikan rencana sertifikasi siswa SMK sesuai dengan bidang keahliannya. Bahkan untuk bidang keahlian “seni” direncanakan peserta didik SMA pun kemungkinan akan dilakukan sertifikasi. Sebagai contoh, kesiapan tenaga kerja (SDM) di Jawa Timur dalam cetak biru AEC telah disepakati jaminan kebebasan mobilitas bagi tenaga kerja terampil di kawasan ASEAN melalui serangkaian tahapan yang disepakati dalam *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* 1995. Tahapan-tahapan tersebut dibicarakan dalam dua tahun sekali sebagai forum koordinasi dan persiapan dalam liberalisasi jasa di kawasan ASEAN. Terdapat 4 (empat) sektor prioritas liberalisasi jasa, yakni jasa perhubungan udara, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata, ditargetkan untuk 2010 dan jasa logistik pada 2013. Liberalisasi bidang jasa seluruhnya ditargetkan selesai pada 2015.

Komitmen Indonesia dalam penjadwalan liberalisasi jasa tercantum dalam *Schedule of Specific Commitment* pada pertemuan AFAS paket ke-6 2007 meliputi jasa bisnis (jasa profesi seperti insinyur, akuntan, jasa legal, arsitektur, konsultan manajemen, dan jasa penyewaan), jasa komunikasi, jasa konstruksi, jasa pendidikan, jasa lingkungan, jasa distribusi, jasa kesehatan, jasa pariwisata dan perhotelan, jasa teknologi dan informasi, jasa energi, dan jasa periklanan.

Untuk memfasilitasi liberalisasi jasa dan mempermudah mobilisasi tenaga kerja profesional lintas negara dalam kawasan ASEAN, dipandang perlu ada

kesepakatan pengakuan tenaga profesional di bidang jasa yang diwujudkan dalam nota saling pengakuan (mutual recognition arrangements/MRAs). Sampai saat ini, nota saling pengakuan sudah dilakukan untuk jasa arsitektur, jasa akutansi, kualifikasi survei, praktisi medis pada 2008, dan praktisi gigi pada 2009.

Namun demikian, rendahnya tingkat pendidikan pada 72% tenaga kerja Indonesia mengakibatkan sulitnya bagi kelompok masyarakat itu untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan tingkat keterjaminan yang relatif lebih baik. Hanya sebagian kecil (8%) dari komposisi tenaga kerja Indonesia yang berdaya saing, 3% di antaranya merupakan profesional dengan tingkat pendidikan minimal sarjana, sedangkan 5% di antaranya merupakan *semi-skilled worker* dengan pendidikan diploma dan kejuruan. Potret itu tentunya menjadi kegelisahan yang cukup mengganggu dalam menyongsong pasar tunggal ASEAN ketika arus liberalisasi jasa termasuk jasa profesi baik *skillful labor* maupun *semi-skilled labor* akan semakin deras mendekati 2015.

Tugas pemerintah dan para pemangku kepentingan yang terkait yaitu mempersiapkan SDM unggul dan berdaya saing dengan memastikan pembangunan ekonomi linear dengan pembangunan manusia. Kualitas tenaga kerja yang tinggi akan hadir apabila kualitas pembangunan manusia Indonesia berdaya saing unggul. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, gizi, dan fasilitas publik lainnya akan menentukan kualitas manusia dan tenaga kerja Indonesia.

#### **D. KKNI ( Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)**

Menurut Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, KKNI adalah kerangka penjenjangkan kualifikasi kompetensi SDM Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dengan bidang pelatihan kerja dan pengalaman kerja

dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan **capaian pembelajaran** (*learning outcomes*) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang Bermutu dan produktif. Dengan demikian peran dari KKNI ini, khususnya terkait dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh SMK adalah untuk menentukan posisi jabatan lulusan SMK baik yang sudah memiliki pengalaman kerja maupun belum.

KKNI menyatakan sembilan jenjang kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang produktif, dimulai dari jenjang 1 sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 sebagai jenjang tertinggi. Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI secara komprehensif mempertimbangkan sebuah capaian pembelajaran yang utuh, yang dapat dihasilkan oleh suatu proses pendidikan baik formal, non formal, informal, maupun pengalaman mandiri untuk dapat melakukan kerja secara berkualitas. Deskripsi setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, serta perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat, seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan aspek lain yang terkait. Capaian pembelajaran juga mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam **Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945**, dan **Bhinneka Tunggal Ika** yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia (Kemristekdikti, 2016). Kesembilan jenjang tersebut meliputi:

1. Jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
2. Jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;

3. Jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.

SKKNI menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 5 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah tatanan keterkaitan komponen standardisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan standardisasi kompetensi kerja nasional di Indonesia. SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SKKNI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja, Standar Khusus, Standar Internasional, Regional Model Competency Standard (RMCS). Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. Standard Khusus, Standard Internasional dan RMCS adalah merupakan standard kompetensi yang berbeda lingkup penggunaannya maupun tujuannya. Standard khusus untuk lingkup organisasi atau yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi. Standard Internasional untuk lingkup internasional serta dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional. RMCS lingkupnya adalah Asia Pasifik dan dikembangkan menggunakan pendekatan proses kerja untuk menghasilkan barang dan jasa di industri. Dengan demikian standard yang digunakan dalam kerangka MEA adalah RMCS mengingat ASEAN merupakan bagian dari Asia Pasifik.

## **E. Tantangan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)**

Latar belakang terbentuknya MEA adalah terjadinya globalisasi semakin meningkatkan persaingan di pasar dalam negeri dan dunia, mendorong regionalisasi dan integrasi ekonomi. Salah satu bentuk regionalisasi dan integrasi

adalah terbentuknya Masyarakat ASEAN yang memiliki tiga pilar utama, yaitu: Masyarakat Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (***Indonesia Dan Masyarakat Ekonomi Asean 2015: Peluang dan Tantangan, Prof. Dr. Ferdinand D. Saragih, MA***). MEA atau pasar bebas atau pasar tunggal Asia Tenggara mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2016. Dengan pemberlakuan MEA berarti para pekerja dan berbagai produk dari negara-negara Asia Tenggara dapat bebas keluar masuk Indonesia, dan sebaliknya. Akibat selanjutnya adalah terjadinya persaingan yang menuntut peningkatan kualitas produk dalam negeri dan kualitas sumber daya manusia. Salah satu hal yang masih selalu dipertanyakan adalah apakah Indonesia siap berkompetisi dalam menerima serbuan barang dan jasa atau mampu meningkatkan daya saingnya?

Tujuan mewujudkan MEA antara lain adalah :

1. meningkatkan daya saing dan daya tarik menghadapi Tiongkok dan India;
2. meningkatkan kesatuan dan posisi tawar ASEAN dalam rangka perundingan ASEAN + 1 (Tiongkok atau India atau Jepang atau Korea atau Australia/Selandia Baru) dan arsitektur regional baru: seperti: ASEAN+3 (ASEAN + Cina + India + Korea), dan lain-lain: ASEAN+6/ASEAN+8?);
3. merespon meningkatnya *trend regionalism vs multilateralism* (Saragih, 2015).

Pemberlakuan MEA sudah direncanakan sejak 10 tahun yang lalu. Namun para pemimpin negara-negara ASEAN akhirnya memutuskan awal tahun 2016 sebagai masa pemberlakukannya. Salah satu keuntungan yang diharapkan dari bergabungnya negara-negara ASEAN ke dalam MEA adalah meningkatnya kesejahteraan 600 juta penduduk Asia Tenggara karena penambahan jumlah lapangan kerja. ILO (*International Labour Organization*) merinci bahwa pada 2015, permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41 persen atau sekitar 14 juta orang. Permintaan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22 persen atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24 persen atau 12 juta (Apa yang

harus Anda ketahui tentang Masyarakat Ekonomi Asean - BBC Indonesia.html, 27 Agustus 2014).

Salah satu hambatan yang dihadapi Indonesia dengan pemberlakuan MEA ialah sangat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Data memperlihatkan bahwa sampai dengan Februari 2014, jumlah pekerja berpendidikan lebih rendah dari dan SMP/setara sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia. Hambatan lainnya adalah rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang dimiliki yang akan mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Dengan demikian upaya yang harus dilakukan Pemerintah dan pemerintah daerah di Indonesia adalah meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan serta menerapkan strategi jitu di sektor industri dan infrastruktur.

Upaya untuk mewujudkan MEA tidak dipungkiri menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut ialah (i) Kesiapan Teknologi, (ii) Pendidikan Tinggi dan Pelatihan, (iii) Institusi, (iv) Efisiensi Pasar Tenaga Kerja, (v) Perkembangan Pasar Keuangan, (vi) Efisiensi Pasar Barang, (vii) Infrastruktur, (viii) Business Sophistication, dan (ix) Inovasi. Di antara Sembilan tantangan tersebut yang terkait dengan pendidikan SMK adalah:

- Kesiapan teknologi,
- Pendidikan tinggi dan pelatihan,
- Institusi,
- Efisiensi pasar tenaga kerja,
- Infrastruktur, dan
- Inovasi.

Terkait dengan tantangan-tantangan tersebut, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan MEA ialah:

- Peningkatan Daya Saing SDM

- Peningkatan Laju Ekspor
- Peningkatan Efisiensi Pasar Barang & Tenaga Kerja
- Reformasi Regulasi
- Perbaikan Infrastruktur
- Reformasi Kelembagaan dan Pemerintah
- Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Ketrampilan
- Penciptaan *Entrepreneurship Society* (termasuk UMKM)
- Menghilangkan Potensi *Rent - Seeking*
- Membangun Institusi Keuangan Modern

Di antara ke-sepuluh langkah strategis tersebut, langkah-langkah yang terkait langsung dengan SMK meliputi i) Peningkatan Daya Saing SDM; ii) Peningkatan Efisiensi Pasar Tenaga Kerja; iii) Reformasi Regulasi; iv) Perbaikan Infrastruktur; v) Reformasi Kelembagaan dan Pemerintah; vi) Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Ketrampilan; dan vii) Penciptaan *Entrepreneurship Society* (termasuk UMKM).

## **F. Tinjauan Historis dan Yuridis Penyelenggaraan SMK 4 Tahun**

Dalam sejarah perjalanan pendidikan Indonesia, penyelenggaraan SMK 4 tahun sudah pernah dirintis sejak tahun 1970an. Pada era itu, di sektor pembangunan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan nasional dirintis pembangunan 8 instansi pendidikan menengah teknik dengan lama studi 4 tahun, yang diberi nama STM (Sekolah Teknologi Menengah) Pembangunan. 7 STM Pembangunan itu tersebar di pulau Jawa yaitu di Jakarta, Cimahi, Pekalongan, Semarang, Temanggung, Yogyakarta, dan Surabaya, sementara 1 lagi di Makassar Sulawesi Selatan. Kesemuanya secara resmi dinyatakan berdiri pada tahun 1975 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0310/O/1975 tertanggal 31 Desember 1975. Pada tahun 1994, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (waktu itu) mengeluarkan peraturan perubahan nama

sekolah kejuruan, di mana STM, SMEA (Sekolah Mengengah Ekonomi Atas), dan sekolah menengah kejuruan lainnya diubah menjadi menggunakan nama yang sama yaitu SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Adanya peraturan ini juga mengakibatkan perubahan nomenklatur dari kedelapan STM Pembangunan tersebut di atas, yang hingga kini menjadi sebagai berikut.

Tabel 2. Perubahan Nomenklatur STM Pembangunan

<b>Nama Sekolah Sebelumnya</b>	<b>Perubahan Nama Sekolah</b>
<b>STM Pembangunan Jakarta</b>	SMK Negeri 26 Jakarta
<b>STM Pembangunan Semarang</b>	SMK Negeri 7 Semarang
<b>STM Pembangunan Yogyakarta</b>	SMK Negeri 2 Depok-Sleman, Yogyakarta
<b>STM Pembangunan Surabaya</b>	SMK Negeri 5 Surabaya
<b>STM Pembangunan Ujung Pandang</b>	SMK Negeri 5 Makassar
<b>STM Pembangunan Pekalongan</b>	SMK Negeri 3 Pekalongan
<b>STM Pembangunan Temanggung</b>	SMK Negeri 1 Temanggung
<b>STM Pembangunan Bandung</b>	SMK Negeri 1 Kota Cimahi

Pada tahun ajaran 1995/1996 SMK (eks STM Negeri Pembangunan) menerapkan kurikulum baru dengan lama studi 3 tahun. Hal ini dikarenakan pada masa itu permintaan akan tenaga kerja dari pihak industri cukup besar, sehingga terlalu lama jika harus menunggu sampai 4 tahun. Dengan diubahnya lama studi menjadi 3 tahun, maka program studi yang biasanya ditempuh selama 4 tahun dipadatkan, para siswa menjalani pembelajaran dari pukul 07.00 s/d 15.00 (*long-day school*). Namun mulai tahun ajaran 2001/2002, SMK-SMK tersebut kembali lagi menyelenggarakan pendidikan dengan lama studi 4 tahun. Informasi yang didapatkan dari kalangan sekolah (SMK) waktu itu ialah perubahan kembali ke

sistim lama studi 4 tahun ini dikarenakan permintaan dari kalangan dunia industri, yang secara “empiris” merasakan perbedaan mutu lulusan SMK yang cukup signifikan antara lulusan dari hasil sistim lama studi 3 tahun dengan lama studi 4 tahun. Dengan kata lain berdasarkan pengalaman praktis pihak industri, lulusan SMK dengan lama studi 4 tahun memiliki berbagai keunggulan bila dibandingkan dengan lulusan dengan lama studi 3 tahun, setidaknya dari aspek kesiapan untuk bekerja.

Pada masa itulah muncul istilah SMK 3+1 untuk membedakannya dengan SMK lain pada umumnya yang tetap menyelenggarakan lama studi 3 tahun. Perkembangannya hingga saat ini, Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bagian Keempat Paragraf 2, Bentuk Satuan Pendidikan Pasal 78 ayat (3) disebutkan bahwa SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas) atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Dengan demikian, penyelenggaraan SMK dengan lama pendidikan 4 tahun tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

## **G. Berbagai Nilai Unggul SMK 4 tahun**

Program pengembangan SMK 4 tahun yang akan memperpanjang masa studi untuk beberapa paket keahlian di SMK dari masa belajar 3 tahun menjadi 4 tahun, tentu didasari berbagai pertimbangan (rasionalitas). Intinya adalah memenuhi desakan kebutuhan tenaga terampil tingkat menengah yang lebih profesional, yang diyakini dapat dihasilkan jika masa studi siswanya ditingkatkan menjadi 4 tahun. Untuk jenis-jenis keahlian yang sarat muatan atau sentuhan teknologi, penambahan 1 tahun masa studi diperhitungkan akan meningkatkan kemampuan siswa SMK dalam menguasai keterampilan-keterampilan (*skills*) yang dituntut.

Desakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil yang lebih profesional itu memang perlu segera dicarikan jalan keluarnya.

Banyak dari kalangan pemerhati, praktisi pendidikan menengah kejuruan (sekolah) dan DU/DI, menyatakan bahwa pengembangan SMK 4 tahun merupakan salah satu alternatif yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan SMK untuk memasuki DU/DI. Koordinator FP3MKI (Forum Peduli Pendidikan Pelatihan Menengah Kejuruan Indonesia) menyatakan pengembangan SMK 4 tahun sangat baik untuk proses penyesuaian lulusan SMK, baik ditinjau dari peraturan batasan usia minimal pekerja di Indonesia maupun dari aspek kematangan/kesiapan memasuki dunia kerja. Seperti diketahui batasan usia pekerja di Indonesia adalah di atas 18 tahun, padahal dalam kenyataannya banyak sekali lulusan SMK yang masih berusia di bawah 18 tahun. SMK 4 tahun yang dimasa awal rintisannya memfokuskan tahun ke 4 untuk magang di industri, pengembangannya saat ini bisa saja menjadi 1 semester untuk magang dan 1 semester lagi untuk pembentukan karakter dan bela negara (Kompas.com, 19 Oktober 2015).

Dari panjangnya lama studi tersebut, yang sangat terlihat sebagai keunggulan ialah durasi waktu magang di industri yang dapat mencapai satu tahun dan tidak hanya pada satu tempat. Dalam pengamatan kalangan praktisi di dunia industri, pengalaman praktik kerja yang cukup lama menjadikan lulusan SMK 4 tahun lebih siap memasuki dunia kerja. Dengan demikian, dunia industri akan lebih mempertimbangkan lulusan SMK 4 tahun karena lebih siap untuk segera bekerja. Pertimbangan tersebut juga sekaligus merupakan bentuk *Recognition* dari pihak industri terhadap sekolah. Namun demikian tidak dipungkiri pula bahwa nilai keunggulan SMK 4 tahun dibandingkan SMK lainnya (3 tahun) juga ditentukan oleh hal lainnya, yaitu ketercukupan dan kesesuaian PTK, penerapan disiplin pembelajaran yang ketat, serta kelengkapan sarana prasarana dan fasilitas belajar yang lebih baik. Oleh karena itu kalangan DU/DI juga sangat merekomendasikan agar dunia pendidikan (sekolah) senantiasa melakukan

penyesuaian dan penyelarasan (*updating*) tenaga pendidik dan sarana serta fasilitas belajar mereka dengan DU/DI, agar benar-benar dirasakan adanya *link and macth* antara dunia pendidikan dengan DU/DI.

Meskipun diakui lama studi 4 tahun memang lebih baik terutama dalam hal durasi prakerin, namun tentu tidak semua paket keahlian harus dijadikan 4 tahun lama studinya. Dalam hal ini meskipun kebutuhan DU/DI menjadi acuan utama, namun untuk menetapkan lama studi suatu paket keahlian harus pula mempertimbangkan jenis dan tingkat (level) kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk masing-masing paket keahlian mengacu kepada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

## **H. Lingkup Paket Keahlian yang Dikaji**

Paket-paket keahlian yang akan dikaji meliputi: i) Nautika Kapal Niaga; ii) Nautika Kapal Penangkap Ikan; iii) Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan; iv) Kesehatan Hewan, dan v) Tata Busana. Bidang Keahlian Perikanan dan Kelautan pada Spektrum Keahlian 2013 berganti nama menjadi Bidang Keahlian Kemaritiman pada Spektrum Keahlian 2016, dimana Paket Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Paket Keahlian Kapal Niaga termasuk ke dalam Bidang Keahlian ini. Selanjutnya Paket Keahlian Kesehatan Hewan dan Paket Keahlian Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan dalam Spektrum Keahlian 2013, masing-masing berubah menjadi Paket Keahlian Kesehatan dan Reproduksi Hewan dan Paket Keahlian Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dalam Spektrum 2016, namun baik dalam Spektrum Keahlian 2013 maupun Spektrum Keahlian 2016 kedua paket keahlian tersebut termasuk ke dalam Bidang Keahlian Agribisnis/Agroteknologi.

Hal yang perlu digaris bawahi terkait paket-paket keahlian yang dikaji adalah masih mengacu kepada spektrum keahlian 2013, karena hingga saat ini

spektrum keahlian 2016 belum resmi diberlakukan, sehingga belum ada sekolah (SMK) yang menggunakananya. Selengkapnya cakupan paket-paket keahlian yang dikaji tampak pada Tabel 3 berikut.

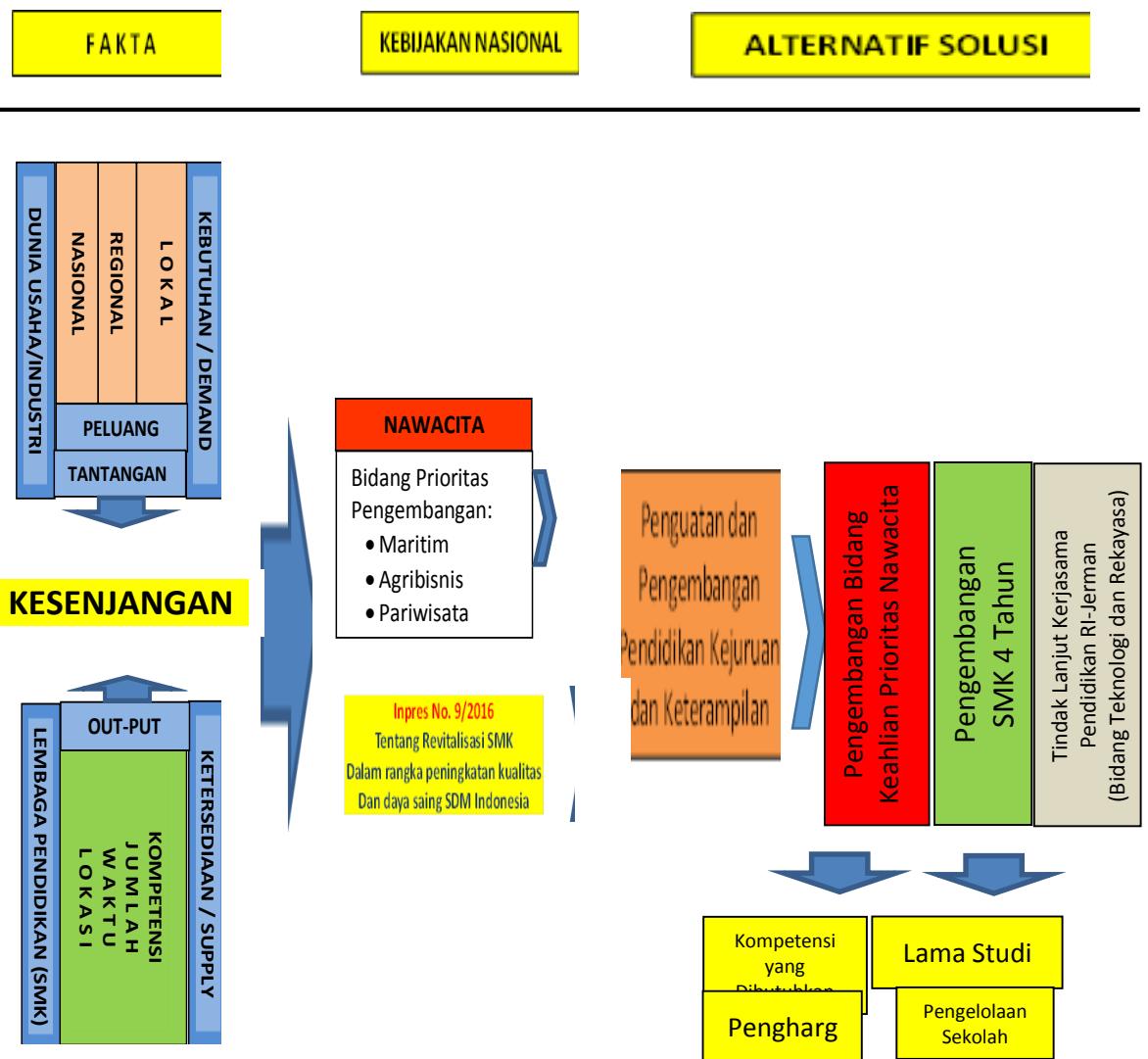
Tabel 3. Paket, Program, dan Bidang Keahlian yang dikaji

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian		Paket Keahlian	
		Spektrum 2013	Spektrum 2016	Spektrum 2013	Spektrum 2016
1.	Agribisnis/ Agroteknologi	Kesehatan Hewan	Kesehatan Hewan	Kesehatan Hewan	Kesehatan dan Reproduksi Hewan
		Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian
2.	Kemaritiman	Teknologi Penangkapan Ikan	Pelayaran Kapal Penangkap Ikan	Nautika Kapal Penangkap Ikan	Nautika Kapal Penangkap Ikan
		Pelayaran	Pelayaran Kapal Niaga	Nautika Kapal Niaga	Nautika Kapal Niaga
3.	Pariwisata	Tata Busana	Tata Busana	Tata Busana	Tata Busana

Sumber: Dit. PSMK, Spektrum 2013 dan Spektrum 2016

## I. Kerangka Pikir

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat digambarkan bagan kerangka berpikir dari fokus kajian ini ialah sebagai berikut:



Gambar 4. Bagan Kerangka Pikir Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (studi kasus), untuk mengungkap kompetensi-kompetensi apa saja (jenis dan tingkat kompetensinya) yang dibutuhkan DU/DI dalam upaya menyelaraskan dengan kompetensi-kompetensi yang diajarkan SMK. Selanjutnya juga mengungkap bagaimana upaya kerjasama dengan institusi/lembaga terkait dengan penyelenggaraan SMK, khususnya untuk paket-paket keahlian yang menjadi fokus penelitian ini., dan bentuk apresiasi/pengakuan (jika berimplikasi penambahan masa studi).

#### **B. Sampel**

Sampel penelitian ini ditentukan secara purposive (bidang keahlian prioritas pengembangan Nawacita), yaitu SMK-SMK penyelenggara paket keahlian (i) Nautika Kapal Niaga, (ii) Nautika Kapal Penangkap Ikan, (iii) Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan, (iv) Kesehatan Hewan, dan (v) Tata Busana.

#### **C. Lokasi dan Subyek Penelitian**

Dengan pertimbangan keberadaan paket-paket keahlian (mendekati atau mirip) di sekolah-sekolah yang menjadi subyek penelitian, maka ditentukan sampel kabupaten/kota lokasi penelitian berikut Sekolah yang menjadi subyek penelitian seperti tampak pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Daerah, Sekolah, Paket Keahlian Sampel dan Fokus Penelitian

Kab./Kota	Sekolah	Paket Keahlian Sampel	Paket Keahlian Fokus Penelitian
Kota Semarang	SMKN 10 Semarang	Nautika Kapal Niaga	Nautika Kapal Niaga
	SMK Pelayaran Semarang		
Kabupaten Jember	SMKN 5 Jember	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan
	SMK Perikanan dan Kelautan Puger	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	
Kabupaten Klaten	SMKN 1 Klaten	Kesehatan Ternak	Kesehatan Hewan
	SMKN 1 Tulung	Agribisnis Ternak Ruminansia	
Kabupaten Cirebon	SMKN 1 Mundu	Nautika Kapal Penangkap Ikan	Nautika Kapal Penangkap Ikan
	SMKN 1 Gebang		
Kota Denpasar	SMKN 3 Denpasar	Tata Busana	Tata Busana
	SMKN 4 Denpasar		

Adapun responden penelitian, dalam hal ini adalah peserta Diskusi Kelompok Terpumpun pada masing-masing daerah sampel penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Responden Penelitian

Instansi	Jabatan	Jumlah (orang)	
Dinas Pendidikan	Kabid Dikmen	1	
	Kasi Dikjur	1	
	Kepala Sekolah	2	
	Wakasek Bidang Hubin	2	
	Kepala Program	2	
SMK	Guru Produktif	2	
	DU/DI	Minimal Penyelia ( <i>supervisor</i> )	4
	Disnaker		1
	<b>J u m l a h</b>		<b>15</b>

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

1. Diskusi Kelompok Terpumpun (*focus group discussion*); dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi secara komprehensif dari peserta diskusi tentang jenis dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan oleh DU/DI, kompetensi yang diajarkan di SMK, kemungkinan penyelenggaraan SMK 4 tahun atau tetap 3 tahun, bentuk apresiasi terhadap lulusan SMK 4 tahun, dan keterlaksanaan kerjasama SMK dengan DU/DI dan institusi/lembaga terkait, pada kelima paket keahlian tersebut diatas, dan
2. Pengisian angket/kuesioner; dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi pendahuluan tentang jenis dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan oleh DU/DI, dan jenis dan tingkat kompetensi yang diajarkan di SMK

## **E. Analisis Data**

Analisis data (hasil diskusi kelompok terpumpun dan hasil pengisian angket) dilakukan secara deskriptif, untuk mendeskripsikan tentang kualifikasi kompetensi-kompetensi lulusan SMK yang dibutuhkan oleh DU/DI, masa studi, apresiasi DU/DI terhadap lulusan SMK berdasarkan tingkat kompetensi yang dicapai pada setiap paket keahlian, pelaksanaan proses pembelajaran, dan kerjasama SMK dengan DU/DI dan institusi/lembaga lain terkait.

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kompetensi dan Waktu Pembelajaran yang Dibutuhkan**

Mengacu pada penggunaan teknologi yang semakin berkembang pada setiap jenis dan tahapan operasional dalam DU/DI, pada dasarnya kalangan DU/DI menginginkan lulusan SMK yang akan mereka rekrut sebagai tenaga kerja benar-benar sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai serta sikap/mental yang baik sehingga sudah siap untuk bekerja. Namun pada kenyataannya, lulusan SMK belum sesuai dengan harapan DU/DI. Banyak pihak termasuk kalangan sekolah (SMK) dan DU/DI menyatakan bahwa penyebab utama persoalan tersebut yaitu tingginya kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan, dan dukungan sarana prasarana serta fasilitas belajar yang dimiliki sekolah untuk kegiatan belajar-mengajar, dan fasilitas/peralatan kerja serta pengetahuan dan teknologi yang dipersyaratkan DU/DI. Pengalaman empiris menunjukan bahwa sekolah-sekolah yang pembelajaran pengetahuan dan keterampilan dengan menggunakan sarana prasarana serta fasilitas belajar yang mendekati peralatan yang digunakan DU/DI, akan menghasilkan lulusan yang siap kerja.

Sampai dengan saat ini, konsep pengembangan SMK 4 tahun Direktorat PSMK memang tidak diterapkan untuk semua paket keahlian. Hasil pengembangan Direktorat PSMK, pada bulan September 2016 telah dirilis spektrum keahlian SMK dengan jumlah paket keahlian sebanyak 142 paket. Jumlah paket tersebut berkembang dari spektrum keahlian sebelumnya (spektrum keahlian 2013) yang berjumlah 129 paket keahlian. Hal penting lainnya dari pengembangan spektrum keahlian tersebut yaitu terdapatnya perubahan sebagian nomenklatur (tata nama) paket keahlian. Dari 142 paket keahlian spektrum keahlian 2016, terdapat 34 paket keahlian SMK yang akan dikembangkan masa

studinya menjadi 4 tahun dengan dasar pertimbangan kebutuhan DU/DI. Mengacu pada kebutuhan DU/DI, Oleh karena itu, Direktorat PSMK memproyeksikan paket-paket keahlian yang akan dikembangkan masa studinya menjadi 4 tahun semakin bertambah. Hal tersebut setidaknya, ditengarai dengan berkembangnya jumlah paket keahlian mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2016 dari 20 paket keahlian menjadi 34 paket keahlian.

Terkait dengan penelitian ini, paket-paket keahlian yang menjadi obyek penelitian masih menggunakan nomenklatur spektrum keahlian 2013, karena pada kenyataannya semua SMK masih menggunakan penamaan paket-paket keahlian spektrum keahlian 2013. Selain itu, paket-paket keahlian “baru” yang terdapat pada spektrum keahlian 2016 pada saat penelitian ini dilakukan belum ada SMK yang menerapkannya. Padahal sebagian dari paket-paket keahlian baru tersebut, nantinya akan diselenggarakan dengan masa studi 4 tahun. Kondisi yang demikian, dan dengan mempertimbangkan lingkup kebijakan yang menjadi fokus penelitian (3 bidang keahlian prioritas pengembangan Nawacita), maka untuk mengganti paket-paket keahlian baru yang akan diselenggarakan dengan masa studi 4 tahun ditetapkan paket-paket keahlian yang sejenis (dasar pengembangan) yaitu Tata Busana menggantikan *Fesyen* dan Kesehatan Hewan menggantikan Kesehatan dan Reproduksi Hewan.

Berikut kompetensi-kompetensi dan lama pembelajaran yang diusulkan untuk paket-paket keahlian yang menjadi fokus penelitian ini terkait penyelenggaraan SMK 4 tahun, terutama untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi lulusan yang dihasilkan sekolah dengan yang dibutuhkan oleh DU/DI.

## **1. Paket Keahlian Kesehatan Hewan**

Kalangan DU/DI yang terdiri dari perusahaan penggemukan dan pemotongan ternak (sapi), industri pakan ternak, dan peternakan ayam, menyatakan kompetensi-kompetensi yang diajarkan perlu diperdalam atau ditambah dengan

beberapa kompetensi lain yaitu: (i) pengetahuan tentang pakan (takaran, frekuensi pemberian, kadar air, penyimpanan, proses pencampuran, dan komposisi), (ii) pemeliharaan sistem basah dan sistem kering, (iii) prosedur penyuntikan dan pemberian vaksin. Apalagi jika dalam wacana pengembangan SMK 4 tahun, Paket Keahlian ini akan dikembangkan menjadi Kesehatan dan Reproduksi Hewan. Tambahan lagi, DU/DI yang telah menjalin kerjasama dalam hal prakerin dan perekutan lulusan untuk paket keahlian lain (pengawasan mutu hasil pertanian dan perikanan), telah membuktikan pengalamannya yang lebih baik dalam menerima prakerin dan merekrut tenaga kerja dari lulusan SMK 4 tahun karena lebih siap kerja. Hal ini ditunjukan dengan pengetahuan dan keterampilannya yang jauh lebih baik. Selain itu, secara UU Tenaga Kerja (UU No. 13/2013) juga sudah memenuhi persyaratan karena rata-rata sudah berusia 18 tahun.

Berdasarkan pertimbangan dan pengalaman tersebut, kalangan DU/DI berpendapat paket keahlian kesehatan hewan juga sebaiknya diselenggarakan dalam 4 tahun masa studi. Oleh karena itu, beberapa kompetensi tambahan yang diusulkan dapat diberikan jika masa studinya ditambah menjadi 4 tahun. DU/DI siap mendukung penambahan masa studi 4 tahun, jika diperlukan dalam bentuk pelibatan tenaga ahlinya sebagai “pengajar atau guru tamu”.

Kalangan sekolah menyatakan bahwa kompetensi-kompetensi yang diajarkan mencakup (i) dasar-dasar kesehatan hewan, (ii) perawatan/pemeliharaan hewan, (iii) perawatan hewan kesayangan, (iv) pemberian pakan, dan (v) pengambilan darah hewan (untuk pemeriksaan kesehatan oleh dr. Hewan). Mereka menyatakan tidak diperlukan penambahan masa studi menjadi 4 tahun, karena sangat dikhawatirkan jika masa studi keahlian perawatan kesehatan hewan menjadi 4 (empat) tahun, maka akan menurunkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SMK 4 tahun, karena selain menambah beban pembiayaan, juga semakin lama/panjang waktu untuk bekerja. Selain itu, paket keahlian kesehatan hewan termasuk kurang diminati lulusan SMP/MTs

dibandingkan dengan paket-paket keahlian lainnya pada bidang keahlian Agribisnis.

Namun demikian, jika masa pembelajaran paket keahlian kesehatan hewan menjadi 4 tahun dikarenakan adanya penambahan keahlian dalam hal reproduksi hewan, diperlukan sosialisasi yang intensif terutama kepada masyarakat (orangtua). Sosialisasi dimaksud mencakup berbagai aspek tentang apa kelebihan/keuntungannya jika keahlian yang diajarkan diperluas (ditambah) dengan keahlian reproduksi hewan sehingga masa belajarnya diperpanjang menjadi 4 tahun?, termasuk jaminan kerja, gaji atau penghasilan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan karyawan yang beraal dari SMK 3 tahun. Jika ada jaminan DU/DI atau Pemerintah, maka diyakini oleh sekolah orang tua (masyarakat) dapat menerima penambahan masa studi menjadi 4 tahun. Disamping itu, sekolah juga perlu diberikan kewenangan mengelola secara mandiri sesuai visi dan misi sekolahnya dan bahkan dibantu untuk membentuk unit usaha, karena selain untuk “miniatur” DU/DI di sekolah juga untuk dukungan pembiayaan dalam rangka peningkatan mutu sekolah.

Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten menyatakan kompetensi-kompetensi yang diajarkan di sekolah untuk paket keahlian perawatan kesehatan hewan dapat memenuhi permintaan DU/DI, meskipun diakui untuk lebih menjamin ketercapaian kompetensi secara optimal belum ditunjang dengan sarpras dan fasilitas belajar yang memadai. SMK yang menyelenggarakan paket keahlian kesehatan hewan sangat terbatas jumlahnya, dan diakui populasi siswanya juga sedikit jika dibandingkan dengan paket-paket keahlian lainnya di bidang Agrobisnis. Dengan demikian, dikhawatirkan minat calon siswa yang akan memilih keahlian ini akan semakin berkurang, dan bahkan tidak memenuhi satu rombongan belajar (rombel).

Sebagaimana halnya kalangan sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten juga berpendapat jika paket keahlian ini akan dikembangkan menjadi kesehatan

dan reproduksi hewan, dan dengan demikian masa studinya diperpanjang menjadi 4 tahun, perlu sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat (orangtua) dan semua unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan. Selain memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait keuntungannya, juga pemahaman kepada *stakeholders* lainnya terutama pemerintah dan DU/DI, agar benar-benar mendukung penyelenggaraan paket keahlian yang dikembangkan tersebut, dengan masa pembelajaran 4 tahun, benar-benar akan memberikan nilai tambah yang nyata bagi semua pihak yang berkepentingan.

Mengacu pada temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dan kontribusi DU//DI terhadap kualitas lulusan SMK sangat menentukan ketercapaian kualitas kompetensi lulusan SMK 3 tahun. Permasalahan ketercapaian kompetensi lulusan SMK 3 tahun lebih dikarenakan masa prakerin di DU/DI relatif pendek karena menggunakan sistem harian (*day release*) dan dinilainya kurang efektif untuk pencapaian suatu kompetensi secara utuh dalam kurun waktu tertentu.

SMK 3 tahun keahlian kesehatan hewan tidak harus berubah masa studinya menjadi 4 tahun dengan pertimbangan memperpanjang waktu oangtua menambah biaya pendidikan anaknya dan tambahan waktu selama 1 tahun dapat dimanfaatkaan lulusan untuk mencari pekerjaan. Namun demikian, apabila akan dilakukan perluasan keahlian yang dipelajari menjadi keahlian kesehatan dan reproduksi hewan, maka penambahan masa studi menjadi 4 tahun diyakini pihak sekolah akan dapat diterima, selama pihak Pemerintah komitmen dan konsisten untuk 1) melakukan sosialisasi program 4 tahun; 2) menyakinkan para pemangku kepentingan pendidikan (*stakeholders*) khususnya bagi orangtua dan DU/DI terhadap program 4 tahun, dan jaminan kompetensi serta mutu lulusan meningkat; dan 3) pemenuhan kebutuhan perangkat pendidikan menjadi tanggungjawab Pememrintah Pusat, prioritas untuk guru produktif dan sarpras pembelajaran.

## **2. Paket Keahlian Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan**

Menurut DU/DI kompetensi lulusan SMK dari Paket keahlian “Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan” yaitu kompetensi dalam menganalisis produk hasil pengolahan. Misalnya minuman dan makanan, sebagai salah satu produk yang dihasilkan oleh DU/DI. Caranya dengan menganalisis sampel minuman dan makanan. Mutu minuman dan makanan harus sesuai standar, jika tidak sesuai, produk tidak dapat dipasarkan, harus diolah ulang, sehingga perusahaan tidak akan merugi.

Menurut SMK, kompetensi yang diperoleh sebetulnya belum optimal. Sebagai contoh, materi terkait dengan analisis produk yang tercantum dalam kurikulum KTSP diberikan selama 4 semester, sekarang dalam Kurikulum 2013 dipadatkan menjadi 2 semester. Caranya dengan mengurangi kedalaman materi, memberikannya hanya garis besarnya saja. Materi yang disampaikan kepada siswa berupa prinsip-prinsip yang penting, meskipun secara detilnya agak berbeda. Contoh prinsip-prinsip menganalisis kadar air, kadar lemak, kadar abu adalah sama. Dengan kondisi seperti itu, dasar program keahlian siswa menjadi kurang kuat, karena tidak mengerti prinsip-prinsip dasar program keahlian secara utuh. Untuk materi pengawasan mutu, terkait dengan mata pelajaran kimia hanya diberikan 2 jam, padahal seharusnya 4 jam. Di kelas XI, terkait materi menganalisis hanya inti (*core*) mata pelajaran yang diujikan saja yang disampaikan kepada siswa. Di kelas XII. Mengacu pada K- 13, semua kompetensi tentang pengendalian mutu pangan harus dipelajari siswa sampai akhir. Sementara ini, menggunakan pedoman buku lain, karena buku pegangan 1 sampai saat DKT dilakukan belum diterima sekolah.

Untuk meningkatkan kompetensi lulusan, materi yang sifatnya umum seperti kimia yang diberikan kepada siswa SMA tidak diberikan kepada siswa SMK. Jika memang dirasa perlu, materi kimia yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan siswa SMK yaitu yang sinkron dengan materi mata

pelajaran produktifnya. SMKN 5 Jember cenderung mengikuti kurikulum yang ditetapkan Pemerintah (Kemendikbud), mengingat ia merupakan SMK Negeri yang harus mengikuti aturan Kemendikbud.

Dengan kondisi seperti ini disimpulkan bahwa pembelajaran paket keahlian Paket Keahlian Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan perlu dijadikan 4 tahun. Dengan pembelajaran 4 tahun materi penting sebagaimana tercantum dalam kurikulum KTSP perlu diberikan selama 4 semester tidak perlu dipadatkan menjadi 2 semester sehingga peningkatan kompetensi lulusan diharapkan dapat dioptimalkan.

Dengan adanya kompetensi yang masih kurang optimal, maka dengan pembelajaran menjadi 4 tahun ada kesempatan meningkatkan kompetensi yang dinilai DU/DI masih kurang. Menurut responden dari DU/DI, sesuai dengan SOP menyelenggarakan 3 bulan pelatihan bagi calon pekerja yang sudah direkrut agar kompetensi sikap, dan perilaku kerjanya sesuai dengan tuntutan perusahaan yaitu mencapai standar sebagai pengawas mutu (*Quality Control*). Calon peserta yang diseleksi memang tidak hanya yang berasal dari paket keahlian pengawasan mutu, namun juga dari paket keahlian lain yang memiliki dasar “pengolahan uji sensori”. Ketentuan perusahaan yang diterima yaitu yang lulus tes seleksi masuk, tidak peduli paket keahliannya apa.

Untuk pengawasan mutu pangan, jika pembelajarannya menjadi 4 tahun perlu ditambahkan “uji mutu pangan” yang belum ada dalam standar, namun dinilai penting seperti “uji mutu umbi-umbian” dan “kacang-kacangan”. Dengan pembelajaran 4 tahun, diharapkan tersedia waktu untuk meningkatkan kompetensi pendukung yang juga penting di era global, seperti kompetensi computer, bahasa Inggris, dan budaya dalam rangka mempersiapkan siswa yang akan bekerja di luar negeri.

Menurut DU/DI, sikap dan perilaku lulusan SMK juga masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan dengan pendalaman materi. Dengan pembelajaran 4 tahun materi yang dibutuhkan DU/DI dan dapat diberikan pendalamannya yaitu “komunikasi dan kewirausahaan”. Adapun menurut pihak sekolah, sikap dan perilaku lulusan SMK sudah cukup baik, namun ada materi yang dituntut untuk segera ditambahkan sesuai tuntutan DU/DI yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Setelah pelatihan minimal 3 hari dan mengikuti tes, siswa akan menerima sertifikat. Dengan pembelajaran 4 tahun, setelah pembelajaran tahun ke tiga, sekolah berpeluang menambahkan materi K3 yang bersifat umum, dalam arti tidak untuk paket keahlian tertentu. K3 untuk SMK Perikanan dan Kelautan SMK Puger sudah diajarkan.

Kelebihan lain dari penyelenggaraan pembelajaran SMK menjadi 4 tahun yaitu usia lulusan sudah mencapai 18 tahun, berarti mereka sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (UU No 13/2013) yang membolehkan usia 18 tahun diperbolehkan bekerja. Supaya dapat bekerja di luar negeri siswa SMK perlu tambahan kompetensi berbahasa Inggris, komputer, pengetahuan budaya negara yang menjadi tujuan tempat bekerja.

Mengacu pada temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dan kontribusi DU//DI tehadap kualitas lulusan SMK sangat menentukan ketercapaian kualitas kompetensi lulusan SMK 3 tahun. Permasalahan ketercapaian kompetensi lulusan SMK 3 tahun lebih dikarenakan masa prakerin di DU/DI relatif pendek karena menggunakan sistem harian (*day release*) dan dinilainya kurang efektif untuk pencapaian suatu kompetensi secara utuh dalam kurun waktu tertentu.

### **3. Paket Keahlian Nautika Kapal Penangkapan Ikan**

Kalangan DU/DI menyatakan kompetensi-kompetensi yang diajarkan perlu diperdalam atau ditambah dengan beberapa kompetensi lain yaitu (i) menyortir

hasil tangkapan untuk memisahkan yang layak produksi dan yang tidak layak, dan (ii) etika kerja dan bahasa asing (sesuai negara asal perusahaan). Sampai saat ini, keterampilan siswa prakerin dan kompetensi lulusan yang direkrut cukup memadai. Untuk keperluan tersebut perusahaan memang masih harus memberikan pelatihan menyangkut “bahasa dan etika kerja”. Dengan demikian, jika ada penambahan masa studi menjadi 4 tahun, kompetensi-kompetensi yang diusulkan ditambah/diperdalam itu sehingga dapat diberikan pada tahun ke 4. Kecuali jika sekolah dapat memberikannya dengan cara memadatkannya dalam masa studi 3 tahun, maka tidak perlu juga harus diperpanjang menjadi 4 tahun.

Kalangan sekolah menyatakan bahwa kompetensi-kompetensi yang diajarkan mencakup (i) perencanaan pelayaran, (ii) pengoperasian peralatan pelayaran kapal (sistim navigasi, komunikasi dan penggerak kapal), (iii) identifikasi parameter meteorologi dan oceanografi, (iv) pengendalian (olah gerak) kapal, (vi) pemahaman hukum laut, peraturan dan tata laksana perikanan (CCRF), (vii) manajemen kapal dan kepelabuhanan, (viii) pengoperasian, perawatan dan perbaikan peralatan penangkapan ikan, (ix) penanganan dan penyimpanan hasil penangkapan, (x) penerapan stabilitas dan bangunan kapal, (xi) dinas jaga kapal (P2TL), (xii) penerapan prosedur darurat kapal (*BST*), dan bahasa Inggris maritim. Tidak diperlukan penambahan masa studi menjadi 4 tahun, karena sampai saat ini dengan lama studi 3 tahun saja seluruh lulusan terserap ke DU/DI, bahkan sejak siswa melaksanakan prakerin umumnya sudah diminati oleh DU/DI untuk direkrut sebagai karyawan baru.

Diperkirakan ada kekhawatiran masyarakat jika masa studi dijadikan 4 tahun akan menurunkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SMK 4 tahun, karena selain menambah beban pembiayaan, semakin lama waktu untuk mencari pekerjaan. padahal minat masyarakat menyekolahkan anaknya di SMK dengan harapan agar anaknya cepat bekerja.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menyatakan dengan mengacu pada pendapat DU/DI, jika masa studi 3 tahun sekolah dapat menambahkan/menyisipkan pembelajaran kompetensi yang masih kurang sekalipun perlu penambahan masa studi menjadi 4 tahun. Apalagi sekolah menyatakan hingga saat ini seluruh lulusannya terserap oleh DU/DI. Jika “dipaksakan” 4 tahun, SMK harus berbasis industri (DU/DI). Artinya, harus ada sistem kerjasama yang baik dengan DU/DI terutama dalam aspek pembelajaran, terutama Prakerin. Hal ini agar supaya ada jaminan penyerapan lulusan, dan dengan kompensasi yang lebih baik (lebih tinggi dibanding lulusan 3 tahun).

Mengacu pada temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dan kontribusi DU//DI tehadap kualitas lulusan SMK sangat menentukan ketercapaian kualitas kompetensi lulusan SMK 3 tahun. Permasalahan ketercapaian kompetensi lulusan SMK 3 tahun lebih dikarenakan masa prakerin di DU/DI relatif pendek karena menggunakan sistem harian (*day release*) dan dinilainya kurang efektif untuk pencapaian suatu kompetensi secara utuh dalam kurun waktu tertentu.

SMK 3 tahun Keahlian Nautika Kapal Penangkapan Ikan (NKPI) tidak harus berubah masa studinya menjadi 4 tahun dengan pertimbangan memperpanjang waktu oangtua menambah biaya pendidikan anaknya dan tambahan waktu selama 1 tahun dapat dimanfaatkaan lulusan untuk mencari pekerjaan. Di samping itu, waktu untuk dapat mengikuti pelatihan laut (Prala) masih harus mengikuti beberapa pelatihan (Pra-Prala) yang secara intensif ditempuh dalam waktu minimal 6 bulan.

#### **4. Paket Keahlian Nautika Kapal Niaga**

Menurut DU/DI kompetensi yang diajarkan di SMK Kemaritiman telah mengacu pada peraturan Ditjen Perhubungan Laut (Dit.Perla), sehingga sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Hal itu mengingat, kompetensi-kompetensi yang diajarkan, baik di tingkat dasar program maupun paket keahlian sudah mendapat persetujuan

dari Ditjen Perhubungan Laut. Di samping itu, untuk mendapatkan sertifikat keahlian kelautan, siswa juga harus mengikuti kurikulum inti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kelautan yang dikeluarkan oleh kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perhubungan, Ditjen Perhubungan Laut.

Berdasarkan pengalaman DU/DI terhadap para lulusan SMK Kemaritiman paket keahlian Nautika Kapal Niaga yang bekerja di perusahaannya, kompetensi dan perilaku sudah cukup baik, karena materi-materi yang diajarkan sudah selaras dengan kompetensi yang dipersyaratkan oleh DU/DI. Namun, dari sisi keterampilan yang dikuasai perlu dipelajari lebih dalam lagi, karena umumnya para siswa penguasaan teori dan prakti belum seimbang (lebih dominan penguasaan teori).

Menurut kalangan sekolah, kompetensi yang diajarkan pada paket keahlian Nautika Kapal Niaga sekitar 20 kompetensi yang diajarkan sejak kelas X sampai dengan kelas XII. Untuk paket dasar program keahlian meliputi (i) Hukum Maritim, (ii) Konstruksi dan stabilitas kapal, (iii) Dasar-dasar penanganan pengaturan muatan kapal, (iv) Dasar-dasar keselamatan di laut, (v) Bahasa Inggris Maritim, dan (vi) Simulasi digital. Adapun untuk paket keahlian meliputi (i) Pelayaran kapal niaga, (ii) Komunikasi kapal niaga, (iii) Dinas jaga, (iv) Penanganan dan pengaturan muatan, (v) Perawatan kapal, (vi) Motor disel dan instalasi tenaga kapal niaga, (vii) Pesawat bantu kapal niaga, (viii) Kelistrikan dan otomatisasi kapal, dan (ix) Pencegahan pencemaran.

Kurikulum yang menjadi acuan di SMK Kemaritiman ada dua induk yakni dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan. Dari Kementerian Pendidikan mengacu pada Kurikulum 2013 dan KTSP, sedangkan dari Kementerian Perhubungan mengacu kurikulum dari Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perhubungan, Ditjen Perhubungan Laut.

Secara umum, materi pada dua kurikulum versi Kemdikbud dan Kemenhub terdapat perbedaan. Perbedaanya dari materi pelajaran dan jumlah jam belajar. Dari sisi materi mata pelajaran dari Kemenhub lebih rinci dan jumlah jam belajar lebih lama, yakni 60 menit/jam. Jumlah jam belajar dalam Kemdikbud 45 menit/jam pelajaran. Untuk sekolah swasta (misalnya, SMK Kemaritiman Semarang) lebih banyak menggunakan kurikulum dari Kemenhub. Adapun yang dilakukan SMKN 10 Semarang yaitu dengan mensinkronkan antara kurikulum Kemdikbud. dan Kemenhub. Dengan demikian, kompetensi yang diajarkan pada paket keahlian Nautika Kapal Niaga sudah sesuai dengan tuntutan DU/D. Hal ini dikarenakan kurikulumnya merupakan hasil paduan dengan kurikulum yang disusun oleh Badan Diklat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan yang merupakan hasil kerjasama dengan industri pelayaran dan lembaga sertifikasi pelayaran. Namun, kompetensi dari perolehan pengalaman praktek laut (Prala) dinilai masih sangat kurang, karena keterbatasan jumlah kapal niaga untuk keperluan praktek laut.

Kegiatan praktek laut di SMK Kemaritiman dilaksanakan setelah lulus ujian nasional (UN) karena memerlukan waktu lama untuk praktek. Untuk mendapatkan industri pelayaran sebagai tempat praktek di kota Semarang bukannya hal yang mudah, karena perusahaan pelayaran tidak ada di Kota Semarang. Dengan demikian, siswa harus mencari tempat praktik laut di kota lain, seperti di Surabaya, Jakarta, Makasar dan kota-kota besar lainnya. Terbatasnya jumlah kapal niaga untuk kegiatan praktek, menyebabkan siswa harus menunggu antara 3 sampai 5 tahun untuk dapat praktek laut. Akibatnya, dari setiap angkatan hanya sekitar 20% sampai dengan 25 % yang dapat melaksanakan praktek laut dan mendapatkan sertifikat ahli nautika tingkat 4 (ANT4).

Menurut Dinas Pendidikan Kota Semarang yang diwakili oleh kepala seksi SMK, bahwa kompetensi paket keahlian Nautika Kapal Niaga secara teori sudah cukup, tetapi untuk praktek di DU/DI masih kurang, karena terbatasnya

perusahaan pelayaran di Kota Semarang. Oleh karena itu, perlu melibatkan kapal-kapal TNI sebagai tempat praktek SMK pelayaran untuk mengurangi masa tunggu yang lama.

Untuk paket keahlian Nautika Kapal Niaga memerlukan praktek laut yang lama, sedikitnya 1 tahun. Untuk itu, perlu dipertimbangkan jika dilakukan penambahan waktu belajar. Dari sisi pembelajaran teori dan praktik dasar, lama waktu belajar paket keahlian Nautika Kapal Niaga cukup 3 tahun. Namun demikian, untuk memperoleh keterampilan lainnya yang disertai dengan sertifikat-sertifikat keahlian waktu 3 tahun tidak cukup. Sebagai contoh untuk memperoleh Surat Keterangan Praktik Laut (Prala), sedikitnya memerlukan waktu 1 tahun, itupun dengan catatan setelah lulus langsung mendapatkan kapal untuk praktik. Jika tidak langsung mendapatkan kapal tempat praktik, harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan kapal niaga tempat praktik, bahkan sampai 3-5 tahun. Hal ini karena jumlah kapal yang terbatas dan siswa yang mengantri cukup banyak.

Paket keahlian Nautika Kapal Niaga pada SMK, waktu 3 tahun itu hanya cukup untuk teori saja. Perlunya waktu yang lama untuk mencapai kompetensi tertentu, sebetulnya bukan semata karena materi yang padat, tetapi juga terkait dengan keterbatasan jumlah sarana. Hal ini dikarenakan terbatasnya tempat praktek, sebagai contoh untuk praktek simulasi saja harus ke Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP), karena praktik tersebut memerlukan peralatan khusus seperti simulator yang harganya mahal dan sekolah belum mampu menyediakannya. Akibatnya, siswa harus mengantri untuk dapat melakukan praktek. Ketidakmampuan SMK menyediakan “simulasi prala” disebabkan karena peralatan tersebut harganya mahal. Belum lagi untuk praktek laut yang umumnya dilakukan di luar kota Semarang seperti Surabaya, Makasar, dan Jakarta, karena di Semarang tidak ada perusahaan pelayaran.

Paket keahlian Nautika Kapal Niaga, sebetulnya merupakan paket “keahlian unggulan” yang banyak diminati oleh siswa yang bercita-cita menjadi pelaut dengan penghasilan yang cukup lumayan. Hanya saja, untuk memperoleh pekerjaan yang demikian itu tidak cukup dengan ijazah SMK saja, tetapi perlu dilengkapi dengan sertifikat-sertifikat keahlian lainnya seperti “sertifikat keahlian tingkat dasar”, “sertifikat keahlian Nautika tingkat IV, III, II, dan I”. Jika hanya mengandalkan ijazah saja, tanpa sertifikat keahlian lainnya, lulusan SMK jurusan Nautika Kapal Niaga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk memperoleh sertifikat-sertifikat keahlian tersebut tidak dapat diperoleh di sekolah tetapi di lembaga lain yang berkompeten, yaitu dengan mengikuti pelatihan dengan biaya yang cukup besar. Akibatnya, banyak siswa yang tidak mampu, sehingga dari jumlah lulusan setiap angkatan hanya sekitar 25% yang dapat memperoleh sertifikat tersebut.

Kompetensi paket keahlian Kapal Niaga memang memerlukan waktu belajar yang lebih lama, karena ada kewajiban praktik laut yang sedikitnya memerlukan waktu 1 tahun. Jika waktu belajar bisa ditambah 1 tahun menjadi 4 tahun tentu ini akan lebih menguntungkan, karena waktu untuk praktik sudah tercakup dalam masa belajar. Diharapkan tidak hanya waktu belajar saja yang ditambah tetapi juga sarana/prasarananya dan tersedianya kapal tempat praktik laut. Dengan waktu belajar 4 tahun, diharapkan waktu tiga tahun konsentrasi untuk kegiatan akademik dan yang satu tahun untuk kegiatan praktik. Dalam hal ini, koordinasi antara Kemendikbud dan Kemenhub juga perlu diintensifkan terutama terkait dengan sertifikasi keahlian. Jika hal tersebut dapat dijadikan satu kesatuan maka siswa SMK jurusan Nautika Kapal Niaga begitu lulus sudah otomatis mendapatkan sertifikat keahlian tingkat 4 (ANKN4).

Mengacu pada temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dan kontribusi DU//DI tehadap kualitas lulusan SMK sangat menentukan ketercapaian kualitas kompetensi lulusan SMK 3 tahun. Permasalahan yang dihadapi yaitu

keterbatasan sarana praktik laut terutama keberadaan kapal sangat terbatas. Di samping itu, ketersediaan tempat prakerin jauh dari sekolah seperti di Jakarta dan Surabaya.

## **5. Paket Keahlian Tata Busana**

Pihak DU/DI yang terdiri atas beberapa usaha rumah mode (butik), menyatakan kompetensi-kompetensi yang dijarkan perlu diperdalam atau ditambah dengan beberapa kompetensi lainnya, yaitu (i) pengembangan disain yang mengikuti trend, (ii) peletakan pola pada bahan atau mempola langsung pada bahan, (iii) memotong dan menjahit dengan presisi/kerapihan yang tinggi, (iv) membuat pola dan mendisain secara digital (komputer) sehingga bisa mengerjakan pecah pola, (v) penghitungan biaya (pembukuan), dan (vi) komunikasi atau kemampuan menjelaskan pola dan disain busana kepada kustomer. Namun demikian, kompetensi-kompetensi yang sudah diajarkan dan yang diusulkan tersebut tidak perlu diajarkan dengan penambahan masa studi menjadi 4 tahun, tetapi dapat tetap diselenggarakan selama 3 tahun. Untuk itu, perlu dilakukan pengurangan jumlah/beban jam pelajaran yang bukan kelompok kejuruan (produktif), yaitu mata pelajaran kelompok normatif maupun adaptif seperti matematika, IPA, IPS; dan menambah jumlah jam pelajaran kejuruan. Penambahan jam pelajaran kejuruan juga perlu dilengkapi dengan pengadaan sarana prasarana dan fasilitas belajar/praktik yang lebih baik, yaitu yang semakin mendekati sarana prasarana yang digunakan oleh DU/DI.

Pihak sekolah menyatakan kompetensi-kompetensi yang diajarkan mencakup (i) simulasi digital, (ii) pengetahuan bahan, (iii) teknik menjahit, (iv) pembuatan pola, (v) pembuatan disain, (vi) pola dan disain busana custom dan industri, serta (vii) pembuatan hiasan. Sampai saat ini, pengalaman dengan bekal kompetensi-kompetensi tersebut sebagian besar lulusan dapat terserap oleh DU/DI dan sebagian lainnya ada yang membuka usaha sendiri. Kalangan sekolah juga

menyatakan tidak diperlukan penambahan masa studi menjadi 4 tahun. Apalagi sangat dikhawatirkan jika masa studi untuk keahlian Tata Busana dijadikan 4 tahun, akan menurunkan minat masyarakat untuk mempelajari keahlian ini, karena selain menambah beban pembiayaan, juga semakin lama/panjang waktu untuk segera memasuki dunia kerja/bekerja, padahal minat masyarakat bersekolah di SMK teutama dengan alasan ingin cepat bekerja.

Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Kota Denpasar menyatakan bahwa kompetensi-kompetensi yang diajarkan di sekolah untuk paket keahlian Tata Busana masih dapat memenuhi permintaan DU/DI. Meskipun diakui bahwa untuk lebih menjamin ketercapaian optimal kompetensi-kompetensi tersebut belum ditunjang oleh sarpras dan fasilitas belajar yang memadai. Di kota Denpasar hanya ada dua SMK yang menyelenggarakan paket keahlian Tata Busana, dan diakui populasi siswanya juga sedikit jika dibandingkan dengan paket-paket keahlian lainnya dalam bidang pariwisata. Hal tersebut menggambarkan minat masyarakat pada keahlian ini juga rendah. Dengan demikian, sangat logis jika dikhawatirkan minat akan semakin rendah, bahkan bisa jadi tidak ada peminat, jika masa studi Tata Busana diperpanjang menjadi 4 tahun.

Mengacu pada temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dan kontribusi DU//DI terhadap kualitas lulusan SMK sangat menentukan ketercapaian kualitas kompetensi lulusan SMK 3 tahun. Permasalahan ketercapaian kompetensi lulusan SMK 3 tahun lebih dikarenakan masa prakerin di DU/DI relatif pendek karena menggunakan sistem harian (*day release*) dan dinilainya kurang efektif untuk pencapaian suatu kompetensi secara utuh dalam kurun waktu tertentu.

Pihak sekolah, tidak berminat untuk melaksanakan pembelajaran SMK Pariwisata dari 3 tahun menjadi 4 tahun. Jika tetap 3 tahun, itupun mengusulkan agar jumlah mata pelajaran adaptif dan normatif dikurangi (sebagai contoh matematika).

## **B. Penghargaan Terhadap Lulusan SMK 4 Tahun**

Mengacu pada tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya penyelanggaraan SMK bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang (i) terampil dibidang keahliannya masing-masing untuk dapat segera memasuki dunia kerja, dan (ii) siap untuk mengembangkan diri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, lulusan SMK diarahkan untuk dapat segera bekerja, dan/atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dijamin oleh undang-undang. Selanjutnya, mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI, lulusan satuan pendidikan menengah, termasuk SMK, disetarakan dalam kelompok Operator dengan jenjang (*level*) 2. Penyetaraan pada jenjang 2 tersebut berada 1 (satu) tingkat di atas penyetaraan untuk lulusan satuan pendidikan dasar, dan 1 tingkat di bawah penyetaraan untuk lulusan Diploma 1. Salah satu isu yang sangat penting dalam pengembangan SMK 4 tahun yaitu peningkatan level lulusan SMK dalam KKNI, dari level 2 menjadi level 3.

Terkait dengan pengembangan SMK 4 tahun, penambahan lama studi menjadi 4 tahun diharapkan dapat memberikan nilai tambah, sehingga lulusan SMK 4 tahun “dihargai” menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMK 3 tahun, terutama dalam hal penggajian dan posisi/tingkat jabatan di dunia kerja. Posisi tersebut menjadi sangat penting karena akan berkonsekuensi pada tingkat (i) gaji/upah, (ii) fasilitas, dan (iii) keberlanjutan pengembangan karir yang akan diterima oleh lulusan SMK 4 tahun ketika mulai bekerja. Saat ini, baru ada beberapa SMK 4 tahun yang pada waktu menjadi karyawan baru, DU/DI tidak ada perbedaan penghargaan antara pekerja yang berasal dari SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun.

Bagi DU/DI, yang penting mereka lulus tes seleksi masuk. Namun, menurut pengalaman beberapa DU/DI, setelah bekerja beberapa waktu, umumnya lulusan SMK 4 tahun menunjukkan kinerja yang lebih baik karena memiliki kompetensi yang lebih tinggi/kompeten. Dengan kondisi demikian, DU/DI akan memprioritaskan pola promosi atau kenaikan “jabatan” mereka, yang tentu saja otomatis akan diikuti dengan peningkatan penghasilan, fasilitas, dan karir mereka. Pada prinsipnya, yang dapat meningkatkan penghargaan lulusan SMK 4 tahun yaitu penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan DU/DI dan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi kompetensi sebagai bukti pengakuan secara profesional. Sertifikat kompetensi dimaksud dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui DU/DI untuk bidang keahlian tertentu.

Di bidang keahlian Kemaritiman, hingga saat ini belum ada SMK 4 tahun. Dengan demikian, baik kalangan sekolah, DU/DI, maupun dinas pendidikan, belum mempunyai gambaran tentang SMK 4 tahun untuk bidang Kemaritiman. Namun demikian, khusus untuk paket keahlian Nautika Kapal Niaga, persepsi mereka positif terhadap program pengembangan SMK 4 tahun. Sampai saat penelitian ini dilakukan, untuk mendapatkan pengakuan keprofesian sebagai pelaut, lulusan SMK paket keahlian Nautika Kapal Niaga diwajibkan mengikuti ujian profesi “Pra Prala” dan melaksanakan “Prala/Prola” (Praktek Kerja Laut) terlebih dulu. Prala merupakan suatu kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh setiap taruna sekolah atau akademi pelayaran di Indonesia maupun di luar negeri (dunia) sebagai syarat untuk pemenuhan masa studinya. Sebelum melaksanakan Prala, para taruna terlebih dahulu diharuskan mengikuti ujian profesi “Pra Prala”. Taruna yang berminat menempuh ujian profesi “Pra Prala” dapat melaksanakannya di PUKP ( Panitia Ujian Kepelayakan Pelaut ). Di Indonesia PUKP terdapat di 12 kota yaitu Medan, Padang, Jakarta, Serang, Tegal, Semarang, Banyuwangi, Surabaya, Makassar, Bitung, Ambon dan Sorong.

Di kota Semarang, PUKP mengambil tempat di PIP (Politeknik Ilmu Pelayaran) Semarang. Beberapa dokumen yang harus dilengkapi sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian profesi Pra Prala yaitu Ijazah terakhir (SMK), Transkrip Nilai, KTP, Surat Tanda Lulus Simulator (Diklat simulator sekitar 6 minggu), dan sertifikat Diklat-Diklat lainnya seperti *BST*, *SCRB*, dan *MEFA*. Setelah dinyatakan lulus dalam ujian Pra Prala, barulah taruna dapat menjalani Prala di atas kapal selama maksimal 1 tahun dan minimal 8 bulan sesuai ketentuan *IMO* dan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub.

Untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan Prala, lulusan SMK paket keahlian Nautika Kapal Niaga yang masih diselenggarakan dengan masa studi 3 tahun, harus menunggu 2-5 tahun. Lamanya masa tunggu untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan Prala terutama disebabkan oleh terbatasnya armada kapal niaga yang bersedia di tempat pelaksanaan Prala. Di samping itu, penyebab lainnya yaitu tingginya biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari tahap penyiapan persyaratan untuk mengikutiujian profesi Pra Prala sampai dengan mendapatkan surat rekomendasi untuk melaksanakan Prala. Baik penyelenggaraan ujian profesi Pra Prala maupun kegiatan Prala sepenuhnya berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Dalam konteks ini, sangat diharapkan program SMK 4 tahun benar-benar dapat mewujudkan secara nyata koordinasi antara Kemenhub dengan Kemendikbud, sebagaimana telah dinstruksikan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2016. Dengan demikian, ketika siswa dinyatakan lulus setelah menjalani masa studi selama 4 tahun, keprofesiannya sebagai pelaut otomatis sudah diakui. Di samping itu, ketika lulusan SMK 4 tahun ini ingin melanjutkan studi ke akademi/perguruan tinggi Kemaritiman, mata pelajaran-mata pelajaran yang telah dipelajari di SMK diakui (dikonversi). Lebih lanjut, hal tersebut dapat juga diakui manakala melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (perguruan tinggi).

Di bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, khususnya paket keahlian Teknik Gambar Bangunan, secara umum kalangan DU/DI tidak memberikan perbedaan perlakuan kepada lulusan SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun saat direkrut sebagai karyawan. Dalam hal pemberian upah/gaji dilakukan sesuai peraturan perundungan yang berlaku yaitu dengan mengacu pada standar UMR (Upah Minimum Regional) setempat. Meskipun demikian, diakui ada beberapa perusahaan konstruksi yang memberikan perbedaan dalam hal jenis/tingkat pekerjaan yang otomatis berkonsekuensi pada perbedaan gaji dan fasilitas kerja yang diberikan. Misalnya perusahaan-perusahaan yang memerlukan lulusan paket keahlian Teknik Gambar Bangunan dari SMK 4 tahun sebagai operator, tetapi dari SMK 3 tahun memberlakukannya sebagai pembantu (*asisten*) operator. Kondisi demikian terjadi karena perusahaan-perusahaan tersebut telah menjalin kemitraan dengan SMK 4 tahun selama bertahun-tahun dan selalu menjadi tempat pelaksanaan Prakerin. Bahkan selama pelaksanaan Prakerin, perusahaan tidak hanya memberikan bimbingan kepada siswa, tetapi juga mulai “menyeleksi” untuk nanti direkrut sebagai karyawan baru. Bentuk afirmasi lain yang diberikan perusahaan yaitu pemberian uang makan dan transport kepada siswa yang sedang melaksanakan Prakerin. Sekalipun tidak semua tempat prakerin memberikan uang saku, namun pihak sekolah sebelum siswa melakukan prakerin terlebih dahulu menginformasikan hal-hal yang harus disiapkan oleh peserta prakerin termasuk uang makan siang.

Sebagaimana halnya di kalangan SMK bidang keahlian Kemaritiman, kalangan SMK bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa juga menghendaki apabila masa studi diperpanjang menjadi 4 tahun, maka bagi lulusannya yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dapat diberikan pengakuan (konversi) untuk beberapa mata pelajaran yang telah ditempuh selama di SMK.

Mengacu pada fakta tersebut, maka pemberian penghargaan bagi lulusan SMK 4 tahun dapat dilakukan beberapa alternatif kemungkinan sebagai berikut.

- Pertama, apabila lulusan SMK menjadi PNS dapat diusulkan kemungkinan pemberian penghargaan berupa pengakuan 1) tambahan masa studi 1 tahun diakui sebagai “pengalaman kerja” (golongan II/a dengan pengalaman kerja 1 tahun); 2) pengakuan setara dengan lulusan “diploma satu”; dan 3) memenuhi syarat SKKNI manakala dibuktikan dengan kepemilikan “sertifikat kompetensi”. Kendalanya terbentur pada PP Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- Kedua, manakala menjadi karyawan perusahaan swasta 1) memperoleh prioritas kesempatan untuk pengembangan karir di bidang keahliannya 2) mendapat tunjangan kerja yang berbeda dengan lulusan SMK 3 tahun dan 3) diakui memenuhi persyaratan SKKNI manakala dibuktikan dengan kepemilikan “sertifikat kompetensi”. Kendalanya terbentur pada Upah Minimur Regional (UMR) di masing-masing provinsi.
- Ketiga, jika lulusan meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 1) memperoleh pengakuan terhadap kompetensi yang telah diperoleh sebelumnya yang dibuktikan dengan kepemilikan “sertifikat kompetensi” (*recognition prior to learning*); 2) memperoleh dispensasi tidak mengikuti mata kuliah yang sudah diperolehnya yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat kompetensi; dan 3) memperoleh kesempatan waktu studi lebih pendek dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak memiliki sertifikat kompetensi. Kendalanya terbentur pada belum lazimnya pengakuan RPL di kalangan perguruan tinggi yang *notabene* pola aturan ini belum disosialisakan di perguruan tinggi.

## C. Pengelolaan

Berangkat dari hakikat SMK sebagai penyelenggara pendidikan menengah kejuruan yang mempunyai fungsi utama menyiapkan peserta didiknya untuk

terampil bekerja pada suatu bidang keahlian tertentu, maka pengelolaan SMK menjadi sangat berbeda dibandingkan baik dengan sekolah umum maupun jenis sekolah khusus lainnya. Dalam konteks pengembangan SMK 4 tahun, perpanjangan masa studi selama satu tahun tentu membawa beberapa konsekuensi dalam aspek pengelolaan sekolah. Pada beberapa aspek, hal ini dapat dilihat pada pengelolaan SMK 4 tahun yang menjadi sampel penelitian. Namun demikian, pihak sekolah menyatakan bahwa ke depan tetap harus dilakukan penguatan-penguatan dalam berbagai hal, sesuai tuntutan yang berkembang di DU/DI dan masyarakat pada umumnya. Terlebih lagi jika tuntutan fungsi-fungsi idealnya benar-benar dikembangkan sebagai Pusat Pelatihan dan Pengembangan Bahan Pelatihan, TUK (tempat uji kompetensi), LSP (lembaga sertifikasi profesi), dan Unit Produksi (*Teaching Factory*), pengelolaan SMK 4 tahun akan semakin kompleks dan benar-benar menuntut kehandalan sistem dan profesionalitas pengelolaan yang tinggi. Terkait dengan hal tersebut, beberapa aspek mendasar semestinya segera ditata ulang (revitalisasi) manajemen dan dilaksanakan dengan komitmen dan konsisten yang tinggi.

Pengelolaan SMK 4 tahun dengan berbagai konsekuensi logis sesuai dengan visi dan misi perlu dikelola dengan pendekatan manajemen industri. Artinya, manajer (kepala sekolah) bekerja tanpa mengenal batas waktu (bilamana perlu sewaktu-waktu, kepala sekolah bekerja selama 24 jam). Seluruh staf pengelola profesional di bidangnya terutama penguasaan IT. Agar pengelolaan berjalan secara efektif dan efisien diperlukan pemeberdayaan SDM sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Manajemen pengelolaan berasaskan pada profesionalisme yang syarat dengan penguasaan kompetensi, produktif, inovatif, transparan dan akuntabel. Dengan kata lain, pengelolaan SMK 4 tahun dikelola seperti halnya mengelola sebuah pabrik yang berorientasi pada produktivitas dan kualitas hasil yang dalam hal ini “layanan pendidikan” yang berorientasi pada hasil lulusan yang berkualitas.

## **1. Konsep Sekolah Kejuruan**

Definisi sekolah kejuruan yang terkesan melemahkan makna SMK yaitu keterampilan lebih diutamakan dari pengetahuan. Padahal, untuk memiliki keterampilan yang tinggi dibutuhkan pengetahuan yang tinggi pula. Tantangan global saat ini sudah tidak terlalu membedakan lagi antara pengetahuan dengan keterampilan, bahkan sudah terjadi komplemen antara keduanya (Brodjonegoro, 2016). Berkaca pada sistem pendidikan di Jerman yang *notabene* terkenal dengan kehandalan subsistem pendidikan kejuruan, sejak di sekolah sekunder (sepadan dengan SMP di Indonesia) siswa diberikan mata pelajaran baik yang bersifat umum seperti bahasa dan matematika maupun yang berupa keterampilan praktis dengan porsi yang seimbang. Pada jenjang berikutnya (tersier) siswa diberi kesempatan untuk mengikuti sistem ganda (*duale ausbildung*) dimana siswa tidak hanya belajar pengetahuan umum dan teori di dalam kelas, tetapi juga melakukan praktik/magang di perusahaan. Dengan demikian, ketika lulus dari jenjang ini siswa memiliki kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menentukan pilihan, apakah akan melanjutkan ke universitas atau memperdalam keterampilan/ keahliannya ke berbagai akademi/sekolah tinggi kejuruan yang sesuai.

Sejalan dengan hal tersebut, Brodjonegoro (2016) menyampaikan pemikiran tidak perlu ada SMK, cukup SMA saja, namun pada jenjang SMA ini dibuka peminatan bagi siswa sesuai bakat dan kapasitasnya. Konsekuensinya, penjurusan di SMA sebaiknya ditiadakan, karena pada usia semuda itu siswa belum mampu menentukan masa depannya. Dengan demikian, juga tidak akan ada lagi dikotomi antara SMA dengan SMK, yang dimata masyarakat (otangtua) selama ini cenderung memposisikan SMK lebih rendah. Namun, seandainya SMK ingin tetap dipertahankan keberadaannya, semestinya ada reformasi total dimana SMK harus benar-benar spesifik, unik, dan menjanjikan keahlian khusus yang dibutuhkan masyarakat (DU/DI). Karena keunikannya, SMK harus memiliki keluwesan

mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas (global), Hendarman (2015) merekomendasikan pendidikan kejuruan harus ditempatkan sebagai prioritas menuju pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan kesepakatan ASEAN (MEA) untuk saling berbagi pengetahuan, menyelaraskan sistem pendidikan dengan negosiasi atas persamaan pengakuan dan membuka peluang bagi pasar kerja yang lebih terbuka, sehingga memungkinkan tersedia dan terpenuhinya tenaga kerja masa depan yang lebih siap.

Kedepan, konsep sekolah kejuruan merupakan sebuah layanan pendidikan yang dalam proses pembelajarannya (teori dan paktik dasar) dilakukan di sekolah dan pembelajaran produktif dilakukan di dunia usaha dan dunia industri (DU/DI). Kurikulum pembelajaran produktif berorientasi pada *supplay demand*, artinya materi produktif disusun bersama pihak sekolah dengan pihak industri mengacu pada SKKNI.

Materi pembelajaran (normative dan adaptif) perlu dilakukan pengurangan jumlah jam pelajaran/minggu dan pengurangan dari jam pelajaran nuntuk menambah jam pelajaran normatif dan adaptif ditambahkan untuk mata pelajaran produktif. Kolaborasi tersebut dilakukan atas dasar saling menguntungkan bagi para pihak (sekolah dan DU/DI)

## **2. Tenaga Pendidik**

Dalam pengembangan SMK 4 tahun, pada dasarnya memang tidak ada kaitan langsung dengan penambahan guru. Isu kekurangan guru, khususnya guru mata pelajaran produktif, pada satuan pendidikan SMK merupakan masalah “kronis” yang sepertinya tidak kunjung terselesaikan. Upaya pemenuhan kekurangan guru produktif terasa lebih berat dibanding guru normatif maupun guru adaptif, mengingat tuntutan kompetensi untuk guru produktif sangat spesifik sesuai dengan bidang keahliannya. Penambahan masa studi menjadi 4 tahun juga tidak

langsung berimplikasi pada penambahan guru, dengan asumsi prakerin dilaksanakan hanya pada tahun keempat. Akan berbeda halnya jika masa studinya dijadikan 4 tahun namun prakerinnya tidak dilaksanakan sepenuhnya, dilaksanakan hanya pada semester 7 dan 8 saja (tahun keempat), tetapi terdistribusi pada semester-semester lainnya . Masa prakerin yang terdistribusi mulai awal semester 3, berpotensi terjadi dengan terbitnya Inpres No 9/2016 yang mendorong peningkatan peran DU/DI terhadap penyelenggaraan prakerin. Konsekuensi yang akan muncul terkait dengan hal tersebut yaitu meningkatnya kapasitas pendampingan guru (terutama guru produktif) kepada siswa, sejalan dengan tujuan perpanjangan masa studi yang ada untuk “mencetak” lulusan SMK yang benar-benar siap kerja di bidang keahliannya masing-masing. Secara proporsional idealnya jumlah guru produktif lebih besar dibanding guru normatif maupun guru adaptif, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian Mulyadi, dkk (2010) sebagaimana tetera pada Tabel 6 berikut.

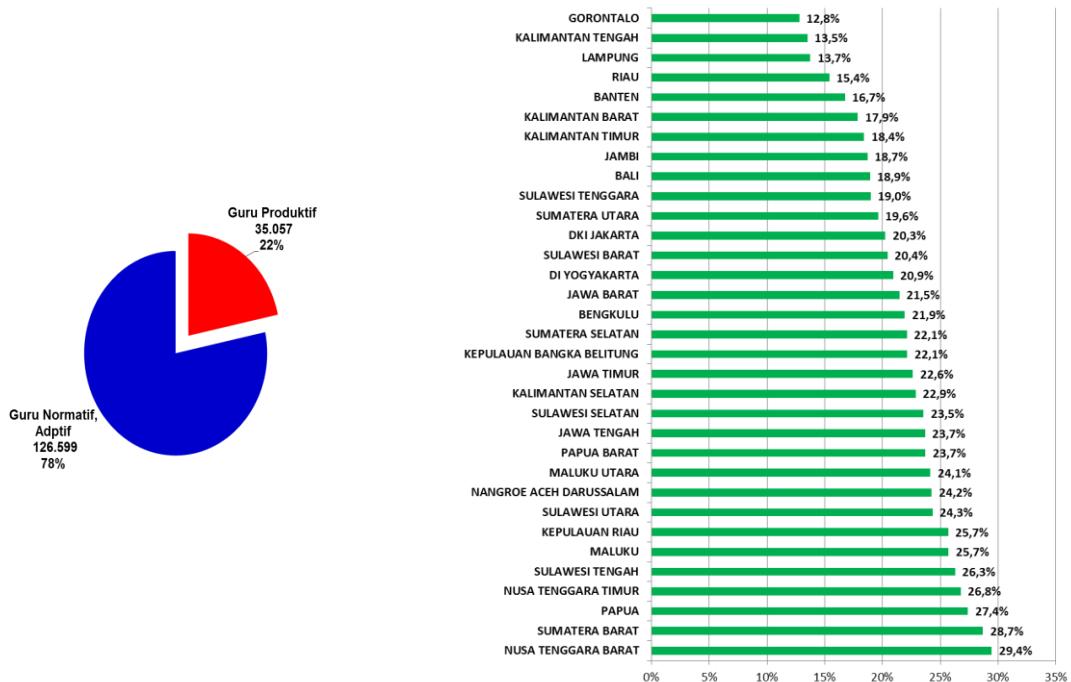
Tabel 6. Jumlah dan Rasio Guru: Siswa per Kelompok Mata Pelajaran Berdasarkan Jumlah Jam Mengajar Guru dan Jumlah Program Keahlian (PK)

Jam Wajib Mengajar	Kelompok Mata Pelajaran	Jumlah Guru		Rasio Guru : Siswa	
		2 PK	3 PK	2 PK	3 PK
18 jam/minggu	Normatif	5	9	1 : 86	1 : 72
	Adaptif	13	20	1 : 33	1 : 32
	Produktif	<b>26</b>	<b>39</b>	<b>1 : 17</b>	<b>1 : 17</b>
24 jam/minggu	Normatif	5	8	1 : 86	1 : 81
	Adaptif	10	16	1 : 43	1 : 41
	Produktif	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>1 : 24</b>	<b>1 : 27</b>

Sumber : Mulyadi dkk (2010)

Mengacu kepada harapan kondisi ideal di atas, hingga sekarang ini kekurangan guru produktif masih menjadi hambatan besar dalam upaya pengembangan pendidikan menengah kejuruan. Hal itu ditunjukan pada kondisi

eksisting persentase guru produktif terhadap guru normatif saat ini untuk tingkat nasional dan masing-masing provinsi sebagaimana ditunjukan pada Gambar 5 berikut.



Sumber : Dit. PSMK (2016)

Gambar 5. Persentase Guru Produktif terhadap Guru Normatif pada SMK

Melihat gambaran ketercukupan guru produktif di atas, bisa dimengerti jika upaya pengembangan SMK hingga saat ini masih cukup jauh dari apa yang diharapkan. Mencermati persentase guru produktif pada setiap provinsi saja, baru 17 provinsi (50 persen) yang memiliki tingkat persentase guru produktif terhadap guru normatif di atas rerata nasional, padahal rerata nasional saja baru mencapai 22 persen. Harian Kompas edisi 19 Oktober 2016 mengungkap saat ini Indonesia kekurangan guru produktif untuk SMK hingga 91.861 orang (Kompas, Oktober 2016). SMK swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding SMK negeri (10.084 sekolah) mengalami kekurangan guru produktif sebanyak 5.000 orang. Sementara SMK negeri yang berjumlah 3.468 sekolah mengalami kekurangan

guru produktif hingga 41.861 orang. Kekurangan secara lebih rinci untuk beberapa jenis paket keahlian berturut-turut yaitu 6.381 orang untuk teknik komputer jaringan, 3.589 orang untuk teknik kendaraan ringan, 2.132 orang untuk agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, 1.226 orang untuk akomodasi perhotelan, dan 1.091 orang untuk agribisnis tanaman perkebunan.

Berangkat dari fakta kesenjangan tersebut, menjadi pertanyaan besar dan sangat penting terhadap ketercapaian target terbentuknya 500 SMK 4 tahun pada akhir tahun 2016 ini sebagaimana tertuang dalam dokumen *Grand Design* Pendidikan Kejuruan 2015-2030. Belum lagi menurut Deputi Pendidikan dan Agama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemerintah sedang berupaya meningkatkan rasio SMK terhadap SMA hingga 60 : 40, dari kondisi eksisting saat ini yang baru hampir mencapai rasio 50 : 50. (Kompas 17 Oktober 2016). Artinya, hal tersebut menuntut konsekuensi harus segera disiapkan pula sejumlah besar guru, utamanya guru produktif, untuk SMK-SMK yang akan segera didirikan. Kalaupun target tersebut dianggap terlalu ambisius dan karenanya perlu diberikan tambahan waktu antara 1-2 tahun, maka beberapa langkah terobosan (strategis) tidak bisa tidak mesti segera dilakukan dalam hal rekrutmen guru, utamanya guru produktif ini. Berbagai alternatif solusi yang hingga saat telah dicoba ini yaitu:

**a. Program alih tugas dan program alih fungsi/spesialisasi**

Program alih tugas pada intinya ialah pemerataan kebutuhan guru produktif dengan mendistribusikan guru dari sekolah/daerah yang kelebihan guru produktif ke sekolah/daerah yang kekurangan guru produktif. Adapun program alih fungsi/spesialisasi yaitu mutasi bidang keahlian yang diampu oleh seorang guru menjadi bidang keahlian kelompok produktif, baik dari kelompok non produktif (normatif dan adaptif) maupun dari kelompok produktif itu sendiri. Alih fungsi/spesialisasi ini tentu saja melalui proses uji kompetensi/keahlian hingga

sertifikasi. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata (Kompas, 19 Oktober 2016), menyatakan untuk mengatasi kekurangan tersebut antara lain akan dilakukan alih fungsi guru yang ada. Program alih fungsi yang diperkirakan mampu menyediakan sekitar 30.000 orang guru produktif hingga tahun 2017 nanti, rinciannya adalah hasil seleksi dari (i) guru SMA pengampu mata pelajaran PPKn; Biologi; Fisika; Kimia; Geografi; Ekonomi; Antropologi; dan bahasa asing sejumlah 10.609 orang, (ii) guru-guru SMA dan SMK terdampak penerapan Kurikulum 2013 pengampu mata pelajaran TIK; IPA; IPS; Kewirausahaan; serta Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) sebanyak 13.993 orang, dan (iii) guru SMK pengampu mata pelajaran PKN; Matematika; dan Seni Budaya sebanyak 4.780 orang. Sementara hingga tahun 2019 akan direkrut pula guru produktif baru sebanyak 61.861 orang.

Saat ini Ditjen GTK sedang menyiapkan program alih fungsi guru produktif dengan cara memberi kesempatan kepada guru adaftif berdasarkan potensi dan minat untuk diberi keterampilan kejuruan tertentu selama kurang lebih satu tahun. Kelemahan pola ini antara lain penguasaan kompetensi “produktif” manakala penyelenggaraan PPG dilakukan secara masal, akibatnya antara kualitas dan kuantitas tidak pernah tercapai.

Program ini diperuntukkan dalam upaya meminimalis kekurangan guru produktif dan diperkirakan sampai dengan tahun 2019. Pemenuhan kekurangan guru produktif karena purna tugas (pensiun) mengharapkan dari lulusan LPTK. Oleh karena itu, profil lulusan guru LPTK harus berorientasi pada kompetensi industri dan SKKNI.

## b. Program pendampingan SMK

Program ini merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan LPTK dengan bentuk kegiatan (i) PPL pendampingan guru produktif (*Talentscouting*), LPTK menugaskan mahasiswa tingkat akhir untuk

PPL di SMK yang membutuhkan guru selama 6 bulan; (ii) Sarjana mengajar, LPTK menugaskan lulusannya untuk mengajar selama 6 bulan di SMK; dan (iii) Pendampingan SMK, LPTK menugaskan lulusannya untuk mengajar selama 12 bulan di SMK (Ditjen GTK, 2016).

Program ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas calon lulusan LPTK melalui PPL sehingga penguasaan kompetensi profesional meningkat. Pendekatan ini setara dengan pola pendekatan bagi guru “baru” yang baru diangkat dan ditempatkan di suatu sekolah sebelum diberi tugas mengajar berkewajiban untuk praktik mengajar di sekolah.

#### c. **Rekrutmen/*Outsourcing* tenaga ahli/terampil dari DU/DI**

Pengadaan guru produktif melalui jalur ini terutama dikarenakan alasan guru dengan bidang keahlian yang dibutuhkan tidak dihasilkan oleh LPTK. Umumnya sekolah-sekolah yang menempuh jalur ini yaitu mereka yang telah bermitra atau mempunyai hubungan kerja yang baik dengan DU/DI. Atas dasar kemitraan atau hubungan baik itu, dibuat kesepakatan secara formal ataupun informal dimana pihak DU/DI akan menugaskan karyawannya untuk mengajar di SMK sesuai dengan keahlian dan jangka waktu yang dibutuhkan. Hal tersebut menunjukan rekrutmen guru dari kalangan DU/DI ini tidak melulu berarti tenaga ahli tersebut memulai karir baru sebagai guru di SMK dan menghentikan karirnya di DU/DI.

Menurut kalangan dunia industri, peluang melibatkan tenaga-tenaga ahli mereka baik sebagai guru maupun pelatih bagi guru dan calon guru sangat terbuka, karena aktifitas tersebut juga dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. Dalam pemahaman manajemen mereka, melibatkan staf pada kegiatan-kegiatan diluar rutinitasnya dapat berdampak positif menyegarkan pikiran, karena menantang mereka melakukan kegiatan yang berbeda dari biasanya walau masih berhubungan dengan pekerjaan sehingga tidak merasa jemu. Tantangan tersebut juga akan menumbuhkan sikap empati dan berpikir kreatif, kesadaran memiliki

peran yang tidak kecil dan berpeluang memaksimalkannya, dan pada akhirnya secara bertahap akan meningkatkan kinerjanya di perusahaan. Disamping itu, tidak sedikit profesional di DU/DI yang secara pribadi membutuhkan “sarana” aktualisasi tanggung jawab sosialnya, dalam bentuk keinginan memberikan sumbangsih berupa keterampilan/keahlian yang mereka miliki kepada dunia pendidikan (sekolah).

Poin penting yang ingin dinyatakan dalam konteks ini yaitu rekrutmen guru produktif dari DU/DI jangan hanya sebatas sebagai sebuah alternatif, tetapi benar-benar dapat diformalkan sebagai salah satu jalur rekrutmen guru SMK, khususnya guru-guru dari kelompok mata pelajaran produktif, terlebih untuk bidang keahlian yang belum/tidak diselenggarakan di LPTK. Artinya jika pada umumnya mekanisme yang dilakukan selama ini yaitu dalam bentuk kesepakatan (formal maupun informal) antara sekolah (SMK) dengan DU/DI, maka untuk kepentingan yang lebih strategis dalam rangka pengembangan SMK, utamanya SMK 4 tahun, perlu dibuatkan payung hukum yang lebih komprehensif. Mekanismenya yaitu dengan melibatkan institusi-institusi yang mempunyai kewenangan sebagai regulator dan fungsi pembinaan pada sektor-sektor terkait, yaitu pendidikan (Kemendikbud), ketenagakerjaan (Kemenakertrans), perindustrian (Kemenperin), dan perdagangan (Kemendag). Tentu saja pada masing-masing sektor tersebut secara khusus perlu juga dilibatkan badan/lembaga otonom terkait seperti BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan), BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri).

Kata kunci yang ingin dilontarkan dari uraian tentang rekrutmen guru produktif di atas ialah, tindakan nyata melakukan terobosan/intervensi terhadap panjangnya alur birokrasi akibat begitu banyaknya peraturan perundangan, yang terkadang berujung pada situasi yang tidak kondusif. Namun demikian, tentu saja

ketepatan intervensi yang diputuskan juga menjadi prioritas, agar tidak “bertabrakan” dengan peraturan perundangan yang *nota bene* masih berlaku.

Pola rekrutmen cara ini dilakukan dengan mempertimbangkan asas saling menguntungkan para pihak. Di samping itu, rekrutmen guru produktif ini dapat dilakukan dengan cara “kontrak kerja” dengan DU/DI dalam kurun waktu tertentu, misalnya minimal 1 tahun dan bila mana kinerja guru dari DU/DI hasil kinerjanya baik dapat diperpanjang sesuai Kebutuhan sekolah.

#### d. PPG calon guru produktif

Dalam upaya semakin memperluas akses pengadaan guru produktif, Kemendikbud juga tengah menjalin kerjasama dengan Kemristek Dikti dan LPTK untuk menyelenggarakan PPG bagi calon guru SMK khusus untuk kelompok mata pelajaran produktif. Dalam konteks ini, perlu ditetapkan berapa lama calon guru SMK akan mengikuti pendidikan di PPPG sesuai dengan bidang keahlian/latar belakang pendidikannya. Selain itu, calon guru produktif yang dididik melalui PPPG perlu juga memiliki pengalaman magang industri. Atas dasar kondisi guru produktif saat ini, dirasa perlu untuk merumuskan “profil guru produktif” sekurang-kurangnya, sebagai berikut:

- Minimal berkualifikasi pendidikan sarjana satu (S1)
- Memiliki pengalaman industri (magang industri)
- Memiliki sertifikat profesi guru produktif yang dikeluarkan oleh LSP yang kompeten
- Memiliki surat keterangan lulus uji sertifikasi pendidik
- Menguasai kompetensi pendidik secara utuh (pedagogik, sosial, individual, dan profesional) sesuai dengan ketentuan UU Nomor 20 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

### **3. Prakerin**

Masalah paling mendasar dalam prakerin yang perlu segera diatasi adalah jaminan ketersediaan tempat pelaksanaan prakerin yang tepat, artinya benar-benar sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajari siswa. Dapat dikatakan pada titik inilah konsep *link and match* sudah dapat ditentukan apakah akan terwujud atau tidak?. Tentu saja ini bukan persoalan yang mudah, mengingat kondisi ketidak selaras yang terjadi selama ini antara SMK dengan DU/DI sudah sedemikian “lebar”. Sebagaimana fenomena yang banyak terjadi di berbagai daerah, program-program dan paket keahlian yang “dibuka” dan diselenggarakan oleh SMK justru tidak sepenuhnya mengacu/selaras dengan potensi daerah dan/atau kebutuhan DU/DI yang terdapat di daerah tersebut. “Pembukaan” SMK dengan bidang-bidang keahlian yang kurang selaras dengan potensi dan kebutuhan daerah itu banyak terjadi pasca berlakunya otonomi daerah, dimana sektor pendidikan termasuk bidang yang paling banyak mendesentralisasikan urusan pendidikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Kondisi tersebut diakui sendiri oleh kalangan sekolah, yang dalam hal ini semakin merasakan dampaknya yaitu kesulitan mencari tempat prakerin yang tepat/sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajari siswanya. Tidak sedikit siswa yang “terpaksa” melaksanakan prakerin di bidang atau kegiatan yang sama sekali tidak berhubungan dengan bidang keahlian yang dipelajarinya di SMK, misalnya pengantar surat, pencatat inventaris barang, atau bahkan petugas photocopy.

Kondisi timpangnya keselarasan antara SMK dengan DU/DI tersebut di atas, masih “diperberat” dengan adanya persepsi di kalangan DU/DI pada umumnya selama ini yang merasa:

- a. Kurang harmonisnya hubungan dengan SMK (sekolah) dengan DU/DI, sehingga DU/DI tidak mengerti apa yang harus mereka perbuat untuk berkontribusi kepada SMK,

- b. Selama pelaksanaan prakerin tidak ada komunikasi dan evaluasi bersama tentang kegiatan prakerin siswa antara SMK dengan DU/DI, tidak ada pesan/aturan/catatan dari pihak SMK sehingga mereka “tidak tahu harus diapakan” siswa-siswa yang sedang prakerin tersebut?, dan
- c. Tidak/belum ada *revenue* (nilai keuntungan) yang berarti bagi DU/DI dari pelaksanaan prakerin di tempat mereka. Padahal seringkali DU/DI harus menyiapkan peralatan-peralatan yang mahal untuk prakerin siswa SMK.

Dalam konteks pengembangan SMK 4 tahun, praktik kerja di industri selama 3-6 bulan yang hingga kini berlaku di SMK dengan masa studi 3 tahun dirasakan belum memadai. Tujuan untuk mengenalkan siswa kepada masalah-masalah praktis dalam bidang keahlian yang dipelajarinya sehingga diharapkan siap kerja ketika lulus, dinilai banyak kalangan terkait (terutama dunia industri) sulit untuk tercapai jika hanya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat tersebut. Terlebih lagi untuk bidang-bidang keahlian yang banyak bersentuhan dengan pemanfaatan teknologi dan rekayasa (*engineering*), yang belakangan ini makin pesat perkembangannya. Hal tersebut jelas membutuhkan durasi pelaksanaan prakerin yang lebih panjang, dimana secara empiris sudah ditunjukkan pada kegiatan prakerin oleh siswa-siswa SMK 4 tahun. Dengan demikian, tujuan agar siswa mendapatkan bekal pengalaman kerja nyata dibidang keahlian yang dipelajarinya, akan jauh lebih mudah terwujud. Hal inilah yang terutama mendasari perlunya dikembangkan penyelenggaraan SMK 4.

Seorang profesional karir di DU/DI (industri makanan olahan) yang mengawali karirnya sebagai lulusan SMK 4 tahun, menyatakan durasi masa studinya yang lebih panjang dari lulusan SMK lainnya (SMK 3 tahun) sangat dirasakan menjadi keunggulan tidak saja ketika memasuki dunia kerja tetapi juga ketika melanjutkan pendidikan untuk peingkatan karirnya. Selain itu, penerapan disiplin pembelajaran yang ketat dalam masa studi yang lebih panjang telah membentuk karakter yang kuat, yang merupakan keunggulan dan investasi yang

sangat berharga bagi lulusan SMK 4 tahun ketika bersaing memasuki dunia kerja. Bagi industri, penerimaan prakerin bagi siswa SMK 4 tahun ini cukup potensial untuk dimanfaatkan sebagai “peluang” merekrut calon tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang diinginkan.

#### **4. Penataan dan Penyelarasan Bidang Keahlian**

Kalangan DU/DI masih merasa belum menjadi satu kesatuan sistem dengan dunia pendidikan, jika pun ada jumlahnya sangat kecil. Sebagian diantaranya bahkan berani mengklaim bahwa konsep *link and match* saat ini sudah “mati suri”. Pendirian SMK di banyak daerah hampir tidak lagi memperhatikan bidang-bidang keahlian apa yang sesungguhnya dibutuhkan, terkait dengan keberadaan industri di wilayah setempat. Dalam “pengamatan” mereka, kebanyakan SMK tidak tahu DU/DI apa saja di daerah bersangkutan yang sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan/diselenggarakan oleh SMK-SMK tersebut. Hal itu mengakibatkan sebaran DU/DI dengan SMK tidak sepadan. Menjadi pertanyaan penting apakah sekolah (bahkan mungkin Direktorat PSMK) memiliki peta tentang DU/DI menyangkut jenis, jumlah, tingkat, dan aspek-aspek lain terkait kerjasama dengan SMK-SMK yang ada? Hal ini sangat dibutuhkan sebagai langkah awal upaya penataan dan penyelarasan (harmonisasi) antara SMK dengan DU/DI.

Selanjutnya, baik kalangan DU/DI maupun sekolah sepakat menyatakan setelah penataan dan penyelarasan dilakukan harus diikuti dengan kegiatan monev (monitoring dan evaluasi) yang kontinyu. Hal ini bertujuan untuk secara periodik memantau dan memastikan keseimbangan *link and match* antara dunia pendidikan pada sisi *supply* dengan DU/DI pada sisi *demand*. Kegiatan monev ini menjadi terasa penting mengingat di sisi *supply* dunia pendidikan (sekolah) harus memiliki daya sesuai yang tinggi terhadap dinamika yang terjadi di sisi *demand* dari DU/DI. Pada kenyataannya dinamika DU/DI sangat tinggi, karena harus selalu merespon tingginya dinamika tuntutan kepuasan masyarakat yang menjadi konsumennya.

Sebagai konsekuensinya DU/DI dituntut untuk selalu mampu menggunakan sistem dan teknologi produksi yang semakin “canggih”, yaitu yang tidak saja semakin efektif hasilnya tetapi juga semakin efisien dalam penggunaan sumber daya. Dalam konteks inilah, sekolah harus selalu mampu menyesuaikan agar dapat menyediakan (*supply*) SDM yang ideal bagi DUDI. SDM yang ideal itu adalah SDM yang tepat dalam hal kualitas, kuantitas, tempat/lokasi, dan waktu sesuai yang dibutuhkan oleh DU/DI.

## 5. Sarana dan Prasarana

Sangat sulit di bantah bahwa arah pendidikan menengah kejuruan (SMK) di Indonesia saat ini masih *supply driven*. Artinya penyelenggaraan pendidikan kejuruan hanya merujuk pada SMK saja, dan penyelenggaraan SMK berjalan sendiri-sendiri. Sehingga jika meminjam istilah *link and match*, hubungan dengan DU/DI sangat lemah. Padahal keberadaan dan peran DU/DI dalam penyelenggaraan SMK mutlak adanya, karena tidak hanya sebagai pengguna lulusan tetapi bahkan lebih penting lagi ikut menyiapkan siswa pada tahapan Prakerin agar benar-benar terampil dan bermental siap kerja sesuai bidang keahliannya. BNSP, sebagai lembaga yang secara eksplisit mendapat instruksi langsung dari presiden untuk ikut merevitalisasi SMK (Inpres No. 9/2016), telah menindaklanjuti instruksi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan mengubah arah pendidikan kejuruan menjadi *demand driven* atau merujuk kepada kebutuhan DU/DI. Kebijakan tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk program penyelenggaraan SMK secara terintegrasi dengan DU/DI, yang bertujuan untuk memperkuat konsep *link and match* antara SMK dengan DU/DI dalam hal kurikulum; praktik; pengujian; dan sertifikasi. Khusus untuk kegiatan praktik, program ini menetapkan alokasinya harus mencapai 70 persen dari keseluruhan kegiatan pembelajaran, dimana sebagian besarnya dilakukan di DU/DUI pada tahap Prakerin. Dengan pelaksanaan program ini, keuntungan yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak yang “berkepentingan” yaitu:

- a. DU/DI; mendapatkan calon tenaga kerja terbaik sesuai kebutuhan, lebih loyal, dan lebih efisien karena tidak perlu melakukan training lagi kepada karyawan baru
- b. Siswa; mendapatkan kemahiran kerja mutakhir (*occupational proficiency*), pendidikan karakter (etos dan budaya kerja), dan sertifikat kompetensi
- c. Sekolah; efisiensi sumberdaya (guru/instruktur, alat/bahan, bengkel praktik).

Kebijakan dengan program tersebut di atas terutama dilatar belakangi oleh fakta rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (dalam hal ini peralatan praktik dan fasilitas pembelajaran) yang dimiliki oleh hampir seluruh SMK yang ada saat ini. Kalaupun ada sebagian kecil SMK yang dinilai cukup memadai kepemilikan bahan dan peralatan praktiknya (mesin, laboratorium, bengkel), pada umumnya teknologinya tertinggal jauh dari yang digunakan oleh DU/DI. Selain itu, secara teoritis dapat pula difahami bahwa betapapun pemutakhiran peralatan praktik di SMK selalu terus diupayakan, tidak akan mampu untuk menyamai secara utuh dengan apa yang digunakan di DU/DI. Kasus di sebagian SMK yang menjadi sampel penelitian ini menunjukan berbagai peralatan praktik, mesin, bengkel dan laboratorium yang digunakan rata-rata merupakan hasil pengadaan lebih dari 1 dekade yang lalu. Sehingga ada SMK yang menyelenggarakan program keahlian Kesehatan Hewan terpaksa harus membawa siswanya (dengan pergiliran kelompok) ke laboratorium pemeriksaan kesehatan hewan di luar kota, karena belum memiliki peralatan yang diperlukan untuk praktik pengambilan dan pemeriksaan darah hewan. Padahal SMK-SMK tersebut mempunyai reputasi sebagai SMK yang “berpredikat” sangat baik untuk masing-masing program keahlian yang diselenggarakannya, yaitu program keahlian Pelayaran Kapal Penangkap Ikan,Kesehatan Hewan, Pengolahan Hasil Pertanian, Tata Busana, dan Teknologi Konstruksi dan Properti.

Kondisi sarana dan peralatan praktik pada SMK-SMK yang tergolong berpredikat sangat baik tersebut di atas, mengindikasikan keadaan sarana dan peralatan praktik yang lebih rendah lagi kuantitas dan kualitasnya di SMK pada umumnya. Akibatnya pembelajaran dalam bentuk praktik masih sangat jauh dari proporsi ideal sebagaimana yang diharapkan di atas. Hasil analisis Glockauer (2016), Direktur Kamar Dagang dan Industri Trier-Jerman, terhadap kondisi pendidikan kejuruan di Indonesia menyimpulkan (i) muatan praktik dalam pendidikan kejuruan kurang atau terlalu sedikit, (ii) pendidikan kejuruan praktis hanya berlangsung di sekolah karena porsi magang umumnya tidak sampai 9 persen dari keseluruhan masa pendidikan, (iii) guru sekolah kejuruan kekurangan kualifikasi untuk mengajarkan materi yang berorientasi praktik, dan (iv) materi dan profesi yang diajarkan tidak sinkron dengan harapan DU/DI.

## **6. Pelibatan Ekosistem Pendidikan Kejuruan**

Keberadaan DUDI dalam penyelenggaran pendidikan menengah kejuruan (SMK) merupakan unsur elementer. Artinya tidak mungkin penyelenggaraan SMK dapat dikatakan berhasil tanpa ada keterlibatan DU/DI, atau setidaknya keterkaitan dengan DU/DI. Sebab bagaimana tidak?, tolok ukur utama keberhasilan SMK adalah keterserapan lulusannya pada DU/DI. Terlebih lagi dalam pembelajaran dengan sistem ganda (*dual system*) yang digunakan dalam pendidikan kejuruan, peran DU/DI tidak hanya menyerap lulusan SMK saja tetapi juga ikut terlibat aktif menyiapkan lulusan agar benar-benar menjadi tenaga kerja terampil (ahli) dan profesional di bidangnya. Namun demikian, keberhasilan penyelenggaraan SMK sebenarnya tidak semata-mata hanya tergantung pada keterlibatan dua pihak itu (SMK dan DU/DI) saja, tetapi pada faktanya juga terdapat pihak/komponen lain yang ikut menentukan keberhasilan tersebut, sehingga membentuk sebuah “ekosistem”. Dalam ekosistem pendidikan menengah kejuruan, selain SMK dan DU/DI sebagai komponen utamanya, terdapat berbagai komponen/unsur lain yaitu

Pemerintah/Pemerintah Daerah, Asosiasi DU/DI (Kadin/Kadinda), Lembaga Sertifikasi, Asosiasi Profesi/Keahlian, dan Masyarakat.

Dalam konteks pengembangan SMK 4 tahun sebagai bagian dari revitalisasi SMK dan penguatan daya saing lulusannya, sinergitas peran dari semua komponen dalam ekosistem pendidikan menengah kejuruan tersebut secara optimal mutlak diperlukan. Sinergitas peran sesuai tupoksi/kewenangan masing-masing itu haruslah merujuk kepada kebutuhan DUDI, sesuai dengan perubahan *mindset* pendidikan kejuruan dari *supply driven* menjadi *demand driven*. Dari perspektif pengelolaan di tingkat sekolah, SMK perlu terus diberdayakan dan didorong untuk semakin mampu menarik keterlibatan komponen-komponen tersebut di tingkatan wilayahnya, untuk kemudian mensinergikannya. Sinergi itu tidak hanya dalam rangka mencapai tujuan “jangka pendek” yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan DU/DI, tetapi lebih dari itu mewujudkan fungsi ideal SMK yang selain sebagai lembaga pendidikan menengah kejuruan, juga sebagai Pusat Pelatihan dan Pengembangan Bahan Pelatihan, TUK, LSP, dan Unit Produksi (*Teaching Factory*).

Pada sebagian SMK sampel penelitian ini, langkah rintisan ke arah hal tersebut di atas sudah terlihat. SMK penyelenggara paket keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia di kabupaten Klaten misalnya, berhasil melakukan peningkatan sarana prasarana (perluasan lahan, penambahan ruang, dan pembangunan kandang) dengan melibatkan peran pemerintah kabupaten dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Kemudian membangun kemitraan dengan DU/DI untuk mendapatkan tempat prakerin bagi siswanya, dengan “*bargaining*” menyediakan kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi/keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh DU/DI. Selain itu, dari hasil kemitraan dengan salah satu mitra DU/Dinya, SMK ini juga pernah mendapatkan bantuan peralatan praktik dari mitra DU/DI tersebut. Pada SMK penyelenggara paket keahlian Teknik Gambar Bangunan di kota Surabaya, kemitraan dengan beberapa

DU/DI yang telah dijalin sejak lama tidak saja membawa “jaminan” untuk diterima bekerja bagi siswa peserta Prakerin di DU/DI tersebut, tetapi DU/DI juga bersedia untuk memberikan honor/uang saku bagi siswa peserta Prakerin tersebut. Pada kasus SMK di kota Surabaya ini pihak perusahaan melakukan seleksi untuk siswa-siswi yang akan melaksanakan Prakerin di perusahaan tersebut, karena setelah pelaksanaan Prakerin dan siswa menyelesaikan masa studinya (lulus) akan langsung direkrut menjadi karyawan.

Hasil kinerja ekosistem pendidikan kejuruan yang lebih baik lagi tampak di kabupaten Cirebon. Salah satu SMK penyelenggara program keahlian Pelayaran Kapal Penangkapan Ikandi kabupaten ini telah lama menjalin kemitraan dengan beberapa perusahaan penangkapan ikan dari luar negeri (umumnya Jepang dan Korea Selatan), dengan melibatkan peran Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Dalam kemitraan tersebut perwakilan perusahaan secara periodik langsung melakukan seleksi terhadap siswa-siswi yang akan magang, kemudian memberikan pelatihan berupa kemampuan bahasa (sesuai negara asal perusahaan) dan beberapa keterampilan terkait budaya kerja perusahaan. Buah dari kemitraan itu adalah setiap tahun hampir semua siswa SMK tersebut diterima magang pada mitra DU/Dinya rata-rata selama 1 tahun, dengan memperoleh gaji dan fasilitas standar internasional. Disamping itu, sekolah juga sering mendapatkan bantuan sarana dan fasilitas pembelajaran seperti peralatan praktik/laboratorium, pemesinan, dan bahkan kendaraan ringan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil analisis (pembahasan) temuan penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal mengenai kompetensi dan masa studi, penghargaan terhadap lulusan, dan pengelolaan sekolah.

#### **1. Kompetensi dan Masa Studi**

Kompetensi lulusan SMK dan masa studi atau lama pembelajaran mempunyai hubungan yang erat. Logika berfikir yang digunakan adalah untuk menguasai seluruh kompetensi yang disyaratkan harus dimiliki oleh lulusan diperlukan waktu pembelajaran tertentu. Kompetensi yang harus dikuasai dan konsekuensi terhadap masa studi cukup beragam antar paket keahlian yang dikaji. Berikut disajikan simpulan untuk masing-masing dari kelima paket keahlian.

##### **a. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan**

Tuntutan kebutuhan DU/DI akan tenaga kerja lulusan SMK yang tidak hanya menguasai kompetensi-kompetensi untuk keahlian pengawasan mutu hasil pertanian/perikanan saja, tetapi juga sekaligus menguasai kompetensi-kompetensi untuk keahlian pengolahan hasil pertanian/perikanan, menjadikannya layak untuk dipertimbangkan masa studinya menjadi 4 tahun. Penggabungan kedua jenis keahlian ini akan menghasilkan lulusan dengan keahlian sebagaimana yang dibutuhkan oleh DU/DI, yaitu keahlian dalam hal pengolahan dan keahlian dalam hal pengawasan mutu hasil pertanian/perikanan. Dengan penggabungan ini maka nama Paket Keahliannya menjadi Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian/Perikanan.

Selain karena tuntutan kebutuhan DU/DI sebagaimana tersebut di atas, alasan selanjutnya Paket Keahlian ini layak dikembangkan masa studinya menjadi 4 tahun adalah jumlah jam pelajaran untuk menguasai kedua jenis keahlian tersebut tidak cukup apabila hanya dialokasikan waktu belajar selama tiga tahun. Tanpa penambahan jumlah jam pelajaran maka penguasaan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk kedua jenis keahlian yang digabungkan tersebut tidak akan tercapai. Kekurangan waktu belajar ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kekurangan waktu belajar akibat pengurangan alokasi waktu pada kurikulum terbaru dan kekurangan waktu belajar yang terjadi bukan karena pengurangan, tetapi alokasinya dari awal memang sudah tidak memadai. Kekurangan waktu belajar akibat pengurangan alokasi waktu ini dicontohkan pada materi analisis produk yang sebelumnya pada Kurikulum 2006 diberikan selama 4 semester, kemudian pada Kurikulum 2013 berkurang menjadi 2 semester. Sementara kekurangan waktu belajar yang bukan karena pengurangan, yaitu karena perencanaannya kurang tepat, dicontohkan pada pembelajaran TIK dan pembentukan karakter.

**b. Kesehatan Hewan**

Pada kompetensi keahlian ini terdapat pendapat yang berbeda antara pihak calon pengguna lulusan dan sekolah dengan alasan yang berasal dari sudut pandang yang berbeda. Calon pengguna lulusan, yaitu DUDI, memandang dari sisi tingkat kompetensi lulusan, sementara sekolah memandang dari sisi minat orang tua menyekolahkan anaknya ke paket keahlian ini.

Menurut kalangan DU/DI, agar kompetensi lulusan paket keahlian ini sesuai dengan kebutuhan nyata dunia kerja dan industri, maka perlu perpanjangan masa studi menjadi 4 tahun. Kompetensi yang perlu ditingkatkan meliputi dua jenis yaitu kompetensi umum dan kompetensi khusus. Kompetensi umum yang perlu ditingkatkan penguasaannya adalah

sikap mental lulusan dalam memasuki dunia kerja. Dari pengalaman merekrut lulusan SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun untuk paket keahlian ini, nampak adanya perbedaan besar dalam sikap mental mereka. Lulusan SMK 4 tahun cenderung memiliki sikap mental yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh dunia kerja untuk dipenuhi oleh lulusan SMK. Sementara itu lulusan SMK 3 tahun cenderung memiliki sikap mental yang belum sesuai dengan harapan dunia kerja.

Kompetensi khusus adalah kompetensi-kompetensi keahlian yang harus dimiliki oleh lulusan, terdiri dari dua kompetensi yang berbeda, yaitu kompetensi dalam hal kesehatan hewan, dan kompetensi dalam hal reproduksi hewan terkait dengan pengembangan keahlian pada paket ini yang akan dijadikan keahlian Kesehatan dan Reproduksi Hewan. Untuk menguasai kedua jenis keahlian tersebut, masa belajar yang hanya 3 tahun dinilai tidak mencukupi. Kompetensi khusus yang perlu ditingkatkan penguasaannya misalnya adalah kompetensi tentang pakan ternak, pemeliharaan sistem basah dan sistem kering, serta prosedur penyuntikan dan pemberian vaksin. Sebagai contoh peningkatan kompetensi tentang pakan ternak dapat diupayakan melalui penambahan materi-materi takaran, frekuensi pemberian, kadar air, penyimpanan, proses pencampuran, dan komposisi.

Kalangan sekolah dan Dinas Pendidikan semula menyatakan tidak perlu dilakukan perpanjangan masa studi menjadi 4 tahun, karena hal itu berdampak pada peningkatan biaya yang cukup besar dan pada gilirannya peningkatan biaya ini menurunkan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke program tersebut. Peningkatan biaya terjadi karena orang tua harus mengeluarkan biaya tambahan yang sangat besar, yaitu secara kasar sebesar 1/3 dari biaya-biaya yang dibayarkan ke sekolah dan biaya pribadi dibanding apabila anaknya dapat menyelesaikan pendidikan di SMK selama

3 tahun. Selain itu juga kesempatan lulusan untuk memasuki dunia kerja terlambat atau mundur selama satu tahun. Nampak jelas bahwa sekolah hanya melihat dampak penambahan masa studi dari minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke program ini yang bermula dari sisi tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Sekolah sendiri tidak menyadari adanya dampak perpanjangan waktu terhadap peningkatan kompetensi siswa yang pada gilirannya pencapaian tingkat kompetensi lulusan tersebut dapat berdampak pada peningkatan kesempatan lulusan untuk memperoleh pekerjaan.

Dengan adanya rencana pengembangan keahlian menjadi Kesehatan dan Reproduksi Hewan, baik kalangan sekolah maupun Dinas Pendidikan akhirnya sepakat dapat menerima penambahan masa studi menjadi 4 tahun. Agar terjadi pemahaman yang sama diperlukan sosialisasi yang komprehensif kepada seluruh komponen para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan terutama terkait dengan peluang yang lebih besar bagi lulusannya untuk lebih cepat mendapatkan pekerjaan.

### c. **Nautika Kapal Penangkap Ikan**

Baik kalangan DU/DI maupun sekolah menilai bahwa penambahan waktu pembelajaran dari 3 menjadi 4 tahun tidak diperlukan untuk Paket Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan. Lulusan paket keahlian ini dinilai oleh DUDI sudah memadai apabila ditinjau dari kompetensi yang diperlukan untuk bekerja pada kapal ikan dalam negeri. Hanya saja untuk bekerja pada kapal penangkap ikan luar negeri, masih diperlukan penguasaan bahasa asing yang digunakan dan penguasaan budaya kerja yang dipakai di negara asal kapal itu. Kebanyakan kapal ikan luar negeri berasal dari Jepang dan Korea. Kompetensi bahasa dan budaya kerja inilah yang belum dikuasai oleh lulusan Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan. Penguasaan bahasa dan budaya kerja negara asing tertentu ini diperlukan untuk mencari

pekerjaan pada kapal ikan asing yang pada umumnya untuk mendapat pekerjaan di kapal ikan asing, lulusan harus magang dulu di kapal itu sebelum diterima sebagai karyawan tetap. Selama ini upaya yang dilakukan lulusan adalah melamar keperusahaan pemilik kapal ikan asing tersebut, kemudian apabila dinilai memiliki kompetensi kerja, lulusan akan berlatih bahasa dan budaya kerja oleh agen perekrutan (perusahaan pemagangan) sebelum naik kapal untuk magang.

**d. Nautika Kapal Niaga**

Lulusan SMK Paket Keahlian Nautika Kapal Niaga masih harus mengikuti tahapan Pra-Prala, dan Prala (praktik berlayar) pada kapal niaga selama 10-12 bulan untuk memperoleh sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV (ANT-IV) yang dipersyaratkan bagi seorang pelaut sesuai standar yang ditetapkan oleh *International Maritime Organization* (IMO). Tanpa sertifikat ini lulusan SMK pada paket keahlian ini tidak akan memperoleh pengakuan sebagai pelaut pada pelayaran kapal niaga. Masalah yang dihadapi lulusan SMK paket keahlian ini adalah sulitnya memperoleh kesempatan untuk mengikuti prala, karena tergantung dari ketersediaan kapal niaga yang “bersedia” menjadi tempat pelaksanaan Prala. Karena kesulitan ini, maka lulusan SMK paket keahlian ini menggunakan sistem “3 plus”, yaitu 3 tahun mengikuti proses pembelajaran di sekolah ditambah dengan waktu maksimal 5 tahun untuk mendapatkan kesempatan mengikuti Prala. Perpanjangan masa studi pada SMK paket keahlian ini dari 3 menjadi 4 tahun, hanya dapat diterima oleh kalangan sekolah apabila pada tahun ke empat siswa benar-benar dijamin akan mengikuti Prala. Sehingga ketika nantinya dinyatakan lulus, otomatis sudah diakui keprofesiannya sebagai pelaut pelayaran niaga.

**e. Tata Busana**

DUDI untuk paket keahlian Tata Busana menyatakan bahwa kompetensi lulusan program tersebut memang belum memadai, namun DUDI

berpendapat bahwa paket keahlian ini tidak perlu diperpanjang masa studinya dari 3 tahun menjadi 4 tahun. Walaupun tingkat kompetensi lulusan belum memadai namun pihak DUDI tidak serta merta menganggap bahwa kekurangan kompetensi tersebut tepat untuk diatasi dengan penambahan tahun pembelajaran. DUDI menyatakan bahwa lulusan paket ini memiliki dua kelemahan, yaitu pada bidang pengetahuan dan bidang keterampilan. Kelemahan di bidang pengetahuan dicontohkan pada materi pembuatan model. Materi pembuatan model yang diberikan kepada siswa adalah materi usang yang sudah tidak digunakan lagi di dunia fashion masa kini. Karena dunia fashion adalah dunia yang berubah dengan cepat, maka seharusnya materi yang diberikan hendaknya memberikan rangsangan kepada siswa untuk memiliki kreatifitas yang tinggi. Setelah siswa diberikan materi dasar pembuatan model hendaknya mereka juga diperkenalkan dengan materi-materi pembuatan model mutakhir yang digunakan di dunia fashion terkini. Kelemahan ini dapat terjadi karena pengetahuan guru yang tidak dimutakhirkan atau karena materi di kurikulum yang memberi kesempatan guru untuk tinggal pada “zona nyaman” dengan pengetahuan yang tidak terkinikan.

Kelemahan di bidang keterampilan menggunakan alat yang digunakan di industri fashion terjadi karena mesin dan peralatan praktik yang digunakan di sekolah sudah terlalu usang dan tidak digunakan lagi di dunia kerja. Sebagai akibatnya lulusan menjadi terasing ketika berada di tempat kerja. Mesin dan peralatan kerja modern yang dihadapinya di dunia kerja merupakan benda yang tidak dikenalinya apalagi mengoperasikan dengan lancar.

Berkenaan dengan kedua alasan tersebut adalah tidak tepat untuk memperpanjang masa belajar di SMK Paket Keahlian Tata Busana dari 3 menjadi 4 tahun. Pendapat ini didukung oleh baik DUDI bidang usaha

*garment* maupun sekolah. Untuk meningkatkan kompetensi lulusan dalam pembuatan model disarankan agar ditambahkan materi-materi yang sesuai dengan kemajuan dunia kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan memutakhirkan pengetahuan guru yang mengampu dan memutakhirkan pendekatan pembelajaran yang kondusif terhadap pengembangan kreatifitas siswa.

Untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK dalam penggunaan mesin dan peralatan kerja lainnya, DUDI menyarankan untuk mengganti mesin dan peralatan kerja pada SMK dengan mesin dan peralatan kerja modern yang digunakan di dunia kerja. Kesenjangan antara tingkat teknologi mesin dan peralatan kerja yang digunakan di sekolah merupakan amsalah usang bagi SMK. Salah satu mekanisme yang diunggulkan untuk menjembatani adalah praktik kerja industri (prakerin). Namun demikian pelaksanaan prakerin menghadapi kendala-kendala berikut. Pertama, jumlah lokasi prakerin tidak sebanyak jumlah siswa yang memerlukannya. Kedua, ada kecenderungan bahwa sekolah tidak memberi informasi kepada DUDI pelaksana prakerin tentang pengetahuan, keetrapilan, dan sikap yang diharapkan untuk dikuasai melalui prakerin. Ke tiga, siswa SMK peserta prakerin masih harus melaksanakan tugas-tugas mapel lain selama melaksanakan prakerin. Hal ini terjadi karena prakerin dan beberapa mata pelajaran teori dilaksanakan dalam satu semester yang sama. Seharusnya ketika siswa melaksanakan prakerin tidak ada lagi beban dari mata pelajaran lain yang harus dikerjakan, bahkan di bawa-bawa sampai lokasi prakerin.

## 2. Penghargaan untuk Lulusan

Tujuan utama pengembangan SMK 4 tahun yaitu untuk meningkatkan kualitas kompetensi lulusan agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan DU/DI, dan lebih berdaya saing dalam berkompetisi memasuki dunia kerja. Konteks berdaya saing dalam hal ini diharapkan tidak hanya sebatas terserap ke dunia kerja, tetapi mampu

meningkatkan jenjang (*level*) pada KKNI. Peningkatan jenjang pada KKNI tersebut sudah pasti akan berimplikasi pada peningkatan jabatan/posisi pekerjaan, yang sudah tentu akan diikuti pula oleh peningkatan upah/gaji, fasilitas, dan kesempatan peningkatan karir. DU/DI yang telah mempunyai pengalaman merekrut lulusan SMK 4 tahun menyatakan telah memberikan penghargaan (pengakuan) kepada kualitas lulusan SMK 4 tahun, dalam bentuk memberikan posisi/tanggung jawab pekerjaan yang lebih tinggi dibanding yang diberikan kepada lulusan SMK 3 tahun, yang tentu saja berimplikasi pada gaji/upah yang lebih tinggi dan fasilitas bekerja, serta peluang karir yang lebih baik. Adapun mekanisme pemberian “penghargaan” tersebut ada yang langsung dilakukan pada saat rekrutmen karyawan baru, dan ada juga sebagian DU/DI melakukannya setelah siswa lulus SMK 4 tahun (setelah selesai Prakerin) dan mendatangi sekolah (SMKN 5) sekaligus melakukan seleksi.

Selain dalam bentuk dan mekanisme tersebut di atas, penghargaan bagi lulusan SMK 4 tahun juga diberikan ketika akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dalam rangka peningkatan/pengembangan kompetensi atau keahliannya. Bentuk penghargaan tersebut berupa konversi (pengakuan) terhadap beberapa mata pelajaran yang telah diselesaikannya sewaktu di SMK, sehingga tidak perlu mengikuti lagi (mengulang) dalam perkuliahan. Bentuk dan mekanisme penghargaan seperti ini telah dirintis pada sebuah Politeknik di kota Bandung, yaitu Politeknik Manufaktur Negeri Bandung (Polman Bandung).

### **3. Pengelolaan**

Eksistensi SMK harus dinamis (luwes) mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat (DU/DI). Lebih tegas lagi SMK harus benar-benar spesifik dan menjanjikan keahlian khusus yang dibutuhkan DU/DI. Hal itu dikarenakan lulusan SMK memang dipersiapkan untuk memasuki DU/DI dan diberikan peluang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, terutama dalam rangka peningkatan/pengembangan kompetensinya. Dalam konteks pembangunan

nasional, penyelenggaraan pendidikan kejuruan (SMK) harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Secara umum, masalah kekurangan guru (terutama guru produktif) pada semua SMK harus segera diatasi. Kondisi kekurangan guru produktif yang sudah sangat kronis mengakibatkan tuntutan untuk segera memenuhi kekurangan guru ini sudah tidak cukup mengandalkan pada mekanisme rekrutmen guru yang normatif, tetapi juga dapat menggunakan beberapa mekanisme alternatif. Mekanisme alternatif tersebut yaitu program: (i) alih tugas guru, (ii) alih fungsi/keahlian guru, (iii) pendampingan guru, (iv) PPG calon guru produktif, dan (v) rekrutmen guru produktif dari DU/DI. Meskipun pengembangan SMK 4 tahun tidak berimplikasi langsung pada penambahan jumlah guru, bagaimanapun juga upaya-upaya pemenuhan kebutuhan guru produktif sangat berdampak positif terhadap keberhasilan pengembangan SMK 4 tahun. Pengembangan SMK 4 tahun yang sejalan dengan Inpres No. 9/2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Penguatan Daya Saing SDM Indonesia ini, antara lain mendorong peningkatan proporsi Prakerin. Kondisi tersebut mempunyai konsekuensi meningkatnya kapasitas pendampingan guru produktif kepada siswa, sejalan dengan tujuan perpanjangan masa studi 4 tahun yaitu untuk “mencetak” lulusan SMK dengan kompetensi (keahlian) yang benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan DU/DI. Dalam hal ini, hampir semua paket keahlian tahapan pelaksanaan Prakerinnya akan terdistribusi ke beberapa semester yang dimulai pada semester 3. Peningkatan kapasitas pendampingan guru produktif tersebut akan semakin terasa manakala mencermati masih cukup kentalnya persepsi kalangan DU/DI secara umum tentang Prakerin, yang selama ini merasa (i) hubungan dengan sekolah (SMK) kurang harmonis, (ii) dalam pelaksanaan Prakerin ada kalanya tidak ada komunikasi dan evaluasi bersama dengan SMK selama kegiatan prakerin, dan (iii) Tidak/belum ada *revenue* (nilai keuntungan) yang berarti bagi DU/DI dari dilaksanakannya prakerin di tempat mereka.

Sejauh ini, secara umum kalangan DU/DI mempunyai persepsi bahwa hubungan dan kerjasama mereka dengan SMK masih jauh dari harapan DU/DI. Kalangan DU/DI masih merasa belum menjadi satu kesatuan sistem dengan dunia pendidikan, jika pun ada jumlahnya sangat sedikit (terbatas). Dengan demikian, tidak ada kesesuaian dan keselarasan (*link and match*) antara DU/DI dengan SMK. Sebagai contohnya Pendirian SMK di banyak daerah hampir tidak lagi memperhatikan bidang, program, dan paket keahlian apa yang dibutuhkan industri di wilayah setempat. Sebagai akibatnya ketidak seimbangan antara ketersediaan (*supply*) dengan kebutuhan (*demand*) tenaga kerja di Indonesia semakin besar, baik dalam hal kualitas, kuantitas, tempat/lokasi, dan waktu. Contoh kasus dari hasil penelitian ini yaitu adanya “desakan” agar penyelenggaraan paket keahlian Pengawasan Mutu Hasil pertanian dan Perikanan digabung saja dengan paket keahlian Pengolahan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan, karena selama ini DU/DI membutuhkan lulusan yang menguasai pekerjaan tersebut dari kedua keahlian/kompetensi tersebut.

Kondisi ketimpangan tersebut di atas, menunjukan arah pendidikan menengah kejuruan (SMK) masih *supply driven*, padahal melalui Inpres No. 9/2016 arah tersebut harus dan akan diubah menjadi *demand driven* (merujuk pada kebutuhan DU/DI). Dengan arah pendidikan yang berorientasi *demand driven*, maka proses pembelajaran dan semua masukan instrumen (*input instrumental*) - termasuk sarana dan fasilitas pembelajaran- yang dilibatkan dalam proses itu sendiri harus selalu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan DU/DI. Dalam kenyataan hingga saat ini, kondisi sarana dan fasilitas pembelajaran seperti laboratorium; bengkel; mesin, yang dimiliki oleh sebagian besar SMK sangat rendah kuantitas dan kualitas teknologi yang digunakannya, terlebih jika dibandingkan dengan teknologi pada peralatan yang digunakan oleh DU/DI. Dengan kondisi tersebut, kalangan DU/DI meragukan penguasaan kompetensi dan kesiapan kerja lulusan SMK. Bahkan ketika melaksanakan Prakerin, sekalipun pihak DU/DI terkesan keberatan jika siswa “harus” menggunakan beberapa

peralatan yang ada di DU/DI yang memiliki resiko tinggi (high risk). Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi gap/ketertinggalan teknologi peralatan praktik yang dimiliki SMK dengan yang digunakan DU/DI.

Meskipun DU/DI merupakan komponen (unsur) elementer dalam penyelenggaraan SMK, faktanya masih ada pihak/komponen lain yang dibutuhkan perannya untuk keberhasilan penyelenggaraan SMK secara optimal. Pihak/komponen tersebut yaitu Pemerintah/Pemerintah Daerah (dinas-dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Asosiasi DU/DI (Kadin/Kadinda), Lembaga Sertifikasi, Asosiasi Profesi/Keahlian, dan Masyarakat. Diperoleh fakta sebagian besar SMK dengan dukungan pemerintah daerahnya masing-masing telah merintis keterlibatan pihak-pihak tersebut menjadi suatu ekosistem pendidikan kejuruan, yang tentu saja dengan “variasi” pihak-pihak yang terlibat dan dinamika keterlibatannya masing-masing di setiap daerah berbeda-beda. Artinya, sesuai dengan kemampuan SMK dan kebijakan daerahnya masing-masing, terdapat perbedaan pihak-pihak yang terlibat dengan intensitas perannya masing-masing dalam ekosistem pendidikan kejuruannya.

## B. Saran

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Penguatan Daya saing SDM Indonesia menjadi salah satu acuan yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan menengah kejuruan. Dengan terbitnya Inpres tersebut, semestinya berbagai kendala dalam penyelenggaraan dan pengembangan SMK dapat segera diatasi, terutama kendala-kendala yang selama ini ditemukan tatkala melakukan koordinasi dan sinergi antar berbagai pengelola sektor (kementerian) dan lembaga/institusi yang tupoksi dan kewenangannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan SMK. Inpres tersebut pada gilirannya sangat diharapkan akan menggerakkan semua komponen ekosistem pendidikan kejuruan agar aktif bersinergi dalam

penyelenggraan dan pengembangan SMK untuk menghasilkan SDM yang semakin kompetitif.

Dengan mengacu pada konteks tersebut dan berdasarkan analisa hasil temuan penelitian, disampaikan saran-saran kebijakan sebagai berikut.

## 1. Kompetensi dan Masa Studi

Memperhatikan berbagai masukan dari pihak DU/DI tentang kompetensi-kompetensi yang mereka inginkan untuk masing-masing paket keahlian, menunjukkan bahwa sekolah tidak cukup hanya menggunakan kurikulum yang telah “terstandar” saja untuk setiap paket keahlian. Ternyata, dinamika yang terjadi di DU/DI, pada batas-batas tertentu sering berimplikasi terhadap “tuntutan” dilakukannya peningkatan/penambahan dan pengembangan pada kompetensi yang selama ini diajarkan di SMK, agar lulusannya nanti mampu langsung beradaptasi di DU/DI. Simpulan hasil analisis di atas menunjukkan ternyata tuntutan tersebut tidak harus dijawab dengan penambahan/perpanjangan masa studi untuk semua paket keahlian (yang dikaji). Opsi yang diusulkan dalam hal ini yaitu:

- a. Untuk paket-paket keahlian yang lulusannya berpeluang besar untuk berwirausaha dan mengisi pasar kerja dibidang industri kreatif, seperti Tata Busana, tidak diperlukan penambahan masa studi menjadi 4 tahun. Kecepatan untuk segera “*involve*” dalam dunia wirausaha dan industri kreatif yang sangat dinamis/kompetitif memang sudah menjadi suatu prasyarat. Oleh karena itu, masyarakat, khususnya calon peserta didik, yang sangat berminat berwirausaha dan berkiprah dalam dunia industri kreatif juga membutuhkan masa pendidikan yang tidak lama atau relatif singkat. Untuk jenis paket keahlian ini, peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi untuk menyesuaikan dengan dinamika di DU/DI dapat ditempuh

dengan mengubah komposisi alokasi jam belajar untuk beberapa mata pelajaran, dengan tujuan memperbesar alokasi jam belajar mata pelajaran kejuruananya. Sebagai contoh pada kasus paket keahlian Tata Busana, alokasi jam belajar untuk mata pelajaran kelompok normatif seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, serta mata pelajaran kelompok adaptif seperti Matematika; IPA; dan IPS, dapat dikurangi. Pengurangan tersebut selanjutnya disubstitusi dengan penambahan jam belajar untuk mata pelajaran mata pelajaran kelompok produktif atau keahliannya. Dengan demikian, dapat dilakukan upaya peningkatan/pengembangan kompetensi tanpa harus menambah porsi jam belajar dalam struktur kurikulum, yang dapat berpotensi menambah masa studi.

- b. Untuk paket-paket keahlian yang lulusannya diproyeksikan akan mengisi pasar kerja industri dan usaha menengah, tidak perlu juga dilakukan penambahan masa studi. Dalam penelitian ini, paket-paket keahlian tersebut yaitu Teknik Gambar Bangunan, dan Nautika Kapal Penangkapan Ikan. Dinamika operasional industri dan usaha menengah umumnya tinggi dan mempunyai masa *return of investment* yang relatif cepat (siklus produksi yang relatif pendek) seperti jasa konstruksi, pembangunan gedung, dan penangkapan ikan. Dengan sifatnya yang demikian, jenis industri dan usaha menengah ini diproyeksikan akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga dibutuhkan pula ketersediaan (*supply*) calon tenaga kerja yang lebih banyak/cepat. Upaya peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi untuk menyesuaikan dinamika di DU/DI dapat ditempuh dengan memfasilitasi dan mendorong SMK untuk dapat menyelenggarakan pendidikan terintegrasi, yaitu menjalin kemitraan yang lebih komprehensif dengan DU/DI untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pembelajaran praktik di DU/DI, baik dalam aspek keterampilan teknis maupun etos kerja (karakter).

- c. Untuk paket-paket keahlian yang lulusannya diarahkan untuk mengisi pasar kerja industri manufaktur, perlu dipertimbangkan penambahan masa studi. Dalam penelitian ini paket-paket keahlian tersebut terdiri atas Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan, dan Kesehatan Hewan yang akan dikembangkan menjadi Kesehatan dan Reproduksi Hewan. Industri manufaktur umumnya berskala besar dan sarat pemanfaatan teknologi. Kondisi demikian menuntut tenaga kerja yang terlibat di dalamnya benar-benar kompeten dapat menguasai teknologi yang digunakan DU/DI, dan teknologi tersebut relatif cepat berkembang karena tuntutan pasar dan efek “kompetisi” di kalangan DU/DI sendiri. Pihak SMK tentu tidak akan mampu bekerja keras sendiri dalam menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi sebagaimana yang dituntut tersebut. Sebesar apapun upaya yang dilakukan SMK untuk menyesuaikan sarana dan fasilitas praktik, tidak pernah akan mampu menyamai sarana dan fasilitas produksi yang digunakan DU/DI. Strategi/pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan memperbanyak/memperluas materi mata pelajaran kejuruan (produkif), dan menambah durasi Prakerin. Khusus untuk menambah durasi Prakerin, SMK-SMK perlu diperkuat dan difasilitasi oleh berbagai institusi/lembaga di setiap tingkat wilayah yang memiliki tupoksi dan kewenangan dalam hal tersebut. Selain dari yang telah disebut dalam Inpres No. 9/2016 untuk domain kebijakannya, pada domain operasional institusi/lembaga tersebut yaitu Kadin/Kadinda, BKPM (khusus terkait DU/DI PMA), asosiasi pengusaha (APINDO), dan asosiasi-asosiasi profesi.
- d. Untuk paket-paket keahlian yang diarahkan untuk memiliki profesi/keahlian khusus, contoh kasus dalam penelitian ini yaitu keahlian Nautika Kapal Niaga, perlu juga dipertimbangkan penambahan masa studi. Regulasi yang berlaku hingga sekarang, untuk diakui sebagai pelaut sehingga dinyatakan laik “melaut”, lulusan SMK paket keahlian ini diharuskan mengikuti terlebih dulu uji sertifikasi “Pra Prala”. Setelah dinyatakan lulus dari uji tersebut,

masih diharuskan melaksanakan Prala “di atas kapal niaga” selama hampir 1 tahun. setelah menempuh itu semua dengan baik, barulah lulusan SMK paket keahlian Nautika Kapal Niaga akan diberikan sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV (ANT IV). Fakta yang semakin menambah lama untuk mendapatkan sertifikat tersebut adalah sulitnya atau panjangnya “antrian” untuk mendapatkan kapal niaga yang bersedia menjadi tempat pelaksanaan Prala. Dengan demikian, sulitnya lulusan SMK 3 tahun dari paket keahlian ini untuk mengikuti proses sertifikasi kepelautannya, maka sangat diharapkan penambahan masa studi selama 1 tahun ini dapat diformulasikan seutuhnya sebagai tingkat/kelas XIII, dan diprogramkan secara kurikuler sebagai masa/tahap sertifikasi keprofesiannya sebagai pelaut. Oleh karena itu, ketika siswa dinyatakan lulus dengan masa studi 4 tahun, sekaligus juga sudah memiliki sertifikat ahli nautika, yang berarti dapat langsung “melaut”.

## **2. Penghargaan untuk Lulusan**

Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan SMK, penambahan 1 tahun masa studi untuk paket-paket keahlian tertentu dimaksudkan agar lulusannya nanti benar-benar terjamin mencapai kompetensi siap kerja sesuai bidang keahliannya. Berangkat dari “statusnya” sebagai tenaga kerja, penghargaan (*recognition*) yang sebaiknya diberikan kepada lulusan tersebut adalah kenaikan *level* (tingkat) pada KKNI, dari *level* 2 selama ini (SMK 3 tahun) menjadi *level* 3 (setara D1). Agar kenaikan *level* tersebut tidak terstigmakan “menyalahi” aturan, karena dalam KKNI *level* 3 ke atas adalah “domainnya” pendidikan tinggi (Diploma) atau pendidikan vokasi, maka uji sertifikasi untuk lulusan SMK 4 tahun jangan dilakukan oleh LSP P-1 atau sekolah sendiri, tetapi setidaknya dilakukan oleh LSP P-2 (DU/DI). Selanjutnya, karena lulusan SMK juga tetap diberi peluang untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, maka mutlak harus diberikan konversi (pengakuan) terhadap mata pelajaran mata pelajaran yang

sama/setara dengan mata kuliah mata kuliah di perguruan tinggi, untuk tidak perlu diikuti/ditempuh kembali.

### **3. Pengelolaan**

- a. SMK tetap diposisikan sebagai satuan pendidikan menengah yang mempersiapkan lulusannya untuk memasuki DU/DI, meski tetap masih memberi peluang bagi lulusannya jika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun demikian, peluang melanjutkan pendidikan tersebut sebaiknya diarahkan kemudian (beberapa waktu setelah bekerja) untuk peningkatan/pengembangan keahliannya dalam rangka pengembangan karir di DU/DI. Hal ini untuk menegaskan “*mainstream*” sistem pendidikan di SMK, sehingga masyarakat akan mempunyai pilihan yang semakin jelas dalam memperoleh layanan pendidikan.
- b. Mencermati alternatif-alternatif pengadaan guru produktif, baik yang telah dilakukan maupun yang sedang dijajagi dalam kondisi saat ini, tampak bahwa jalur rekrutmen tenaga ahli/terampil dari DU/DI merupakan pilihan yang paling bernilai strategis. Namun, mempertimbangkan perkembangan yang ada sejauh ini, terkesan kuat bahwa alternatif ini belum didayagunakan dengan benar-benar optimal. Setidaknya, hal tersebut terlihat dari fenomena masih tingginya angka kebutuhan akan guru produktif di SMK, sementara berbagai ukuran dan jenis industri serta dunia usaha di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan cukup pesat dalam kurun 2-3 dekade belakangan ini. Keberadaan tenaga-tenaga ahli/terampil dalam pertumbuhkembangan DU/DI tersebut sangat potensial untuk dilibatkan sebagai tenaga pendidik kelompok mata pelajaran produktif. Eksistensi mereka sebagai tenaga ahli/terampil tidak terbantahkan, karena disamping telah tersertifikasi mereka juga adalah

praktisi yang berpengalaman di bidang keahliannya masing-masing. Kalaupun masih ada persoalan/kekurangan yang “tersisa”, paling hanya sebatas teknik/metode mengajar yang relatif tidak sulit penyesuaianya, karena pada dasarnya dunia kerja juga sangat kental dengan nuansa belajar mengajar. Di samping sebagai tenaga pengajar (guru), bentuk lain pemanfaatan tenaga ahli dari DU/DI ialah sebagai pelatih bagi guru dan/atau calon guru produktif. Bagi guru pelatihan tersebut tentu sangat bermanfaat, setidaknya untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Adapun bagi calon guru, misal dalam program PPG bagi calon guru produktif, tentu lebih menjamin memperoleh keterampilan (*skills*) dan pengetahuan yang *up to date*, karena diberikan langsung oleh praktisi yang sekaligus tenaga ahli dari DU/DI.

- c. Upaya menambah durasi waktu pelaksanaan Prakerin tidak dapat didelegasikan hanya pada tingkat sekolah. Mencermati “posisi” *bargaining* SMK terhadap DU/DI, hingga saat ini umumnya SMK yang ada merasa *inferior* terhadap DU/DI, padahal seharusnya dalam konteks *supply-demand* posisi tersebut harus setara. Untuk itu, SMK perlu diberdayakan dan difasilitasi agar “percaya diri” mempunyai *bargain* (daya tawar) yang tinggi terhadap DU/DI, terutama dalam hal penyediaan calon tenaga kerja yang kompeten dan profesional sesuai kebutuhan DU/DI. Dengan begitu, SMK akan mampu membina hubungan yang saling menguntungkan dengan DU/DI. Pemberdayaan yang dimaksud berupa (i) pemberian diklat-diklat membangun kemitraan dan *entrepreneurship* kepada jajaran struktural SMK, yaitu kepala sekolah; wakil-wakil kepala sekolah; dan kepala-kepala program, (ii) studi banding dan/atau pertukaran gurudengan SMK lain yang telah memiliki sistem kemitraan yang ideal dengan DU/DI, (iii) pemagangan di DU/DI, dan (iv) perbaikan/peningkatan sarana

prasaranan SMK. Dalam hal dukungan fasilitasi berupa regulasi dan pendampingan bagi sekolah yang melibatkan pihak/institusi terkait penyelenggaraan SMK (Inpres No.9/2016), dalam membangun kemitraan dengan DU/DI. Regulasi antara lain memuat pemberian kewenangan yang lebih besar kepada SMK (kepala sekolah) untuk membina kemitraan dengan DU/DI dan pemberian insentif/kemudahan kepada DU/DI yang bersedia menjalin kemitraan dengan SMK terutama dalam hal kerjasama pelaksanaan Prakerin. Insentif/kemudahan antara lain dapat berupa pengurangan/keringanan pajak, retribusi daerah, tarif bea masuk (khusus terkait impor bahan dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan Prakerin), kemudahan penyediaan prasarana (lahan/lokasi), dan kemudahan pemberian perizinan.

- d. Langkah penataan dan penyelarasan bidang keahlian perlu didahului oleh pemetaan tentang jenis, jumlah, tingkat, dan aspek-aspek lain dari DU/DI terkait kerjasama dengan SMK yang telah ada. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencermati dan mendata bidang-bidang keahlian apa yang sesungguhnya dibutuhkan, terkait dengan keberadaan industri di suatu wilayah. Pemetaan kemudian harus diikuti dengan penunjukan/pembentukan otoritas yang memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan, memutuskan, dan menata pendirian SMK atau penyelenggaraan suatu bidang keahlian, dengan mengacu kepada keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan (*supply and demand*) tenaga kerja antara sekolah (SMK) dengan DU/DI. Dengan kata lain, otoritas tersebut juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan sistem/kebijakan buka-tutup (*on-off*) terhadap bidang/program/paket keahlian yang diselenggarakan oleh SMK. Namun demikian, dalam kondisi “khusus” sistem atau kebijakan ini masih dapat memberi ruang bagi tetap diselenggarakannya suatu program/paket keahlian tertentu

oleh SMK. Kondisi khusus tersebut misalnya untuk penyelenggaraan program/paket keahlian yang lulusannya sangat dibutuhkan segera oleh DU/DI disuatu daerah, sementara di daerah dimana industri tersebut berada belum terdapat atau belum memungkinkan segera dibukanya program/paket keahlian atau SMK dengan program/paket keahlian yang dibutuhkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi November 2013.
- \_\_\_\_\_. 2014. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Mei 2014.
- \_\_\_\_\_. 2014. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi November 2014.
- \_\_\_\_\_. 2015. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Mei 2015.
- \_\_\_\_\_. 2015. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi November 2015.
- \_\_\_\_\_. 2016. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Mei 2016.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2009. Pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan, Jakarta: Depdiknas.
- Brodjonegoro, Satryo Soemantri. 2016. Revitalisasi Pendidikan Kejuruan. Kompas 10 Mei 2016
- Bustamin, 2011 dalam web Bustamin-againts-block.com/.../printing.karakteristik-dokumentasi.html
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. 2016. Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Workshop Tindak Lanjut Kerjasama Vokasi Indonesia-Jerman. Jakarta, 18 Mei 2016
- Direktorat Pembinaan SMK. 2016. Surat No. 3037/D5.3/KR/2016 tentang Permohonan Saran dan Masukan terkait Draft Spektrum Keahlian Menengah Kejuruan Tahun 2016

- Devi Puspitasari. 2012. Strategi Pembelajaran Tepadu.Yogyakarta: FAMILIA
- Hendarman. 2015. SMK Berkualitas Menjelang 2025 (Draft). Direktorat PSMK. Jakarta.
- Instruksi Presiden No. 19 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Penguanan SDM Indonesia
- Jandhyala, B.G.T. 2002. Vocational Education And Training In Asia. Kluwer Academic Publishers. John P. Keeves and Rye Watanabe (eds.). Dordrecht, Netherlands
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2006. Teropong Wajah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. Jakarta
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor:251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan Keahlian di SMK
- Kompas.com. 19 Oktober 2015. SMK 4 Tahun Disiapkan. Diunduh Selasa 1 Maret 2016 jam 14:15
- Muhardiansyah, Doni. 2010. Inovasi Dalam Sistem Pendidikan, Jakarta
- Mulyadi, Yadi; Setiawan, Agus; Purnawan. 2010. Studi Evaluasi Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Di Propinsi Bangka Belitung. Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Puspitasari, I. D. 2010. Studi Eksplorasi Tentang Pola Kerjasama Praktik Kerja Industri SMK Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang, Skripsi (tidak

dipublikasikan), Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2019.  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta

Saragih, Ferdinand D. 2015. Indonesia dan Masyarakat Ekonomi Asean: Peluang dan Tantangan.

Siswantari. 2014. Kajian Kebijakan Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan. 2014.

Sudira, P. 2006. Buku Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional.

Suryadi, Ace. 2010. Permasalahan dan Alternatif Kebijakan Peningkatan Relevansi Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tenaga Kerja

Wardiman Djojonegoro, 1998. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui SMK. Jakarta: Jayakarta Agung Offset